

LAPORAN KINERJA



2024



DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR
DAN ZAT ADIKTIF



SEKAPUR SIRIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tahun 2024 ini telah selesai disusun. Laporan Kinerja ini merupakan suatu bentuk komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan ini menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, dan realisasi anggaran.

Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi masukan sekaligus umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja diantaranya melalui inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan dan efektivitas pengawasan BPOM, khususnya di Kedeputan Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif pada masa mendatang.

Jakarta, 2025
Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA



Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si

Daftar Isi

DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR.....	III
DAFTAR TABEL	V
RINGKASAN EXECUTIVE	IX
RINGKASAN EXECUTIVE.....	IX
1. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	ix
2. Capaian Strategis.....	x
3. Realisasi dan Efisiensi Anggaran.....	x
4. Kendala dan Langkah Antisipatif Tahun Mendatang	xi
HIGHLIGHT KINERJA.....	XII
AWARENESS SISTEM MUTU ANTI SUAP ISO 37001:2016	xii
DIALOG KEDEPUTIAN 1 DENGAN PLT. KEPALA BPOM: MEMBANGUN BUDAYA INOVATIF DAN AGILE	xiii
BPOM MENUJU WHO LISTED AUTHORITY	xiv
PENGHARGAAN 2024.....	XV
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	5
1.4 PROFIL SDM DEPUTI BIDANG PENGAWASAN ONPPZA	8
1.5 ISU STRATEGIS.....	10
BAB II: PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA	15
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	19
2. 3 PERJANJIAN KINERJA (PK)	20
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	27
2.5. METODE PENGUKURAN	30
2.5.1. Indikator Kinerja	30
2.5.2. Kriteria Pencapaian Indikator.....	55
2.5.3. Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).....	56
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA	57
3.1 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NPPZA.....	57
3.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA.	65

3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2020-2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH	69
3.4 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NPPZA DENGAN SATUAN KERJA LAIN TAHUN 2024	74
3.5 PEMBAHASAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2024 (PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN /PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA, UPAYA PERBAIKAN, PENYEMPURNAAN KINERJA ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA, SERTA ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM MENCAPAI KINERJA)	79
3. 6. Analisis efisiensi atas penggunaan anggaran per IKSP dalam mencapai kinerja	171
3. 7 Evaluasi tahun ke-5.....	176
3. 8 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis.....	192
3.9 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	198
3.10 Pemanfaatan Informasi Kinerja.....	206
3.11 Realisasi Anggaran	212
BAB V: PENUTUP.....	296
5.1 KESIMPULAN.....	296
5.2 SARAN.....	297

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA	5
Gambar 1. 2 Profil SDM Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA.....	9
Gambar 3. 1 Peta Strategi Level 1 Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	58
Gambar 3. 2 Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2024 dari Aplikasi SIMETRIS	60
Gambar 3. 3 Perbandingan Indeks Pengawasan Obat dengan Indeks pengawasan komoditi lain dan indeks secara nasional	84
Gambar 3. 4 Kegiatan Sosialisasi Aplikasi BPOM-WATCH Tanggal 20 Februari 2024	86
Gambar 3. 5 Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Tanggal 21-22 Februari 2024.....	86
Gambar 3. 6 Rapat Sosialisasi Peraturan Pemerintah Bersama Kementerian Kesehatan Tanggal 12 Agustus 2024.....	87
Gambar 3. 7 Kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans dalam rangka Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam Pengawasan Keamanan Obat.....	87
Gambar 3. 8 Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat vs Persentase komoditi lain tahun 2024.....	89
Gambar 3. 9 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.....	90
Gambar 3. 10 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat.....	96
Gambar 3. 11. Dokumentasi Kegiatan Joint Inspection Badan POM dan Kementerian Pertanian	124
Gambar 3. 12 Dokumentasi Diseminasi SAS di Wilayah Solo	125
Gambar 3. 13 Dokumentasi Diseminasi SAS di Wilayah Surabaya.....	126
Gambar 3. 14 Dokumentasi Diseminasi SAS di Wilayah Bandung.....	126
Gambar 3. 15 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat.....	128
Gambar 3. 16 Direktorat Standardisasi Obat, NPPZA melakukan penggalangan komitmen dalam rangka percepatan pembangunan ZI menuju WBBM disaksikan Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dan Perwakilan unit teknis lain.....	148

Gambar 3. 17 Salah satu unit teknis di Kedeputian 1 (Direktorat Standardisasi Obat, NPPZA) melakukan kegiatan refreshment RB dalam rangka percepatan pembangunan ZI menuju WBBM.	148
Gambar 3. 18 IKSP Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA Tahun 2024	160
Gambar 3. 19 Rincian Revisi DIPA Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA Tahun 2024.....	161
Gambar 3. 20 Detail IKSP Kinerja Detail Capaian RO	165
Gambar 3. 21 Nilai SMART Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2024 dari aplikasi SMART DJA	166
Gambar 3. 22 Nilai IKPA Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2024 dari aplikasi Omspan	166

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Visi, Misi, Sasaran Program dan Indikator Kinerja	15
Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahunan.....	19
Tabel 2. 3 Matriks Reviu Indikator	21
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja tahun 2024	25
Tabel 2. 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2024.....	27
Tabel 2. 6 Rentang Nilai Kriteria Indeks kepatuhan pelaku usaha Obat.....	33
Tabel 2. 7 Kategori Kriteria Pengukuran IKK	40
Tabel 2. 8 Evaluasi terhadap pelaksanaan RB K/L dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB ...	46
Tabel 2. 9 Kriteria Evaluasi Kinerja dengan Memperhatikan Perbandingan Realisasi dan Target	56
Tabel 2. 10 Kriteria NPSS dengan Memperhatikan Perbandingan Realisasi dan Target.....	56
Tabel 3. 1 Pencapaian NPS Perspektif Sasaran terhadap Target Perjanjian Kinerja	59
Tabel 3. 2 Nilai Pencapaian Sasaran Perspektif dan NPS Total Deputi Bidang pengawasan Obat, NPPZA tahun 2020-2024	61
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya	62
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya	65
Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan realisasi kinerja sepanjang tahun 2020-2024 dengan target jangka menengah Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.....	70
Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dengan Deputi II dan Deputi III di lingkungan BPOM.....	74
Tabel 3. 7 Capaian IKSP pada SP1. Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu.....	81
Tabel 3. 8 Pencapaian Capaian Indeks Pengawasan Obat Tahun 2020 s.d 2024	82
Tabel 3. 9 Dimensi dan Atribut IKSP Indeks Pengawasan Obat	83
Tabel 3. 10 Perbandingan realisasi nilai Indeks Pengawasan Obat antar komoditas di BPOM ..	84
Tabel 3. 11 Capaian Persentase obat yang memenuhi syarat Tahun 2020 s.d 2024	88
Tabel 3. 12 Capaian IKSP pada SP2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau	90
Tabel 3. 13 Pencapaian Capaian Kepatuhan (Compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tahun 2020 hingga 2024	92

Tabel 3. 14 Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2020 - 2024.....	97
Tabel 3. 15 Capaian IKSP Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat Tahun 2024	104
Tabel 3. 16 Pengukuran IKEPU untuk komoditi Obat	105
Tabel 3. 17 Nilai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) tahun 2024	105
Tabel 3. 18 Perbandingan capaian indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU).....	106
Tabel 3. 19 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan obat Kedeputan 1 Tahun 2024	110
Tabel 3. 20 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional dan Komoditi.....	111
Tabel 3. 21 Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024.....	114
Tabel 3. 22 Capaian IKSP Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat.....	117
Tabel 3. 23 Perbandingan Capaian IKK Kedeputan 1 dibandingkan Kedeputan Lain di BPOM tahun 2024.....	118
Tabel 3. 24 Capaian IKSP pada Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat.....	120
Tabel 3. 25 Capaian Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020-2024	121
Tabel 3. 25 Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Tahun 2020-2024.....	123
Tabel 3. 26 Indeks Pelayanan Publik Unit Teknis Kedeputan 1	127
Tabel 3. 27 Capaian Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024	130
Tabel 3. 28 Tabel Perbandingan Realisasi IKSP Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat.....	133
Tabel 3. 29 Realisasi dan Capaian IKSP Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar Tahun 2024	136
Tabel 3. 30 Pencapaian Capaian IKSP Persentase Inovasi Obat yang Dikawal sesuai Standar Tahun 2020-2024	136
Tabel 3. 31 Capaian IKSP pada Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Optimal.....	138

Tabel 3. 32 Nilai Realisasi IKSP Indeks RB Unit Teknis di Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2024	139
Tabel 3. 33 Pencapaian Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dibandingkan dengan target tahun Tahun 2024	140
Tabel 3. 34 Perbandingan Hasil Evaluasi Pembangunan ZI untuk Delapan Area yang Menjadi Sasaran Perubahan RB pada masing-masing unit teknis di Kedeputian 1 Tahun 2024.	144
Tabel 3. 35 Pencapaian Capaian IKSP Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2020-2024	149
Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 di Lingkungan Kedeputian 1.....	151
Tabel 3. 37 Capaian IKSP Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal	153
Tabel 3. 38 Pencapaian Capaian IKSP Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2024	153
Tabel 3. 39 Capaian IKSP Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tahun 2024	155
Tabel 3. 40 Pencapaian Capaian IKSP Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2024	156
Tabel 3. 41 Capaian IKSP pada SP10. Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel.....	157
Tabel 3. 42 Pencapaian Realisasi Nilai Kerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024	158
Tabel 3. 43 Tabel Ukuran Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran.....	159
Tabel 3. 44 Target dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA Tahun 2024 (Pagu setelah dikurangi blokir).....	162
Tabel 3. 45 Capaian Realisasi Output Unit di Kedeputian 1 Tahun 2024	164
Tabel 3. 46 Hasil Penilaian Pengelolaan BMN Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA.....	169
Tabel 3. 47 Tingkat Efisiensi	173
Tabel 3. 48 Analisis Tren Evaluasi tahun ke-5.....	176
Tabel 3. 49 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis.....	193
Tabel 3. 50 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW 3 Tahun 2024 dan Rekomendasi TW 4 Tahun 2024	198
Tabel 3. 51 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW 3 Tahun 2024 dan Rekomendasi TW 4 Tahun 2024.....	207

Tabel 3. 52 Penyesuaian Kinerja Sesuai Hasil Evaluasi Kinerja.....	210
Tabel 3. 53 perubahan anggaran pada setiap indikator kinerja.....	213
Tabel 3. 54 Perbandingan Realisasi Kinerja vs Realisasi Anggaran	214
Tabel 3. 55 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran vs Sasaran Program Tahun 2024.....	218
Tabel 3. 56 Perhitungan Efisiensi Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2024	220
Tabel 4. 1 Target Kinerja Direktorat Standardisasi ONPPZA hingga Akhir Periode Renstra	235
Tabel 4. 2 Target Kinerja Direktorat Registrasi Obat hingga Akhir Periode Renstra.....	237
Tabel 4. 3 Target Kinerja Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA hingga Akhir Periode Renstra	239
Tabel 4. 4 Target Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi ONPP hingga Akhir Periode Renstra	241
Tabel 4. 5 Target Kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP hingga Akhir Periode Renstra	244
Tabel 4. 6 Analisis Tren Tahun ke-5 Direktorat Standardisasi ONPPZA.....	246
Tabel 4. 7 Analisis Tren Tahun ke-5 Direktorat Registrasi Obat.....	251
Tabel 4. 8 Analisis Tren Tahun ke-5 Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	256
Tabel 4. 9 Analisis Tren Tahun ke-5 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	263
Tabel 4. 10 Analisis Tren Tahun ke-5 Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA	270
Tabel 4. 11 Analisis Gap Evaluasi Tahun ke-5 Direktorat Standardisasi ONPPZA.....	275
Tabel 4. 12 Analisis Gap Evaluasi Tahun ke-5 Direktorat Registrasi Obat.....	278
Tabel 4. 13 Analisis Gap Evaluasi Tahun ke-5 Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP .	283
Tabel 4. 14 Analisis Gap Evaluasi Tahun ke-5 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	286
Tabel 4. 15 Analisis Gap Evaluasi Tahun ke-5 Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA.....	289



Ringkasan Executive

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA telah ditetapkan yaitu bertujuan menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat NPPZA guna menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk Obat bagi masyarakat Indonesia. Sesuai Reviu Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2024, terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) meliputi:

1. Terwujudnya obat yang aman dan bermutu.
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau.
3. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal.
4. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat.
5. Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan obat.
6. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat.
7. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama yang optimal.
9. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat.
10. Terkelolanya keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA secara akuntabel.

2. Capaian Strategis

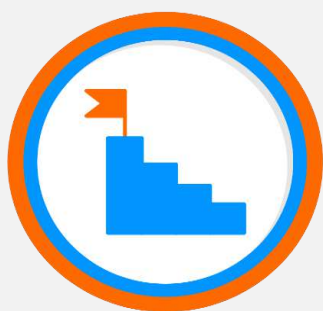
Terhadap ke-10 sasaran strategis diatas diturunkan menjadi 24 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian ke-10 Sasaran Strategis tersebut diukur dengan 24 IKU. Pada tahun 2024, hasil pengukuran pencapaian terhadap ke-10 Sasaran Strategis dengan 24 IKU tersebut, Deputi Bidang



1. Satu (1) IKU dengan kategori **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN** ($>120\%$)
2. Empat belas (14) IKU dengan kategori **SANGAT BAIK** ($100\% < x < 120\%$)
3. Satu (1) IKU dengan kategori **BAIK** ($=100\%$)
4. Delapan (8) IKU dengan kategori **CUKUP** ($70\% < x < 100\%$)

Secara umum, nilai capaian sasaran strategis (NPSS) Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2024 mencapai predikat ISTIMEWA (>100). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2024 telah sesuai target yang ditetapkan.

3. Realisasi dan Efisiensi Anggaran



Dalam rangka mewujudkan target kinerja, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA didukung dengan alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang diperlukan kaitannya dengan pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output) yang terukur selama tahun anggaran 2024.

Adapun pagu anggaran Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2024 adalah sebesar Rp 50,853,127,000 hingga akhir tahun 2024, telah direalisasikan sebesar Rp 50,846,813,452 atau sebesar 99,98% dari total pagu tidak termasuk *Auto Adjustment* sebesar Rp. 3,612,654,000. Dengan demikian, diperoleh tingkat efisiensi anggaran 0.0333 dalam kategori Efisien.

4. Kendala dan Langkah Antisipatif Tahun Mendatang

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis meliputi:



1. **Terbatasnya SDM:** upaya yang telah dilakukan adalah peningkatan rekrutmen dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi.
2. **Tingginya Peredaran Obat Ilegal:** dilakukan intensifikasi pengawasan dan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menekan peredaran obat ilegal.
3. **Kendala Teknologi:** implementasi sistem digital masih dalam tahap pengembangan, namun telah dilakukan peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi untuk mempercepat pengawasan berbasis digital.

Untuk mengatasi kendala yang mungkin terjadi di tahun mendatang, beberapa langkah antisipatif yang telah disiapkan antara lain:

1. **Peningkatan koordinasi antar instansi** untuk memperkuat pengawasan Obat.
2. **Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi** guna mempercepat proses pengawasan dan pelaporan.
3. **Penguatan regulasi kebijakan hukum** untuk memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran di bidang obat dan NPPZA.
4. **Peningkatan literasi masyarakat** mengenai bahaya obat ilegal dan penyalahgunaan NPPZA melalui kampanye edukasi yang lebih masif.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil, Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan guna melindungi kesehatan masyarakat secara lebih optimal di tahun mendatang.



Highlight Kinerja

AWARENESS SISTEM MUTU ANTI SUAP ISO 37001:2016

Kedeputian Bidang Pengawasan Obat NPPZA BPOM berkomitmen untuk terus melakukan perubahan, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Kedeputian 1 menggelar kegiatan awareness pada 3 Agustus 2024, yang dibuka dengan sambutan dari Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA, Ibu Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes.

Acara ini menghadirkan sesi talkshow yang dipandu oleh Direktur Standardisasi Obat NPPZA, Dra. Tri Asti Isnariani, Apt., M.Pharm. Kegiatan ini juga mengundang Bapak Tegar Ega P. dari BSN serta Ibu Dwi Astrini dari Balai Besar POM di Bandung guna memperkuat kesiapan Kedeputian I dalam mengimplementasikan SMAP ISO 37001:2016.

Dengan penerapan SMAP ISO 37001:2016, diharapkan dapat terwujud prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Corporate Governance*), sehingga semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas Badan POM dalam pengawasan obat dan makanan.

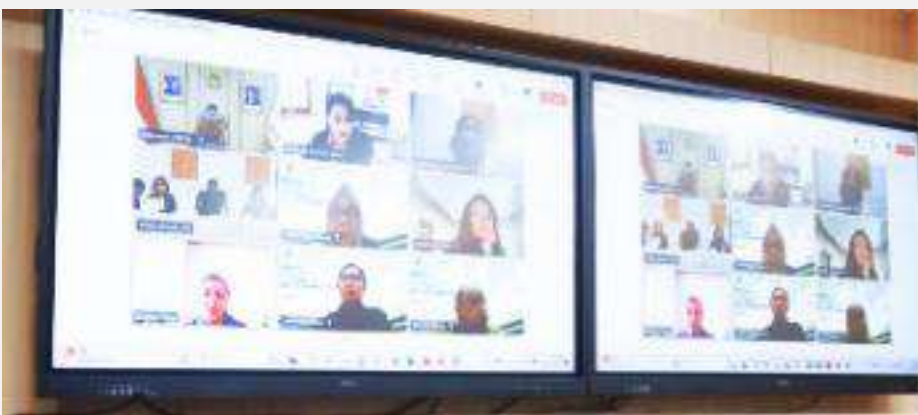


DIALOG KEDEPUTIAN 1 DENGAN PLT. KEPALA BPOM: MEMBANGUN BUDAYA INOVATIF DAN *AGILE*

Kedeputian Bidang Pengawasan Obat NPPZA BPOM mengadakan dialog bersama Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dr. Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS, sebagai bagian dari evaluasi kinerja pada 3 Agustus 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala BPOM menekankan pentingnya kekompakan dan kinerja optimal di seluruh tim Kedeputian I. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai tugas utama BPOM dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, pengakuan BPOM di tingkat global diharapkan semakin memperkuat eksistensi dan dukungan terhadap daya saing produk nasional.

Melalui dialog ini, diharapkan seluruh unit di Kedeputian Bidang Pengawasan Obat NPPZA dapat semakin bersinergi, berinovasi, dan menjadi lebih *agile* dalam menghadapi tantangan pengawasan obat NPPZA di Indonesia.



BPOM MENUJU WHO *LISTED AUTHORITY*

Sebagai lembaga pengawas obat dan makanan nasional, BPOM memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan masyarakat serta terus berupaya memperkuat kredibilitasnya di tingkat internasional. Salah satu pencapaian strategis yang sedang diupayakan adalah memperoleh akreditasi WHO *Listed Authority* (WLA) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Dalam upaya tersebut, Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA berperan aktif dalam memastikan bahwa sistem pengawasan obat NPPZA di Indonesia memenuhi standar global yang ditetapkan oleh WHO. Berbagai langkah strategis tengah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat sistem regulasi, serta memastikan prinsip transparansi dan keberlanjutan dalam setiap proses pengawasan.

Status WLA bukan sekadar pengakuan bergengsi di dunia kesehatan global, tetapi juga menjadi bukti bahwa BPOM, khususnya Kedeputan 1, telah menerapkan standar pengawasan yang ketat dan terpercaya. Dengan pencapaian ini, diharapkan BPOM semakin diakui secara internasional dan dapat mendukung daya saing produk farmasi nasional di pasar global.



Penghargaan 2024

APRESIASI INTERNAL ATAS KOLABORASI/INOVASI/PELAYANAN

1. Apresiasi terhadap pelayanan publik di Kedeputan 1, diantaranya *website Sistem Informasi Obat (SISOBAT)* dan fitur *SOBAT Belajar* yang digunakan dalam pengembangan/replikasi aplikasi serupa oleh Unit teknis Kedeputan II dan III. Program *SMART CDOB* berupa pendampingan *PBF* untuk sertifikasi/resertifikasi *CDOB* yang telah mendapat apresiasi internal dan eksternal. Dimana kedua inovasi tersebut telah termasuk ke dalam 24 TOP Inovasi pada Kompetisi Inovasi (KOIN) BPOM.
2. SDM berprestasi dan terbaik pada kegiatan internal Badan POM, diantaranya: sebagai pegawai berprestasi BPOM, peserta terbaik pertama orientasi P3K, peserta terbaik dalam *workshop Regulatory Impact Assessment (RIA)* pada level *basic* hingga level *intermediate* serta Pegawai Berprestasi BPOM Favorit tahun 2024
3. Dit. Standardisasi ONPPZA sebagai unit dengan pengembangan kompetensi ketiga terbaik kategori unit pusat tahun 2023
4. Dit. Pengawasan DisYan ONPP mendapat peringkat 4 pada penilaian indeks pelayanan publik di BPOM tahun 2024

APRESIASI EKSTERNAL ATAS KOLABORASI/INOVASI/PELAYANAN

1. Apresiasi terhadap pengembangan *SSM (Single Submission)* perizinan *NPP* merupakan strategi Nasional Pencegahan Anti Korupsi dari KPK
2. Ditwas KMEI ONPPZA peringkat 1 dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik K/L 2024 dari Ombudsman.
3. Integrasi Sistem Pelaporan Efek Samping (*e-MESO*) Badan POM dengan Sistem Pelaporan *KIPI Vaksin (Web Keamanan Vaksin)* Kemenkes (on progress)
4. Apresiasi Industri Farmasi (PT Kalbio Global Media) atas pendampingan oleh BPOM dan menggunakan rekomendasi BPOM sebagai referensi *MFDS Korea* selaku regulatory authority yang juga tergabung dalam *PICs*.
5. Apresiasi dan Replikasi program *SMARTCDOB* oleh platform pelatihan swasta *Jadi.Corp*
6. Apresiasi dari Asosiasi GP Farmasi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur atas pelayanan prima registrasi obat

PENGAKUAN INTERNASIONAL

Pengakuan kompetensi oleh Organisasi Nasional dan Internasional melalui kegiatan di luar negeri, diantaranya:

1. Pembicara pada Forum ABD *Vaccine Seminar* di Singapura,
2. Pembicara pada *Asia Partnership Conference of Pharmaceutical Associations (APAC) e-Labeling Regulator's Workshop*
3. Pembicara pada *3rd International Conference on Healthcare*
4. Publikasi *Course Regulatory System on Ensuring Access to Quality Medicines*- JICA, Jepang pada Berita TV Nasional Jepang dan Koran nasional Jepang
5. Pembicara pada *19th International Conference of Drug Regulatory Authorities (ICDRA)*





BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA memiliki tanggung jawab strategis dalam melakukan pengawasan terhadap obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif secara efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, memastikan kualitas, keamanan, serta efikasi Obat, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan Obat yang tidak sesuai standar.

Melalui pengawasan terpadu dan berbasis bukti, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA berupaya mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat, memberantas penyalahgunaan Obat NPPZA, serta menciptakan sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya mencakup tindakan preventif tetapi juga penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, bekerja sama dengan berbagai instansi terkait.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pengawasan Obat merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan, dan merupakan

salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Seiring dengan dinamika lingkungan strategis (nasional maupun global) dan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, maka pada tahun 2024 ini semakin berkembang pula tantangan yang harus dihadapi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tantangan yang dihadapi pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang obat dan kedokteran yang dapat mempercepat peningkatan jumlah dan jenis obat baru/inovatif yang beredar di masyarakat dan berpotensi pada integritas rantai suplai obat dan bahan obat serta peredaran obat *substandard, falsified* dan illegal.
2. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi berdampak pada peningkatan peredaran obat *E-commerce* di bidang obat
3. Krisis kesehatan global dan isu lingkungan dapat memicu peningkatan risiko kontaminasi, resistensi antimikroba dan ancaman bioterorisme.
4. Kepatuhan pelaku usaha (IF, PBF, Fasyanfar) dalam pemastian keamanan, mutu dan khasiat obat yang beredar.
5. Dukungan riset dan pengembangan obat baru termasuk sediaan radiofarmaka dalam rangka mempercepat kemandirian produksi dalam negeri.
6. Evaluasi implementasi edukasi publik terkait penggunaan obat yang baik dan penyalahgunaan obat-obat tertentu.
7. Kesiapan proses *assessment* untuk masuk ke dalam WLA (*WHO Listed Authorities*) dan *reassessment* PIC/S (*Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme*), menuju BPOM dengan reputasi *international regulatory*.

Terhadap tantangan yang dihadapi tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA akan terus, berinovasi untuk meningkatkan efisiensi, bekerja kreatif dan menciptakan solusi baru, beradaptasi dengan perubahan lingkungan, seperti perubahan teknologi, regulasi, atau ekspektasi *stakeholder*, mengelola risiko, dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons risiko ini secara efektif untuk meningkatkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan, meningkatkan kinerja termasuk manajemen sumber daya manusia, infrastruktur serta optimalisasi

bisnis proses. Membangun kolaborasi dan kerja sama lintas fungsi atau bahkan lintas organisasi untuk mengefektifkan pengawasan Obat dan Makanan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk untuk melindungi masyarakat melalui pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Tugas utama BPOM adalah memastikan bahwa produk tersebut aman, berkhasiat, dan bermutu, sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

Sesuai dengan Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang didukung oleh penguatan kelembagaan. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, maka dibentuk struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disahkan dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan BPOM tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut dengan Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.2.1 Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputy Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA memiliki tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. Sedangkan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah melakukan:

1. Penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

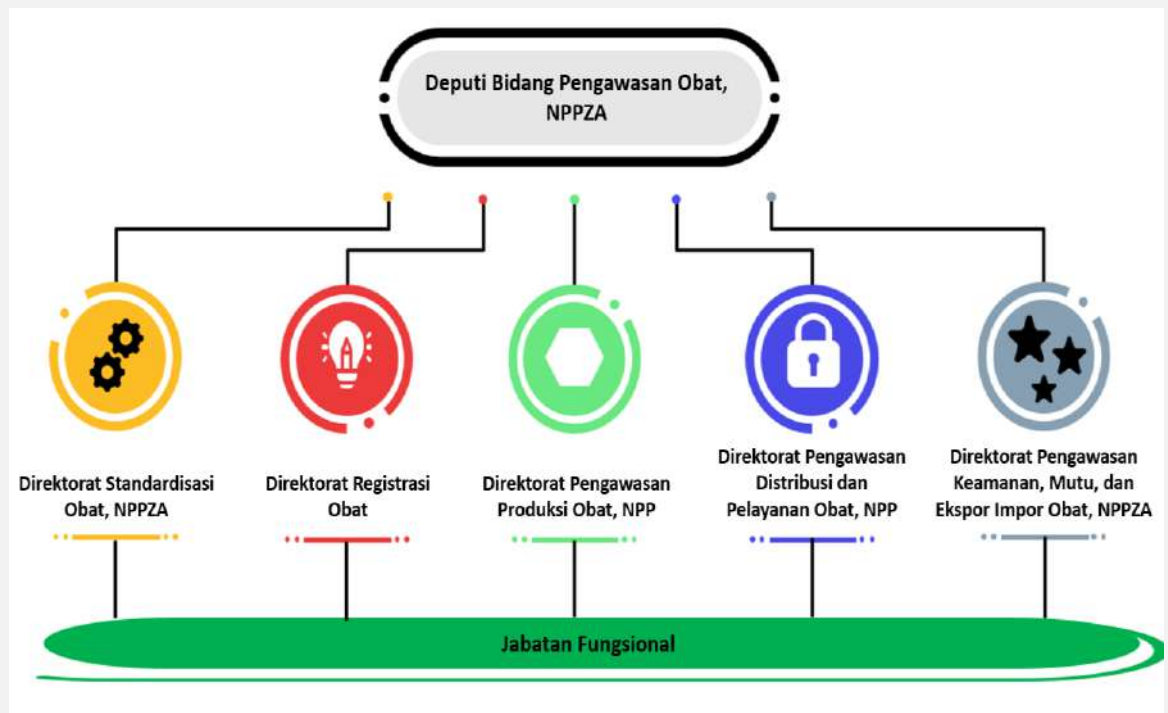
Dilihat dari fungsi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar unit Eselon I Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA:

1. Pengawasan Obat sebelum beredar di masyarakat (*pre-market*) yang mencakup perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, dan peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat selama beredar di masyarakat (*post-market*) yang mencakup pengawasan produk yang meliputi pengambilan sampel dan pengujian, pengawasan sarana mulai dari pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan obat di seluruh Indonesia serta pengawasan penandaan serta pelaksanaan farmakovigilans; dan

3. Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat.

1.3 Struktur Organisasi

Berikut ini merupakan struktur organisasi Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA terdiri dari 5 (lima) Direktorat, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

i) Direktorat Standardisasi ONPPZA



TUGAS

Penyiapan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.



FUNGSI

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan
6. Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

ii) Direktorat Registrasi Obat



TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi obat.



FUNGSI

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

iii) Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.



FUNGSI



1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus; dan
6. Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

iv) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor



TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

FUNGSI



1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus; dan
6. Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

v) **Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif**

TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.



FUNGSI

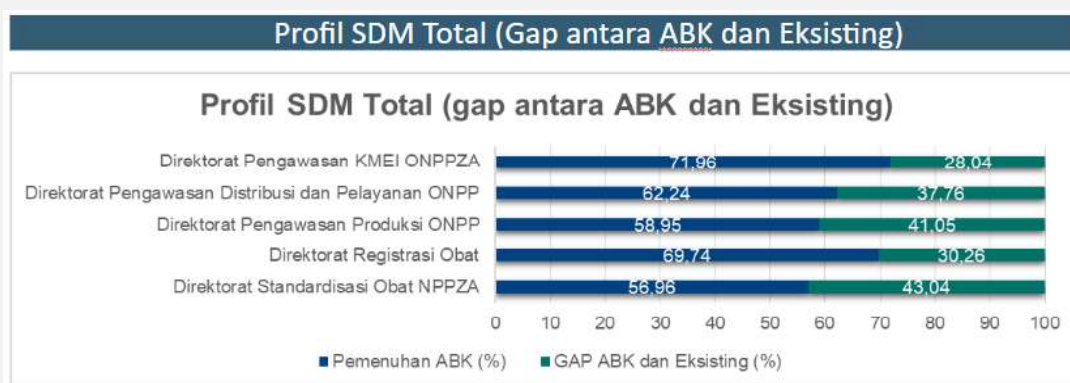


1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif; dan
6. Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

1.4 Profil SDM Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai sehingga tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. SDM yang mencukupi kebutuhan beban kerja dan berkompeten, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang sesuai akan mampu menjalankan tugas dengan efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Profil SDM di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 1. 2 Profil SDM Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA

Dari gambar 7.1 tersebut dapat dilihat bahwa,

- a. Profil SDM total unit kedeputian bidang pengawasan Obat NPPZA:
 - Rata-rata Pemenuhan ABK di Unit Kedeputan 1 adalah 63,97%. Unit dengan pemenuhan ABK terbesar adalah Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA sebesar 71,96 dan yang terendah adalah Direktorat Standardisasi Obat NPPZA yaitu 56,96.
 - Rata-rata GAP ABK di Unit Kedeputan 1 adalah 36,03%.
- b. Profil SDM Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM)
 - Rata-rata Pemenuhan PFM di Unit Kedeputan Bidang Obat NPPZA adalah 63,31%
 - Rata-rata GAP ABK di Unit Kedeputan 1 adalah 36,69%
 - Unit kerja dengan pemenuhan PFM terbesar adalah Direktorat Registrasi Obat sebesar 72,87% dan yang terkecil adalah Direktorat Pengawasan Produksi ONPP 53,25%
- c. Profil SDM Jabatan Fungsional NonPFM
 - Rata-rata Pemenuhan nonPFM di Unit Kedeputan 1 adalah 72,75%
 - Rata-rata GAP NonPFM di Unit Kedeputan 1 adalah 27,25%
 - Unit kerja dengan pemenuhan NonPFM terbesar adalah Direktorat Registrasi Obat sebesar 84,62 dan yang tekecil adalah Direktorat Standar Obat NPPZA 47,62%

1.5 Isu Strategis

Dalam tahun 2024, dalam mewujudkan obat dan makanan aman, terdapat beberapa isu strategis atau tantangan yang dihadapi saat ini yaitu:

1. Integritas rantai suplai obat dan bahan obat serta peredaran obat *substandard, falsified* dan *illegal*.

Integritas rantai suplai obat dan bahan obat serta peredaran obat *substandard, falsified* (palsu), dan *illegal* menjadi isu strategis karena berdampak sangat signifikan terhadap berbagai aspek, seperti kesehatan masyarakat, kepercayaan publik, ekonomi, dan keberlanjutan industri farmasi.

Dampak langsung yang dapat dirasakan pada kesehatan masyarakat, antara lain Obat Substandard dan Falsified, Obat yang tidak memenuhi standar atau palsu dapat menyebabkan kegagalan terapi, efek samping yang berbahaya, atau bahkan kematian. Hal ini langsung mengancam kesehatan dan keselamatan pasien. Resistensi Antimikroba (AMR) yang diakibatkan oleh Obat palsu yang mengandung bahan aktif dalam dosis yang salah atau tidak mengandung bahan aktif yang menjadi ancaman kesehatan global

2. *E-commerce* di bidang obat

Perkembangan E-commerce, meskipun memberikan kemudahan bagi konsumen, praktik ini juga memiliki berbagai tantangan dan risiko yang signifikan, terutama terkait keamanan, kualitas, dan legalitas obat. Platform daring sering kali menjadi saluran peredaran obat palsu dan substandard yang sulit terdeteksi. Banyak situs atau aplikasi yang beroperasi tanpa lisensi resmi, sehingga menjual obat tanpa pengawasan dari otoritas kesehatan.

3. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku obat

Hal ini menjadi isu yang cukup signifikan dalam sistem kesehatan diantaranya pada saat pandemi COVID-19 yang lalu dimana pasokan bahan baku terhambat, yang berdampak pada produksi obat dalam negeri. Selain itu, kenaikan harga bahan baku obat di pasar global dapat mempengaruhi harga obat di dalam negeri, yang berpotensi menyebabkan inflasi harga obat. Ketergantungan yang tinggi pada impor membuat harga obat lebih tidak stabil. Hal tersebut juga berdampak terhadap kemandirian industri farmasi.

Untuk mengurangi ketergantungan ini, Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, NPPZA berupaya memperkuat sektor industri farmasi domestik yang melakukan riset untuk mengembangkan bahan baku obat lokal, serta menciptakan kebijakan yang mendukung kemandirian dalam produksi bahan baku obat. Upaya tersebut dapat mengurangi risiko ketergantungan yang tinggi terhadap impor dan meningkatkan ketahanan sektor kesehatan dalam negeri.

4. Perubahan demografi dan epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, NPPZA. Dinamika populasi, termasuk penambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi, dan pergeseran pola penyakit, secara signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk obat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ancaman ini menggarisbawahi tantangan bagi Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam menyesuaikan prioritas pengawasan dan regulasi untuk menjawab kebutuhan yang berubah-ubah tersebut.

Kebutuhan untuk pengawasan dan kebutuhan regulasi produk baru atau yang sudah ada menjadi lebih kompleks seiring dengan pergeseran kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan epidemiologi, seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali, menuntut respons yang cepat dan adaptif untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat NPPZA tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

5. Ancaman Bioterrorisme

Ancaman bioterrorisme, yang mencakup risiko penggunaan produk obat sebagai medium untuk aksi bioterrorisme, merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh Kedeputian Bidang Pengawasan Obat NPPZA. Ancaman ini menggarisbawahi perlunya sistem pengawasan dan deteksi yang canggih dan efektif untuk mengidentifikasi serta mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan kesehatan masyarakat. Bioterrorisme dapat mengancam tidak hanya kesehatan individu melalui paparan terhadap agen patogenik, tetapi

juga dapat menimbulkan kepanikan dan ketidakpercayaan publik terhadap keamanan pasokan obat-obatan.

Dalam menghadapi ancaman ini, BPOM dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat kerangka kerja regulasi dan pengawasan, termasuk pengembangan kemampuan laboratorium untuk pengujian patogen secara cepat dan akurat. Ancaman bioterorisme membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kerjasama internasional untuk pertukaran informasi dan praktek terbaik dalam deteksi dini dan respons terhadap ancaman.

Keterbatasan dalam teknologi deteksi dan sistem pemantauan yang ada dapat meningkatkan kerentanan terhadap aksi bioterorisme, menuntut peningkatan investasi dalam teknologi pengawasan dan pengembangan protokol respons yang efektif. Tanpa pengawasan yang adekuat, risiko bioterorisme dapat mengancam integritas sistem kesehatan publik dan kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk obat.

6. Penyalahgunaan obat-obat tertentu

Penyalahgunaan obat-obatan tertentu, termasuk ketamin, telah menjadi isu serius yang berdampak luas pada kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan keamanan negara. Ketamin, yang awalnya digunakan sebagai obat anestesi dalam dunia medis dan hewan, kini sering disalahgunakan sebagai zat psikoaktif. Fenomena ini memunculkan tantangan besar bagi BPOM dan instansi terkait, dalam mengatur dan mengendalikan distribusi serta penggunaannya.

7. Pengendalian resistensi antimikroba

Resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) telah menjadi salah satu ancaman kesehatan global paling serius yang dihadapi masyarakat dunia, termasuk Indonesia. AMR terjadi ketika mikroorganisme, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, mengembangkan kemampuan untuk melawan efek obat antimikroba, termasuk antibiotik, antivirals, antifungals, dan antiparasit. Akibatnya, pengobatan menjadi kurang efektif, infeksi sulit disembuhkan, dan risiko komplikasi meningkat. Penyebab utama resistensi antimikroba seperti penggunaan antimikroba yang tidak tepat, Penggunaan antibiotik tanpa resep atau dalam dosis yang tidak sesuai, penggunaan

antimikroba pada infeksi yang sebenarnya tidak membutuhkan obat ini. Overpreskripsi oleh tenaga kesehatan, memberikan antibiotik tanpa indikasi medis yang jelas karena tekanan dari pasien atau kurangnya edukasi. Penggunaan antimikroba pada peternakan dan pertanian, dimana antibiotik digunakan secara berlebihan untuk meningkatkan pertumbuhan hewan atau mencegah penyakit di peternakan, serta kurangnya kesadaran masyarakat yang rendah tentang penggunaan antimikroba dan konsekuensinya terhadap resistensi.

8. Perlu segera dibuat aturan pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan berupa PP No. 28 Tahun 2024 dan turunannya, termasuk regulasi farmakovigilans dan obat ATMPs.

Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 menjadi landasan penting dalam pembaruan sistem kesehatan di Indonesia. Untuk mengoperasionalkan amanat undang-undang tersebut, dibutuhkan aturan pelaksana yang lebih rinci, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan regulasi turunannya. Salah satu aspek krusial yang harus diatur segera adalah farmakovigilans dan regulasi terkait Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs), mengingat perkembangan pesat di sektor farmasi dan bioteknologi.

9. Penyiapan proses *assessment* WLA dan *reassessment* PIC/S

WLA merupakan kerangka kerja (framework) yang dikembangkan sebagai respons atas permintaan negara anggota dalam mengembangkan jalur yang transparan dan berbasis bukti bagi otoritas regulatori yang bekerja pada level kinerja tinggi. PIC/S ini adalah organisasi kerja sama Regulatory Authorities terkait dengan Good Manufacturing Practices (GMP) terkait produk obat untuk penggunaan manusia atau hewan.

Pengakuan internasional terhadap regulator farmasi nasional melalui World Health Organization Listed Authority (WLA) dan keanggotaan dalam Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) menjadi tonggak penting dalam memastikan bahwa sistem pengawasan obat yang diterapkan di Badan POM setara dengan praktik global. Kedua pengakuan ini membutuhkan proses penilaian (*assessment*) yang menyeluruh, mencakup berbagai aspek kapasitas dan kapabilitas regulator.

Penyiapan proses assessment WLA dan reassessment PIC/S adalah langkah strategis untuk memperkuat posisi regulator farmasi nasional di kancah internasional. Persiapan yang matang, komprehensif, dan berbasis data menjadi kunci sukses dalam mencapai pengakuan global. Dengan mengikuti standar internasional, regulator tidak hanya meningkatkan kepercayaan internasional akan kualitas obat di Indonesia, tetapi juga memastikan akses masyarakat terhadap obat-obatan yang aman, bermutu, dan efektif.

10. Pengawasan obat inovatif, termasuk radiofarmaka

Pengawasan obat inovatif merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas obat-obatan modern yang terus berkembang. Obat inovatif mencakup produk yang dikembangkan dengan teknologi canggih, termasuk bioteknologi, terapi gen, terapi seluler, hingga radiofarmaka, yang memberikan solusi medis baru untuk penyakit yang sebelumnya sulit ditangani.

Radiofarmaka merupakan jenis obat yang mengandung senyawa radioaktif, digunakan terutama untuk diagnosis dan terapi dalam bidang kedokteran nuklir. Dalam diagnosis, radiofarmaka memungkinkan pencitraan organ atau deteksi penyakit dengan akurasi tinggi, seperti kanker, gangguan kardiovaskular, atau penyakit neurologis. Dalam terapi, radiofarmaka digunakan untuk mengobati kondisi seperti kanker dengan menghancurkan sel-sel ganas secara selektif.

Namun, karakteristik unik radiofarmaka memerlukan pendekatan pengawasan yang berbeda dibandingkan obat konvensional. Faktor seperti stabilitas isotop, paparan radiasi, dan metode produksi yang kompleks menjadikan pengawasan radiofarmaka sangat kritis.



BAB II:

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebagai unit Eselon I Badan POM, telah menyusun Renstra tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Renstra Badan POM 2020-2024. Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA telah melakukan reviu terhadap Renstra tahun 2020-2024 sesuai dengan SK No. PR.01.02.3.32.12.21.28 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tanggal 13 Desember 2021.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM, maka Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA menetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Badan POM tahun 2020-2024. Visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis.

Tabel 2. 1 Visi, Misi, Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Visi	Misi	Sasaran Program	Indikator Kinerja
Obat aman, bermutu, dan	1. Meningkatkan efektivitas		1) Indeks Pengawasan Obat

Visi	Misi	Sasaran Program	Indikator Kinerja
berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	pengawasan Obat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 2. Membangun SDM Unggul terkait obat dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 3. Memfasilitasi percepatan Pengembangan dunia usaha Obat dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih,	1. Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu	2) Persentase Obat Yang memenuhi syarat
		2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau	1) Indeks Kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat
			2) Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap keamanan dan mutu obat
			3) Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan
		3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat	1) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat
			2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat
			3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Obat
		4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat
		5. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan	1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang

Visi	Misi	Sasaran Program	Indikator Kinerja
	efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat.	Publik di Bidang Obat	ditindaklanjuti oleh lintas sektor
			2) Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
			3) Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu
			4) Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat
			5) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		6. Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> dalam Pengembangan Obat	Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar
		7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang dan Kerja Sama Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Optimal	1) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
			2) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
		8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Visi	Misi	Sasaran Program	Indikator Kinerja
		9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
		10. Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA secara Akuntabel	1) Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
			2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat.
2. Meningkatnya kapasitas SDM Pengawasan Obat.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing dan kemandirian Industri Obat Nasional.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat.
6. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024, yang akan dilaksanakan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA melalui berbagai kegiatan per tahun. Perencanaan kinerja tersebut didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*) 2024. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 ditetapkan target kinerja tahunan tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen penuh bagi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam tahun 2024 sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahunan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu	1) Indeks Pengawasan Obat	94,75
		2) Persentase Obat Yang memenuhi syarat	97
2.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau	1) Indeks Kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat	91
		2) Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat yang Aman dan Bermutu	86
		3) Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan	50
3.	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat	1) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat	89
		2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat	86
		3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	90
4.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	87,4

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
5.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat	1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	81
		2) Indeks pelayanan publik di bidang Obat	4,55
		3) Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu	88
		4) Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	96,33
		5) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
6.	Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> dalam Pengembangan Obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	92
7.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang dan Kerja Sama Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Optimal	1) Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	91,5
		2) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	87,2
8.	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	84,77
9.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	3
10.	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	93,6

2. 3 Perjanjian Kinerja (PK)

Wujud nyata komitmen Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja sebagai dokumen kinerja yang memuat janji kinerja antara pemimpin unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM, sebagai bentuk *continuous improvement*, telah dilakukan reviu tahunan terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, sebagai dasar penetapan PK dan RAPK.

Tabel 2. 3 Matriks Reviu Indikator

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	Justifikasi
1.	Indeks Pengawasan Obat	89,16	91,35	94,75	94,75	Tidak dilakukan perubahan target karena diperkirakan dapat mencapai target 2024.
2.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	98,12%	97,22%	97%	97,3%	Terdapat perubahan target tahun 2024 sesuai dengan rekomendasi hasil reviu dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan mempertimbangkan realisasi di akhir tahun 2023 sebesar 97,22% maka target di tahun 2024 menjadi 97,3%
3.	Indeks Kepatuhan (<i>Compliance index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat	89,41	82,71	91	91	Tidak dilakukan perubahan target karena diperkirakan dapat mencapai target 2024.
4.	Indeks Kesadaran (<i>Awareness index</i>) Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	84,2	87,12	86	87,5	Mengikuti hasil reviu unit pengampu (Pusat Analisis Kebijakan Obat & Makanan)

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	Justifikasi
5.	Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan	54,37	55,16	50	55,2	Terdapat perubahan target tahun 2024 sesuai dengan rekomendasi hasil revidi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan mempertimbangkan realisasi di akhir tahun 2023 sebesar 55,16 maka target di tahun 2024 menjadi 55,2
6.	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat	93,2	96,3	89	96,5	Mengikuti hasil revidi unit pengampu (Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan)
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat	77,24	81,19	86	86	Tidak dilakukan perubahan target karena diperkirakan dapat mencapai target 2024.
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	89,04	90,03	90	92	Mengikuti hasil revidi unit pengampu (Biro Hukum dan Organisasi)
9.	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	83,43	93,79	87,4	93,79	Terdapat penyesuaian target dengan mempertimbangkan realisasi akhir tahun 2023 serta tidak adanya pengukuran IKK pada tahun 2024 maka target 2024 ditetapkan sesuai realisasi 2023 yaitu 93,79
10.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,63%	96,28%	91%	98%	Berdasarkan hasil analisis trend realisasi indikator tersebut tahun 2020 s.d tahun 2023, dengan menggunakan metode

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	Justifikasi
						Regresi Linier, diketahui bahwa prediksi nilai realisasi indikator tersebut pada tahun 2024 adalah 98,31 sehingga diperlukan perubahan target.
11.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	76,74%	81,77%	81%	82%	Mengikuti hasil revidu unit pengampu (Biro Perencanaan dan Keuangan)
12.	Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu	86,68%	92,05%	88%	92,1%	Terdapat perubahan target tahun 2024 sesuai dengan rekomendasi hasil revidu dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan mempertimbangkan realisasi di akhir tahun 2023 sebesar 92,05% maka target di tahun 2024 menjadi 92,1%
13.	Indeks pelayanan publik di Bidang Obat	4,53	4,67	4,55	4,7	Mengikuti hasil revidu unit pengampu (Biro Hukum dan Organisasi)
14.	Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	93,8	93,07	96,33	93,9	Mengikuti hasil revidu unit pengampu (Biro Hukum dan Organisasi)
15.	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	86,11%	89,07%	92%	92%	Tidak dilakukan perubahan target karena diperkirakan dapat mencapai target 2024
16.	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	92,4	92,18	91,5	93,19	Mengikuti hasil revidu unit pengampu (Inspektorat Utama)
17.	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	79,55	80,69	87,2	81,94	Mengikuti hasil revidu unit pengampu (Inspektorat Utama)

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	Justifikasi
18.	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	86,69	91,19	84,77	90,90	Mengikuti hasil revidi unit pengampu (Biro Sumber Daya Manusia)
19.	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Baik	2,7	2,7	3	3	Tidak dilakukan perubahan target karena diperkirakan dapat mencapai target 2024
20.	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	93,26	91,58	93,6	93,06	Mengikuti hasil revidi unit pengampu (Biro Perencanaan dan Keuangan). Dasar perhitungan tidak saja mengacu satu tahun terakhir, tapi beberapa tahun terakhir, karena adanya fluktuatif realisasi.
21.	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Indikator Baru	Indikator Baru	Indikator Baru	95,18	Target mengacu pada hasil <i>exercise</i> unit pengampu (Biro Umum)
22.	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Indikator Baru	Indikator Baru	Indikator Baru	81,41	Target mengacu pada hasil <i>exercise</i> unit pengampu (Biro Umum)
23.	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Indikator Baru	Indikator Baru	Indikator Baru	90	Target mengacu pada hasil <i>exercise</i> unit pengampu (Biro Umum)
24.	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	Indikator Baru	Indikator Baru	Indikator Baru	60%	Target mengacu pada hasil <i>exercise</i> unit pengampu (Biro Umum)

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 2024 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi Pengukuran
<i>Stakeholder Perspective</i>			
Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu	1) Indeks Pengawasan Obat	94,75	Tahunan
	2) Persentase Obat Yang memenuhi syarat	97,3%	Bulanan
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau	1) Indeks Kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat	91	Tahunan
	2) Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat yang Aman dan Bermutu	87,5	Tahunan
	3) Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan	55,2	Tahunan
Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat	1) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat	96,5	Tahunan
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat	86	Tahunan
	3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	92	Tahunan
<i>Internal Process Perspective</i>			
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	93,79	Tahunan
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat	1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82%	Bulanan
	2) Indeks pelayanan publik di bidang Obat	4,7	Tahunan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi Pengukuran
	3) Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu	92,1%	Bulanan
	4) Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	93,9	Bulanan
	5) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98%	Bulanan
Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> dalam Pengembangan Obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	92%	Bulanan
<i>Learning and Growth Perspective</i>			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang dan Kerja Sama Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Optimal	1) Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	93,19	Tahunan
	2) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	81,94	Tahunan
	3) Nilai Pengelolaan Kearsipan	95,18	Tahunan
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	90,90	Tahunan
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	3	Tahunan
Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA secara Akuntabel	1) Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	93,06	Tahunan
	2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81,41	Tahunan
	3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	90	Tahunan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi Pengukuran
	4) Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60%	Tahunan

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detail aktivitas pendukung. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2024 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2024

No	Indikator	Target												Anggaran
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Indeks Pengawasan Obat												94,75	466.419.000,00
2	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat		97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	6.079.172.000,00
3	Indeks Kepatuhan (<i>Compliance index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat												91	1.698.885.600,00
4	Indeks Kesadaran (<i>Awareness index</i>) Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu												87,5	850.715.000,00
5	Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan												55,2	814.890.000,00

No	Indikator	Target												Anggaran
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
6	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat												96,5	604.780.000,00
7	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat												86	1.748.650.000,00
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif												92	969.510.000,00
9	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat												93,79	4.675.245.000,00
10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	6.502.853.800,00
11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	4.091.990.600,00
12	Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	3.285.802.000,00
13	Indeks pelayanan publik di Bidang Obat												4,7	1.845.715.662,00

No	Indikator	Target												Anggaran
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
14	Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat			93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	3.121.170.000,00
15	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar			92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	3.512.967.000,00
16	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,19	3.564.482.900,00
17	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,94	1.370.553.000,00
18	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,18	818.361.198,00
19	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,90	1.1554.697.000,00
20	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Baik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	615.594.700,00
21	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,		20	20	20	35	40	45	50	60	70	90	93,06	4.484.019.540,00

No	Indikator	Target												Anggaran
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	Psikotropika dan Zat Adiktif													
22	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa												81,41	375.000.000,00
23	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara												90	375.000.000,00
24	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri												60	375.000.000,00
TOTAL														Rp 54.465.781.000

2.5. Metode Pengukuran

2.5.1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diukur berdasarkan Pedoman yang pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM, berikut ini adalah cara pengukuran indikator kinerja tersebut:

1. Indeks Pengawasan Obat (IPO)

- Indeks Pengawasan Obat (IPO) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat yang dilakukan oleh Kedeputan I.
- Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan/efektivitas kinerja pengawasan Obat, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan di tiap daerah, maupun secara nasional.
- IPO menggunakan indikator pembentuk yang berasal dari hasil kinerja teknis Kedeputan 1 dan 4 serta UPT BPOM. Indikator pembentuk yang digunakan bersifat komprehensif menggambarkan kinerja Kedeputan 1, meliputi

indikator yang mengukur/menggambarkan kualitas kebijakan, kualitas produk beredar, kepatuhan pelaku usaha, kesadaran dan kepuasan masyarakat, tindak lanjut hasil pengawasan oleh lintas sektor, kualitas penindakan kejahatan, kualitas layanan publik Kedeputan 1 serta kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian pembinaan yang dilakukan.

- d. Pembobotan indikator kinerja pembentuk Indeks Pengawasan Obat ditetapkan menggunakan *expert judgement* dimana indikator yang bersifat dampak memiliki bobot 45% sedangkan yang bersifat proses (menggunakan sumberdaya yang besar) memiliki bobot 55%.
- e. Cara perhitungan dan formula:
Dihitung dari penjumlahan seluruh indeks indikator pembentuk. Indeks indikator pembentuk dihitung dengan mengalikan Bobot Indikator (%) dengan persen realisasi indikator.
- f. Periode pelaporan IPO adalah tahunan.

2. Persentase obat yang memenuhi syarat

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor.
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang di sampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kedaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1) atau c.2) atau c.3), maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4)), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.
- h. Cara perhitungan dan formula:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%:$$

Keterangan:

- 1) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- 2) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- 3) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh:

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1 + B2 + B3)}{\text{Total penyebut } (B1 + B2 + B3)} \times 100\%$$

- i. Periode pelaporan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah bulanan.

3. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat

- a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat *profit/non-profit* sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat.
- b. Pelaku usaha obat mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat
- c. Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa variabel, yaitu:
 - 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan (GMP);

- 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan (GDP);
 - 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan Obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan;
 - 4) Hasil pemeriksaan penandaan dan iklan Obat yang memenuhi ketentuan;
- d. Cara Perhitungan Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang memenuhi ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (baik), B (cukup), dan C (kurang) berdasarkan Definisi Operasional (DO) oleh kedeputian 1. Selanjutnya, dihitung persentase memenuhi ketentuan (% MK) masing-masing grading untuk dianalisis secara statistik (*Top one box/Top two boxes*). *Top one box* adalah $(A/\text{total} \times 100)$ dan *Top two boxes* adalah $(A+B/\text{total} \times 100)$..
- f. Perhitungan indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dilanjutkan dengan menggunakan skala pembobotan sarana produksi, distribusi, iklan dan penandaan serta skala pembobotan komoditi yaitu obat.
- g. Hasil bobot sarana dan komoditi Obat diperoleh dari pengisian kuesioner (*expert choice*) dan dianalisis dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.
- h. Kriteria Indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Rentang Nilai Kriteria Indeks kepatuhan pelaku usaha Obat

NO	Nilai	Kriteria
1	> 90 -100	Sangat Baik
2	> 66,67- 90	Baik
3	> 33,33-66,67	Cukup
4	0 – 33,33	Kurang

- i. Periode pelaporan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat adalah tahunan.

4. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat yang Aman dan Bermutu.

- a) Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat yang aman dan bermutu.
- b) Masyarakat adalah konsumen obat yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan Kedeputian I. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.
- c) Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:
 - 1) Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
 - 2) Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat yang aman dan bermutu.
 - 3) Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dengan baik.
- d) *Awareness index* diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling*.
- e) Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi.

$$\text{Indeks Nasional} = \sum \left[\sum (\underline{R}_a \times b) \times c \right]$$

Keterangan:

$\underline{R}_a$ adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a).

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat

- f) Periode pelaporan Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat yang Aman dan Bermutu adalah tahunan.

5. Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan

Indeks Kepatuhan industri rokok dalam memenuhi ketentuan Iklan dan Label Produk Tembakau dihitung dari:

- kepatuhan industri rokok yang telah melaporkan hasil pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar dan contoh kemasan terkait pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan..
- kepatuhan industri rokok dalam mengimplementasikan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada iklan dan kemasan.
- Indeks tersebut dihitung terhadap Jumlah industri rokok jenis kretek tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin, klobot, klembak menyan, cerutu dan tembakau iris.
- Cara Perhitungan dan Formula:

$$P = \frac{1}{4} \times \left[\left(\frac{\sum Pn_1}{\sum Po_1} \times 100 \right) + \left(\frac{\sum Pn_2}{\sum Po_2} \times 100 \right) + \left(\frac{\sum Pn_3}{\sum Po_3} \times 100 \right) + \left(\frac{\sum Pn_4}{\sum Po_4} \times 100 \right) \right]$$

Keterangan:

- Pn_1 = Industri yang melaporkan kadar nikotin dan tar
 Po_1 = Industri rokok jenis kretek tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin
 Pn_2 = Industri yang melaporkan contoh kemasan
 Po_2 = Industri rokok jenis kretek tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin, klobot, klembak menyan, cerutu dan tembakau iris
 Pn_3 = Jumlah label produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan
 Po_3 = Jumlah label produk tembakau yang diawasi
 Pn_4 = Jumlah iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan
 Po_4 = Jumlah iklan produk tembakau yang diawasi

- Periode pelaporan Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan adalah tahunan.

6. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat

- a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari Kedeputan I dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.
- b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan Kedeputan I kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk-bentuk seperti *desk*, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.
- c. Pelaku usaha Obat mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya
- d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) aspek yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.
- e. Survei dilakukan secara *online* dengan memberikan *link survey* saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Kedeputan I. Rumus penghitungan indeks:

$$Indeks Nasional = \sum \left(\sum (\hat{E}_{jk} \times b) \times c \right)$$

Keterangan:

$\hat{E}_{jk}$ adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, *desk*, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat

Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:

- Aspek kepuasan: *Tangible* (0,16), *reliability* (0,30), *Responsiveness* (0,20), *Assurance* (0,17), dan *Empathy* (0,17)

- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), *Desk* (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110)
 - Komoditi: Obat (0,233)
- f. Periode pelaporan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat adalah tahunan.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat yang dilakukan oleh Kedeputian I dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat.
- b. Masyarakat adalah konsumen obat yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan Kedeputian I. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17–65 tahun
- c. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality (ServQual)* yaitu *Reliability*, *Assurance*, *Empathy*, dan *Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat meliputi:
 - 1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan Kedeputian I terhadap produk Obat, misal pengecekan produk kedaluwarsa.
 - 2) Kemampuan Kedeputian I dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat.
 - 3) Pemastian yang diberikan oleh Kedeputian I terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat yang beredar di pasaran.
 - 4) Tindakan Kedeputian I atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.
- d. Indeks ini diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling*.

- e. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap Obat. Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut:

$$Indeks\ Nasional = \sum \left[\sum (\underline{R_a} \times b) \times c \right]$$

Keterangan:

$\underline{R_a}$ adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a)

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat

- f. Periode pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat adalah tahunan.

8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

- Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat
- Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
- Target dinyatakan dalam angka.

- f. Cara Perhitungan Indeks kepuasan pelayanan adalah Menghitung nilai terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
- g. Periode pelaporan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif adalah tahunan.

9. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat

- a. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga yang nantinya juga berguna sebagai acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analisis Kebijakan di Lingkungan Kementerian/ Lembaga.
- b. Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Obat.
- c. Pemilihan kebijakan berdasarkan *random sampling*, dengan jumlah minimal kebijakan yang dapat dinilai untuk menggambarkan kualitas kebijakan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kebijakan telah diimplementasikan minimal selama 2 tahun
 - 2) Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut menjadi populasi untuk menentukan jumlah sampel kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut:

$$n = \sqrt{N} + 1$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel kebijakan yang dinilai

N = Jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran

- d. Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari:
 - 1) Perencanaan Kebijakan (45%) yang dibentuk melalui tahapan Agenda Setting (45%) dan Formulasi Kebijakan (55%)
 - 2) Evaluasi Kemanfaatan Kebijaksanaan (55%) yang dibentuk melalui tahapan Implementasi Kebijakan (50%) dan Evaluasi Kebijakan (50%)

- e. Pengukuran IKK dilakukan 2 tahun sekali oleh tim pelaksana pengukuran kualitas kebijakan LAN dengan hasil berupa Berita Acara Hasil Validasi Penilaian Mandiri Pengukuran IKK
- f. Apabila terdapat kondisi tertentu yang terjadi diluar ketentuan pada poin e, antara lain:

- 1) Untuk tahun dimana tidak dilakukan pengukuran oleh LAN
- 2) Pada saat pengukuran, peraturan yang disampling tidak mewakili seluruh komoditi/kedeputian

Maka untuk kondisi tersebut akan dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dengan menggunakan instrumen yang sama oleh tim BPOM yang kemudian dilakukan validasi oleh LAN dalam bentuk Surat Penyampaian Hasil IKK yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan LAN. Hasil validasi tersebut, dapat digunakan sebagai realisasi tahunan.

- g. Cara Perhitungan dan Formula

Berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh LAN. Kriteria yang digunakan adalah:

Tabel 2. 7 Kategori Kriteria Pengukuran IKK

No	Nilai	Kategori
1	91,00-100	Unggul
2	80 – 90,99	Sangat Baik
3	65 – 79,99	Baik
4	50 – 64,99	Cukup
5	< 50,00	Kurang

- h. Periode pelaporan IKK adalah tahunan.

10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Kedeputian I melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat.

- b. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen
- c. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari lintas sektor terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat.
- d. Lintas sektor meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat.
- e. Cara Perhitungan dilakukan dengan Menghitung total tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan keputusan/tindak lanjut/rekomendasi yang dikeluarkan dalam satu tahun berjalan

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$$

- f. Periode pelaporan Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor adalah bulanan.

11. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
 - 2) Profesionalisme SDM (18%);
 - 3) Sarana Prasarana (15%);
 - 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
 - 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
 - 6) Inovasi (7%).
- b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- c. IPP Di Bidang Obat diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di Kedeputian I.

- d. Perhitungan indeks ini dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama), dengan kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Periode pelaporan IPP adalah tahunan.

12. Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu

- a. Ketepatan waktu pelayanan publik adalah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan untuk memenuhi salah satu atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik merupakan perbandingan jumlah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang memenuhi waktu dengan jumlah pengajuan pelayanan oleh masyarakat/pelanggan.
- c. Layanan publik meliputi :
 - 1) Registrasi obat
 - 2) Evaluasi pengembangan obat
 - 3) Penilaian sarana produksi obat
 - 4) Penilaian sarana distribusi obat
 - 5) Surat Keterangan Impor Obat
 - 6) Analisa Hasil Pengawasan dalam rangka Ekspor dan Impor narkotika, psikotropika dan prekursor
- d. Ketepatan waktu pelayanan publik dilihat berdasarkan Peraturan Badan POM tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM
- e. Rata-rata dari persentase ketepatan waktu pelayanan publik dari dihitung dari rata-rata pencapaian unit:
 - 1) Direktorat Registrasi Obat,
 - 2) Direktorat Pengawasan Produksi ONPP
 - 3) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP
 - 4) Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, NPPZA

- f. Periode pelaporan Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu adalah bulanan.

13. Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat

- a. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
- b. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:
 - 1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
 - 2) KIE langsung ke masyarakat; dan
 - 3) KIE melalui media sosial
- c. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:
 - 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
 - 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
 - 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
 - 4) Tingkat minat terhadap informasi obat;
- d. *Responden Audiens KIE* adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
- e. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan *online survey*
- f. Cara Perhitungan dan Formula:
Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Kedeputian I melalui berbagai media pada tahun berjalan.
- g. Periode pelaporan Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat adalah tahunan.

14. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.
- b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan *sampling targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel

yang di sampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kedaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1) atau c.2) atau c.3), maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4)), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.
- h. Cara perhitungan dan formula:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%:$$

Keterangan:

- 1) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- 2) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- 3) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh:

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1 + B2 + B3)}{\text{Total penyebut } (B1 + B2 + B3)} \times 100\%$$

- i. Periode pelaporan Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah bulanan.

15. Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar

- a. Inovasi obat adalah hasil penelitian obat siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan dibuat oleh industri atau institusi riset
- b. Pengawasan terhadap Inovasi Obat mencakup pengawalan/ pendampingan terhadap pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi di bidang Obat meliputi:
 - 1) Obat pengembangan baru,
 - 2) Fasilitas Obat inovasi atau obat pengembangan baru
- c. Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar dibentuk dari 2 indikator yaitu:
 - 1) Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat
 - 2) Persentase fasilitas obat inovasi atau obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan terhadap tahapan pemenuhan fasilitas produksi
- d. Cara Perhitungan dan Formula

Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar =

$$\frac{A+B}{2}$$

A = Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat

B = Persentase fasilitas obat inovasi atau obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan terhadap tahapan pemenuhan fasilitas produksi
- e. Periode pelaporan Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah bulanan.

16. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.
- b. Sasaran RB diwujudkan melalui delapan area perubahan:
 - 1) manajemen perubahan;

- 2) penataan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penguatan pengawasan;
 - 4) penataan dan penguatan organisasi ;
 - 5) penataan tata laksana;
 - 6) penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM);
 - 7) penguatan akuntabilitas kinerja; dan
 - 8) penguatan kualitas pelayanan publik.
- c. Evaluasi terhadap pelaksanaan RB K/L dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB dengan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB
- d. Model evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Evaluasi terhadap pelaksanaan RB K/L dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Pengungkit	60%	
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen perubahan (2%) b. Deregulasi kebijakan (2%) c. Penataan Organisasi (3%) d. Penataan tata laksana; (2.5%) e. Penataan manajemen SDM (3%) f. Penguatan akuntabilitas (2.5%) g. Penguatan Pengawasan (2.5%) h. Penguatan kualitas pelayanan publik (2.5%)
	b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%) b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan 1) Barang (1%) c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%) d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%) e. Merit System (1%) f. ASN Profesional (1%) g. Kualitas Perencanaan (1%) h. Maturitas SPIP (1%) i. Kapabilitas APIP (1%) j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen perubahan (3%) b. Deregulasi kebijakan (3%) c. Penataan Organisasi (4.5%) d. Penataan tata laksana; (3.75%) e. Penataan manajemen SDM (4.5%) f. Penguatan akuntabilitas (3.75%) g. Penguatan Pengawasan (3.75%) h. Penguatan kualitas pelayanan publik (3.75%)
2	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%)
	Total	100%	

e. Indeks RB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB Deputi I oleh Kemenpan RB. Rentang Nilai RB terdiri dari:

1. AA (istimewa) : dengan skor > 90 – 100
2. A (memuaskan) : dengan skor > 80 – 90
3. BB (sangat baik) : dengan skor > 70 – 80
4. B (baik, perlu sedikit perbaikan): dengan skor > 60 – 70
5. CC (cukup/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar), dengan skor > 50 – 60
6. C (kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar), dengan skor > 30 – 50
7. D (sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar) dengan skor > 0 – 30

f. Periode pelaporan Indeks RB adalah tahunan.

17. Nilai AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- b. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.
- c. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut :

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

- d. Nilai AKIP diperoleh dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB melalui penjumlahan bobot komponen evaluasi. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:
 - 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
 - 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
 - 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
 - 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70

- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
 - 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
 - 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30
- e. Periode pelaporan nilai AKIP adalah tahunan.

18. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

- a. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
- b. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
- c. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
- d. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
- e. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/Anggaran.
- f. Cara Perhitungan:
Formula perhitungan secara rinci dijelaskan dalam tools pengawasan kearsipan.
- g. Periode pelaporan Nilai pengelolaan kearsipan adalah tahunan.

19. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan PermenPAN RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 - 1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 - 2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 - 3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 - 4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami
- d. Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM.
- e. Pengukuran indeks Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT
Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:
 - 1) kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 - 2) kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 - 3) kinerja memiliki bobot 30 % (tiga puluh persen); dan
 - 4) disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:
 - 1) Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
 - 2) Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
 - 3) Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
 - 4) Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
 - 5) Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.
- f. Periode pelaporan Indeks Profesionalitas ASN adalah tahunan.

20. Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:
 - 1) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - a) Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan Kedeputian I.

- b) Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c) BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat oleh pimpinan
 - d) Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - e) Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan, sesuai data kinerja masing-masing.
- 2) Indeks pemanfaatan sistem informasi Kedeputian I, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email dan dashboard BCC.
- 3) Indeks Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.
- b. Data diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, dimana Indeks Pengelolaan Data dan Informasi merupakan rata-rata dari ketiga komponen indeks tersebut.
 - c. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA merupakan rata-rata Indeks Pengelolaan Data dan Informasi dari 5 Direktorat di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, dengan kriteria sebagai berikut:
 - 2,26 – 3 : Optimal
 - 1,51 – 2,25 : Cukup
 - 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
 - 0 – 0,75 : Sangat Kurang
 - d. Periode pelaporan Indeks pengelolaan data dan informasi adalah tahunan.

21. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Kedeputan I yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- c. Tiga belas (13) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - 1) Revisi DIPA
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA
 - 3) Pengelolaan UP
 - 4) Rekon LPJ Bendahara
 - 5) Data Kontrak
 - 6) Penyelesaian Tagihan
 - 7) Penyerapan Anggaran
 - 8) Retur SP2D
 - 9) Perencanaan Kas (Renkas)
 - 10) Pengembalian/Kesalahan SPM
 - 11) Dispensasi Penyampaian SPM
 - 12) Pagu Minus
 - 13) Konfirmasi Capaian Output
- d. Cara Perhitungan:
$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$
- e. Pada tahun 2024 Penilaian terhadap Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Periode pelaporan NKA adalah tahunan. Cara Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran = $(\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$. Hasil penjumlahan nilai kinerja anggaran dikategorikan :
 - Sangat Baik → lebih dari 90 (sembilan puluh)
 - Baik → lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh)
 - Cukup → lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh)

- Kurang → lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh)
- Sangat kurang → sampai dengan 50 (lima puluh)

Nilai kinerja anggaran untuk belanja Kementerian/Lembaga selain sebagai dasar penggunaan pelaksanaan anggaran juga merupakan dasar pelaksanaan pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi oleh Kementerian Keuangan.

22. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 indikator yaitu:

- a. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%);
- b. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%);
- c. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (e-Purchasing) (Bobot 5%);
- d. Persentase penerapan proses non e-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%);
- e. Persentase E-Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%).
- f. Periode pelaporan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa adalah tahunan.

23. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara

- a. Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.
- b. Cara Perhitungan:
 - 1) Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan.

a.1 Kualitas pelaporan (Bobot 75%)

a.2 Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%).

Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:

- Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
- $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan $\leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)

Ketepatan waktu penyampaian RKBMN. Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut - Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)

- $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
- $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan $\leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)

2) Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: $(\text{Total Nilai Aset yang telah diPSP (SIMAN)}/\text{Total Aset}) \times 100\%$.

3) Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: $\text{nilai total penghapusan yang diusulkan} / \text{total barang rusak berat} \times 100 \%$.

4) Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: $\text{Nilai total pemusnahan yang diusulkan} / \text{total barang usang atau rusak} \times 100 \%$.

c. Periode pelaporan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara adalah tahunan.

24. Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri

- a. Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan:
 - 1) Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang di tagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
 - 2) Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.
- b. Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan Kedeputian I adalah:
 - 1) Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang di tagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).
 - 2) Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).
 - 3) Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%.
 - 4) Periode pelaporan Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri adalah tahunan.

2.5.2. Kriteria Pencapaian Indikator

Pencapaian indikator kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya), dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan memperhatikan perbandingan antara realisasi dan target sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Kriteria Evaluasi Kinerja dengan Memperhatikan Perbandingan Realisasi dan Target

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	
Sangat Baik	$100 < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

2.5.3. Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS:

$$NPSS = \Sigma NP / \Sigma P$$

Ket:

NP : Nilai Perspektif P : Perspektif

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Kriteria NPSS dengan Memperhatikan Perbandingan Realisasi dan Target

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq NPSS \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq NPSS < 90$	
Kurang	$50 \leq NPSS < 70$	
Sangat Kurang	< 50	



BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

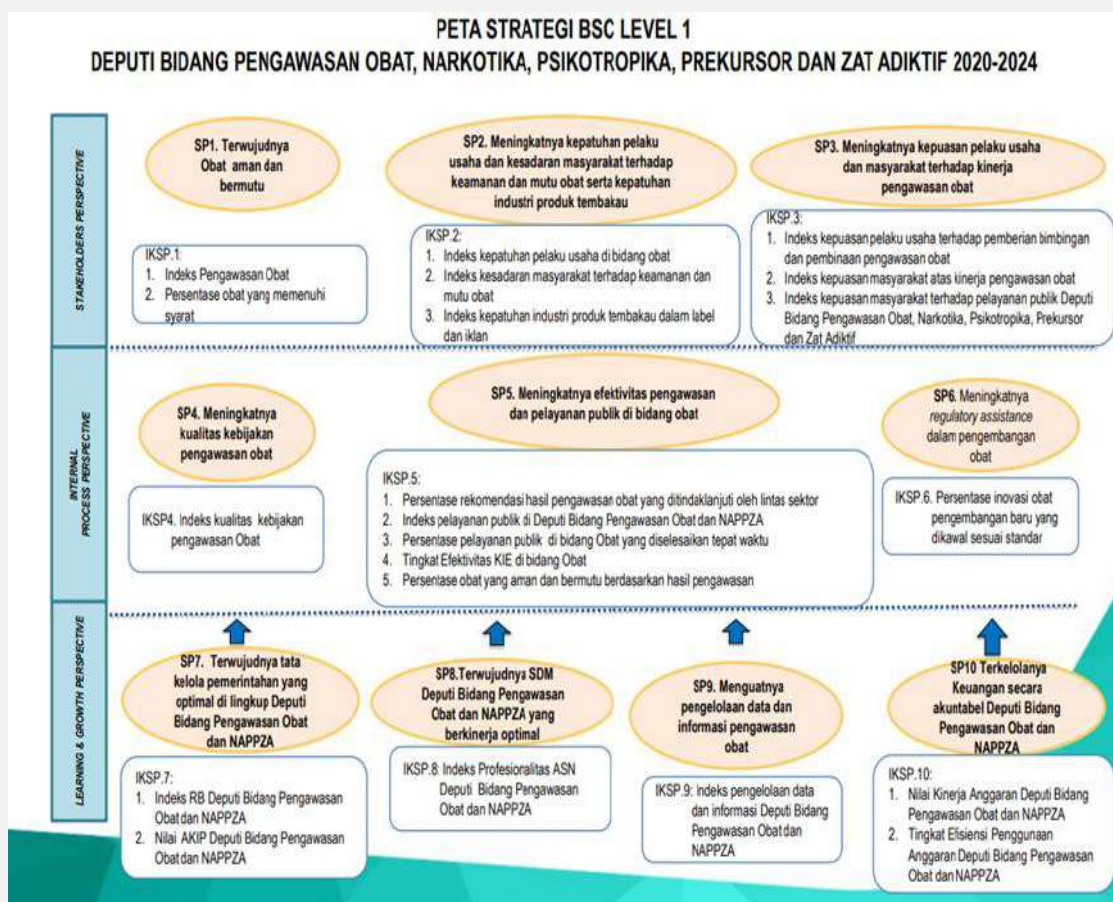
3.1 Capaian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Penilaian pencapaian sasaran strategis penting dilakukan untuk membantu organisasi untuk mengevaluasi, mengidentifikasi efisiensi, efektifitas kegiatan, area keberhasilan dan potensi perbaikan atau penyesuaian dalam strategi demi mencapai tujuan organisasi.

Sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 Capaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diukur secara kuantitatif melalui Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). Komponen nilai NPSS disusun dari pengukuran kinerja untuk masing-masing Indikator Kerja Sasaran Program (IKSP). Pengukuran kinerja masing-masing IKSP dilakukan sesuai dengan definisi operasional yang telah ditetapkan serta dilakukan analisis dengan membandingkan realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya serta terhadap target akhir periode Renstra 2020-2024, dimana analisis dilakukan dengan mengidentifikasi faktor pendukung keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunan kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Gambar berikut ini menunjukkan peta strategi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang memetakan Sasaran Program (SP) yang diturunkan sebagai IKSP kinerja Sasaran

Program (IKSP) yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.



Gambar 3. 1 Peta Strategi Level 1 Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Penilaian capaian sasaran program dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja terhadap target setiap IKSP penyusun pada masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2024. Berikut ini merupakan capaian kinerja ditinjau dari capaian terhadap NPS Sasaran, NPS Perspektif hingga akhirnya dapat diperoleh NPS Total sebagai hasil kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.

3.1.a Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

Berikut ini merupakan pencapaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2024 NPS per Perspektif dan sasaran beserta dengan kategori capaian sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM No. 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM.

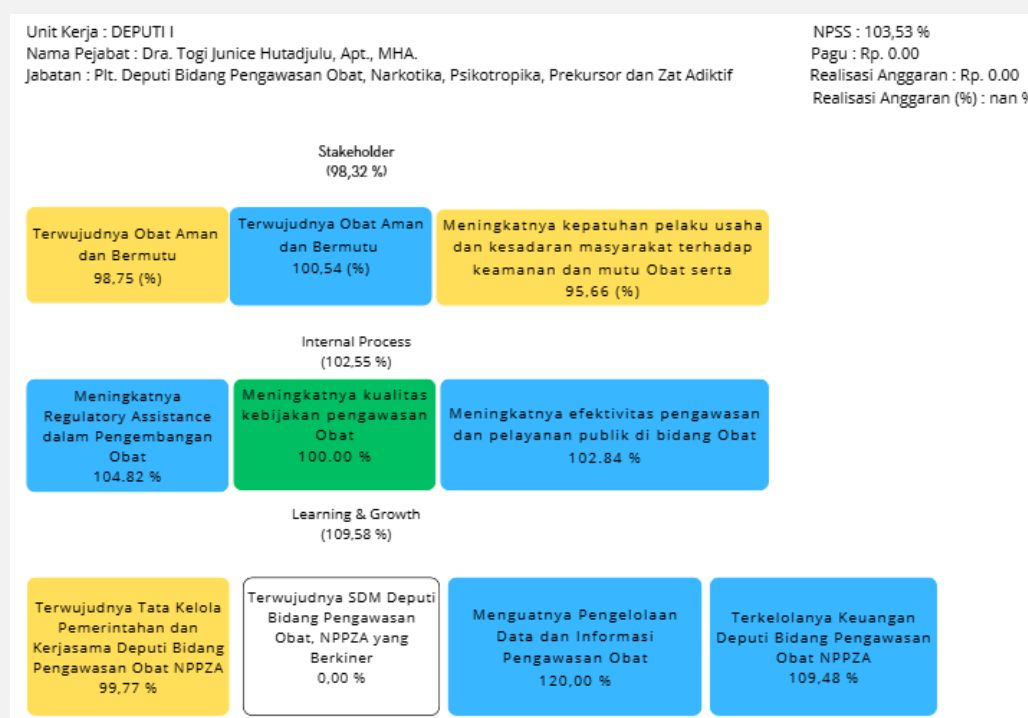
Tabel 3. 1 Pencapaian NPS Perspektif Sasaran terhadap Target Perjanjian Kinerja
Tahun 2024

Perspektif	NPS Sasaran	Capaian IKSP (%)	Kategori	Notifikasi Warna
Stakeholder perspective	SP-16. Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	98,75	Cukup	
	SP-02. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	95,66	Cukup	
	SP-17. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	100,54	Sangat baik	
Internal Process Perspective	SP-07. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	100	Baik	
	SP-10. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	102,74	Sangat baik	
	SP-18. Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat	104,82	Sangat baik	
Learning and Growth Perspective	SP-19. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	99,77	Cukup	
	SP-20. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang berkinerja optimal	0,00	Di <i>exclude</i>	-
	SP-21. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	120	Sangat Baik	
	SP-22. Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	109,48	Sangat Baik	

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 10 NPS Sasaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2024, terdapat 5 NPS Sasaran memperoleh kriteria **SANGAT BAIK** (capaian >100%), 1 NPS Sasaran memperoleh kriteria **BAIK** (capaian=100%), 3 NPS Sasaran memperoleh kriteria **CUKUP** (capaian <100%), dan 1 NPS diexclude untuk penilaian NPSS yaitu sasaran Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Berkinerja optimal.

NPS Perspektif dan NPS Total

NPSS Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA terdiri dari 3 (tiga) perspektif yaitu (1) *stakeholder perspective*; (2) *internal process perspective*; dan (3) *learning and growth perspective*. NPSS Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA pada tahun 2024 untuk masing-masing perspektif tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2 Capaian NPSS tersebut dapat dilihat pada menu dashboard e-performance pada aplikasi SIMETRIS pada link https://simetris.pom.go.id/e_performance/.



Gambar 3. 2 Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2024 dari Aplikasi SIMETRIS

Pada gambar di atas, terlihat nilai capaian sasaran strategis terdiri dari 3 (tiga) perspektif yaitu:

- (1) *Stakeholder* = 98,32 %
- (2) *Internal Process* = 102,55%
- (3) *Learning and Growth* = 109,75%

Berdasarkan Perjanjian kinerja yang memuat janji kinerja antara pemimpin unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran program, IKSP kinerja sasaran program dan target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2024 Deputi 1 melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin. Hasil pengukuran kinerja secara terperinci sesuai dengan Peta Strategi *Balance Scorecard* (BSC) terdapat 24 (dua puluh empat) IKSP Kinerja Kegiatan yang dijabarkan dalam 3 (tiga) perspektif tersebut.

Selanjutnya dari NPSS dari 3 perspektif tersebut dilakukan perhitungan NPS Total tersebut menggunakan rumus berikut:

$$\text{NPS Total} = (\text{NPS Perspektif 1} + \text{NPS Perspektif 2} + \text{NPS Perspektif 3}) / 3$$

Tabel 3. 2 Nilai Pencapaian Sasaran Perspektif dan NPS Total Deputi Bidang pengawasan Obat, NPPZA tahun 2020-2024

Perspektif	Capaian IKSP (%)					Kategori Capaian 2024	Notifikasi Warna
	2020	2021	2022	2023	2024		
<i>Stakeholder perspective</i>	103,45	98,65	102,37	101,19	98,32	Baik	
<i>Internal Process Perspective</i>	109,02	99,17	99,00	102,83	102,55	Istimewa	
<i>Learning and Growth Perspective</i>	80,43	90,73	106,03	103,59	109,75	Istimewa	
NPS Total	97,63	96,18	102,46	102,54	103,53	Istimewa	

Dari hasil pengukuran kinerja sesuai aplikasi SIMETRIS, diperoleh data capaian nilai kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA atau NPSS) tahun 2024 yaitu sebesar **103,53%** dengan predikat **Istimewa**.

Pencapaian sasaran strategis yang tinggi adalah indikator positif yang menunjukkan bahwa organisasi telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi, serta mencerminkan efektivitas program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

3.1.b Analisis Akuntabilitas Kinerja

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	IKSP	Tahun 2024		Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
			Target	Realisasi			
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	94,75	92,02	97,10	cukup	
		Persentase obat yang memenuhi syarat	97,3	97,70	100,41	sangat Baik	
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat	91	75,11	82,54	cukup	
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat yang aman dan bermutu	87,5	90,44	103,36	sangat baik	
		Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	55,2	55,8	101,09	sangat baik	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	96,5	97,09	100,61	sangat baik	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	86	85,15	99,01	cukup	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	92	93,84	102	sangat baik	

No	Sasaran Strategis	IKSP	Tahun 2024		Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
			Target	Realisasi			
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	93,79	93,79	100	baik	
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98	96,32	98,29	cukup	
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82	91,63	111,74	sangat baik	
		Indeks pelayanan publik di bidang Obat	4,7	4,87	103,62	sangat baik	
		Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	92,1	87,76	95,29	cukup	
		Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	93,9	98,36	104,75	sangat baik	
6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar	92	96,43	104,82	sangat baik	
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	93,19	92,69	99,46	cukup	
		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	81,94	81,08	98,95	cukup	

No	Sasaran Strategis	IKSP	Tahun 2024		Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
			Target	Realisasi			
8	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	90,9	88,49	97,35	cukup	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	95,18	96,02	100,88	sangat baik	
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	3	3,6	120	sangat baik	
10	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	93,06	98,46	105,8	sangat baik	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81,41	90	110,55	sangat baik	
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	90	91,41	101,57	sangat baik	
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60	96,44	160,73	tidak dapat disimpulkan	

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2020-2023), sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	IKSP	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	80	85,72	107,15	91	85,64	94,11	92,25	89,16	96,65	93,5	95,03	101,64	94,75	92,02	97,10	↓
		Persentase obat yang memenuhi syarat	89,1	97,84	109,81	95,50	96,29	100,83	96	98,12	102,21	96,5	97,22	100,75	97,3	97,70	100,41	↑
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat	84,5	79,92	94,58	87	85,87	98,70	88	89,41	101,6	89	82,71	92,93	91	75,11	82,54	↓
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat yang aman dan bermutu	76,5	79,08	103,37	80	79,26	99,08	81,5	84,2	103,31	84	87,12	103,71	87,5	90,44	103,36	↑
		Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	46	45,13	98,11	47	53,62	114,09	48	54,37	113,27	49	55,16	112,57	55,2	55,8	101,09	↑

No	Sasaran Strategis	IKSP	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	82,5	85,14	103,2	86	86	100	87	93,2	106,7	88	96,3	109,43	96,5	97,09	100,61	↑
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	72	75,12	104,33	77	69,38	90,10	80	77,24	97,24	83	81,19	97,82	86	85,15	99,01	↑
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83,5	85,21	102,05	87	89,11	102,43	88	89,04	101,18	89	90,03	101,16	92	93,84	102	↑
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	71	89,46	126	89,6	83,43	93,11	89,7	83,43	93,01	89,9	93,79	104,33	93,79	93,79	100	=
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	87,42	-	87,5	95,99	109,71	88,5	97,63	110,32	89,5	96,28	107,58	98	96,32	98,29	↑
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat	77	74,68	96,99	78	75	96,15	79	76,74	97,14	80	81,77	102,21	82	91,63	111,74	↑

No	Sasaran Strategis	IKSP	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor																
		Indeks pelayanan publik di bidang Obat	3,41	3,98	116,72	4,12	4,21	102,18	4,28	4,54	106,07	4,44	4,67	105,18	4,7	4,87	103,62	↑
		Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	82	84,71	103,31	85	82,44	96,98	86	86,68	100,8	87	92,05	105,80	92,1	87,76	95,29	↓
		Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	87,3	90,59	103,77	90,77	92,81	102,25	92,59	93,8	101,31	94,44	93,07	98,55	93,9	98,36	104,75	↑
6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar	60	61,11	101,85	82	86,11	105,01	85	86,11	101,31	89	89,07	100,08	92	96,43	104,82	↑
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Deputy Bidang	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83	79,32	95,57	86,7	86,02	99,22	88,3	92,4	104,64	89,9	92,18	102,54	93,19	92,69	99,46	↑
	Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	81	77,18	95,28	79,7	78,44	98,42	82,2	79,55	96,78	84,7	80,69	95,27	81,94	81,08	98,95	↑

No	Sasaran Strategis	IKSP	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	77	83,40	108,31	82,6	87,42	105,84	83,33	86,69	104,03	84,06	91,19	108,48	90,9	88,49	97,35	
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	1,51	0,25	16,56	2	1,25	62,5	2,26	2,7	119,47	2,5	2,7	108	3	3,6	120	
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	93,2	95,82	102,81	93,3	93,6	100,32	93,4	94,13	99,85	93,5	91,58	97,95	93,06	98,46	105,8	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,	100	100	100	100	91,20	91,20	100	100	100	100%	100	100	-	-	-	dihapus

No	Sasaran Strategis	IKSP	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif																
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	IKSP baru tahun 2024												81,41	90	110,55	IKSP Baru
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	IKSP baru tahun 2024												90	91,41	101,57	IKSP Baru
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	IKSP baru tahun 2024												60	96,44	160,73	IKSP Baru

Keterangan: ↑ atau ↓ dibandingkan dengan realisasi tahun 2023

3.3 Perbandingan realisasi kinerja 2020-2024 dengan Target jangka menengah

Pada sub bab ini, akan ditampilkan perbandingan realisasi kinerja sepanjang tahun 2020 hingga 2024 dan dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 2020-2024. Pada tabel Berikut ini dijabarkan masing-masing capaian dan kategori capaiannya mengikuti Pedoman SAKIP yang berlaku di BPOM.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA memiliki 24 IKSP Kinerja Utama yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sepanjang tahun 2020 hingga 2024 dan dibandingkan dengan target jangka menengah. Sampai dengan akhir renstra teridentifikasi bahwa sebanyak 8 IKSP dikategorikan belum mencapai target yang telah ditetapkan dan 16 IKSP telah mencapai target. Berikut ini dijabarkan capaian untuk masing-masing IKSP tersebut.

Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan realisasi kinerja sepanjang tahun 2020-2024 dengan target akhir periode Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

No	Sasaran Program	IKSP Kinerja Utama	Realisasi					Target Akhir Renstra (PK 2024)	Capaian Terhadap TJM Renstra	
			2020	2021	2022	2023	2024		%	Kategori
Stakeholder Perspective										
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	1.Indeks Pengawasan Obat	85,72	85,64	89,16	95,03	92,02	94,75	97,10	Cukup
		2. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,84	96,29	98,12	97,22	97,70	97,3	100,41	sangat baik
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	1. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	79,92	85,87	89,41	82,71	75,11	91	82,54	Cukup
		2. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	79,08	79,26	84,2	87,12	90,44	87,5	103,36	Sangat baik
		3. Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	45,13	53,62	54,37	55,16	55,8	55,2	101,09	Sangat baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	85,14	86	93,2	96,3	97,09	96,5	100,61	Sangat baik
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	75,12	69,38	77,24	81,19	85,15	86	99,01	Cukup

No	Sasaran Program	IKSP Kinerja Utama	Realisasi					Target Akhir Renstra (PK 2024)	Capaian Terhadap TJM Renstra	
			2020	2021	2022	2023	2024		%	Kategori
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	85,21	89,11	89,94	90,03	93,84	92	102	Sangat baik
<i>Internal Process Perspective</i>										
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	89,46	83,43	83,43	93,79	93,79	93,79	100	Baik
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	1.Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,42	95,99	97,63	96,28	96,32	98	98,29	Cukup
		2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	74,68	75	76,74	81,77	91,63	82	111,74	Sangat baik
		3.Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	3,98	4,21	4,53	4,67	4,87	4,7	103,62	Sangat baik
		4. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	84,71	82,44	86,68	92,05	97,76	92,1	95,29	Cukup
		5. Tingkat efektivitas KIE di bidang obat	90,59	92,81	96,33	93,07	98,36	93,9	104,75	Sangat baik

No	Sasaran Program	IKSP Kinerja Utama	Realisasi					Target Akhir Renstra (PK 2024)	Capaian Terhadap TJM Renstra	
			2020	2021	2022	2023	2024		%	Kategori
6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	61,11	86,11	86,11	89,07	96,43	92	104,82	Sangat baik
Learning and Growth Perspective										
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	1. Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	79,32	86,02	92,4	92,18	92,69	93,19	99,46	Cukup
		2. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	77,18	78,44	79,55	80,69	81,08	81,94	98,95	Cukup
8	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	83,40	87,42	86,69	91,19	88,49	90,9	97,35	Cukup
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	0,25	1,25	2,7	2,7	3	3,6	120	Baik
10	Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	1. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	95,82	89,22	94,13	91,58	98,46	93,6	105,8	Sangat baik
		2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	100	100	100	100	-	-	-	-
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	90	81,41	110,55	Sangat baik

No	Sasaran Program	IKSP Kinerja Utama	Realisasi					Target Akhir Renstra (PK 2024)	Capaian Terhadap TJM Renstra	
			2020	2021	2022	2023	2024		%	Kategori
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	91,41	90	101,57	Sangat baik
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	-	-	-	-	96,44	60	160,73	Tidak dapat disimpulkan

3.4 Perbandingan Capaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dengan Satuan Kerja lain Tahun 2024

Berikut ini merupakan tabel perbandingan realisasi kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dengan Deputy Bidang Pengawasan komoditi lainnya di lingkungan BPOM. Adapun satuan kerja lain yang digunakan sebagai perbandingan adalah Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Deputi II) dan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Deputi III).

Tabel 3. 6 Perbandingan realisasi kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dengan Deputy II dan Deputy III di lingkungan BPOM

No.	IKSP	Realisasi		
		Deputi I	Deputi II	Deputi III
PS 1: Stakeholder perspective				
SP 1				
1	- Indeks pengawasan obat - Indeks pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik - Indeks pengawasan Makanan	92,02	89,20	89,05
2	- Persentase obat yang memenuhi syarat - Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat - Persentase makanan yang memenuhi syarat	97,7	92,44	90,47
SP2				
3	- Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat - Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik - Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Makanan	75,11	87,83	76,80
4	- Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Makanan	90,44	86,71	88,59

No.	IKSP	Realisasi		
		Deputi I	Deputi II	Deputi III
SP3				
5	- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	97,09	95,28	97,69
6	- Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	85,15	83,18	84,29
7	- Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA - Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik - Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang pengawasan Pangan olahan	93,84	91,03	90,80
PS 2: Internal Process Perspective				
SP4				
8	- Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat - Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik - Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Makanan	93,79	85,38	85,68
SP5				
9	- Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	91,63	83,94	92,62

No.	IKSP	Realisasi		
		Deputi I	Deputi II	Deputi III
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor			
10	- Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA - Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik - Indeks pelayanan publik di bidang makanan	4,87	4,89	4,90
11	- Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan - Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,32	90,68	87,82
12	- Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu - Persentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu - Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	87,76	94,62	94,95
13	- Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat - Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik - Tingkat efektifitas KIE di bidang Makanan	98,36	99,27	99,62
SP6				
14	- Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar - Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar - Persentase Fasilitas Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	96,43	90,07	97,14
PS 3: Learning & Growth Perspective				
SP 7				

No.	IKSP	Realisasi		
		Deputi I	Deputi II	Deputi III
15	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92,69	89,54	91,07
16	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81,08	80,66	78,39
17	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,02	98,19	98,32
SP 8				
18	Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88,49	87,82	87,35
19	- Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,6	3,6	3,54
20	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	98,46	98,8	98,19

No.	IKSP	Realisasi		
		Deputi I	Deputi II	Deputi III
	• Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik • Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan			
21	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	90	95	95
22	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	91,41	94,56	98,52
23	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	96,44	78,61	86,8

Berdasarkan tabel di atas, dari 23 IKSP yang dapat dibandingkan antar kedeputian, terlihat bahwa Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA berhasil unggul dibandingkan Deputi II dan III untuk 11 IKSP berikut ini:

1. Indeks pengawasan obat
2. Persentase obat yang memenuhi syarat
3. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat
4. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat
5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
6. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat
7. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
8. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
9. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
10. Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
11. Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri

Dan meraih realisasi terendah pada 8 IKSP berikut ini:

1. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat
2. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
3. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu
4. Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat

5. Nilai Pengelolaan Kearsipan
6. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
7. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

3.5 Pembahasan dan analisis Capaian Kinerja 2024 (Penyebab keberhasilan/kegagalan /peningkatan/ penurunan kinerja, upaya perbaikan, penyempurnaan kinerja analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, serta analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja)

Pada tahun 2024, capaian nilai NPSS Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yaitu sebesar 103,53%. Nilai ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA pada tahun 2024 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan predikat Istimewa.

Informasi nilai capaian yang ditampilkan pada Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi IKSP Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA terhadap Target tahun 2024, diperoleh hasil bahwa terhadap total 24 IKSP: terdapat 1 (satu) IKSP capaiannya memperoleh kategori Tidak dapat disimpulkan, 14 (empat belas) IKSP dengan capaian Sangat Baik; 1 (satu) IKSP capaiannya memperoleh kategori Baik; dan 8 (Delapan) IKSP memperoleh kategori Cukup, dan (satu) IKSP capaiannya memperoleh kategori tidak dapat disimpulkan. Berikut ini dijabarkan IKSP yang dimaksud untuk masing-masing kategori capaian kinerja.

- a. **1 (satu)** IKSP capaiannya memperoleh kategori **Tidak dapat disimpulkan**, yaitu IKSP Presentase realisasi penggunaan produk dalam negeri.
- b. **14 (empat belas)** IKSP capaiannya memperoleh kategori Sangat Baik, diantaranya:
 1. Persentase obat yang memenuhi syarat
 2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat yang aman dan bermutu

3. Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan
 4. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat
 5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
 6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
 7. Indeks pelayanan publik di bidang Obat
 8. Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat
 9. Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar
 10. Nilai pengelolaan kearsipan
 11. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
 12. Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa
 13. Nilai pengelolaan barang milik negara
 14. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
- c. **1 (satu)** IKSP capaiannya memperoleh kategori **Baik**, yaitu IKSP Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat.
- d. **8 (Delapan)** IKSP capaiannya memperoleh kategori **Cukup**, diantaranya:
1. Indeks Pengawasan Obat
 2. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat
 3. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 4. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu
 5. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat
 6. Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
 7. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
 8. Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Dalam proses pencapaian kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi capaiannya. Penyebab keberhasilan/kegagalan /peningkatan/ penurunan kinerja dijelaskan melalui pembahasan Sasaran Program dan IKSP. Selain itu, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA juga telah melakukan pengkajian terkait langkah strategis yang perlu ditempuh sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja analisis program/kegiatan yang diharapkan dapat menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk masing-masing Sasaran Program (SP) dan IKSP kinerja dijabarkan menggunakan pagu anggaran riil termasuk pemblokiran/pemotongan anggaran, data lengkap terkait pagu anggaran awal dan pemotongan disampaikan pada poin 3.6 (Realisasi anggaran).

SP 1 Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu

Sasaran program “**Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu**” memiliki capaian kinerja sebesar 98,75% termasuk dalam kategori **CUKUP**, program/kegiatan yang dilaksanakan belum berhasil mencapai sasaran strategis dengan baik (<100%).

Capaian SP2 disusun atas komponen 2 IKSP: (1) Indeks Pengawasan Obat; (2) Presentase Obat yang memenuhi syarat. Sehingga nilai capaian sasaran program ini akan sangat dipengaruhi oleh nilai capaian ke-2 IKSP tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, untuk memperoleh capaian SP2 yang maksimal, maka perlu dilakukan optimalisasi capaian pula pada ketiga IKSP penyusunnya tersebut.

Tabel 3. 7 Capaian IKSP pada SP1. Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu

SP2. Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu						
No.	IKSP		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
1.	Indeks Pengawasan Obat		94,75	92,02	97,10	Cukup
2.	Presentase Obat yang Memenuhi Syarat		97,3	97,7	100,41	Sangat Baik
Capaian SP 2					98,75	Cukup

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk SP1. Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu pada tahun 2024 memperoleh kategori CUKUP. Capaian IKSP SP1 ini tinggi pada IPresentase Obat yang Memenuhi Syarat di tahun 2024 yaitu sebesar 100,41 %

(sudah melebihi 100%), sedangkan Indeks Pengawasan Obat memperoleh capaian yang rendah di angka 97,10%.

Berikut ini dijabarkan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk masing-masing IKSP tersebut:

1. IKSP Indeks Pengawasan Obat

Indeks Pengawasan Obat adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat yang dilakukan oleh BPOM dengan menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Indikator pembentuk indeks terdiri dari indikator kinerja utama (IKU) BPOM dan IKU unit organisasi Eselon I yang berada pada level *stakeholder perspective* dan *internal process perspective* pada Peta Strategi level 0 dan level I dengan pembobotan menggunakan metode *expert judgement*. Bobot pada internal process perspective sedikit lebih besar karena perspektif tersebut merupakan *core business* dari organisasi untuk menghasilkan kinerja yang bersifat outcome/dampak pada perspektif stakeholder

Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat adalah untuk mengetahui kondisi keamanan/efektivitas kinerja pengawasan Obat, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan di tiap daerah, maupun secara nasional. Indeks Pengawasan Obat dapat diilustrasikan melalui peta/spasial untuk menggambarkan secara sederhana Indeks Pengawasan Obat di setiap provinsi/wilayah.

Nilai Indeks Pengawasan Obat tahun 2024 adalah sebesar **92,02** dengan capaian **97,12%** dibandingkan target 2024 sebesar 94,75 dan kategori capaian **CUKUP**. Nilai ini diperoleh dari 6 IKSP pembentuk dari dimensi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, yang merupakan 3 pilar pengawasan obat.

Tabel 3. 8 Pencapaian Capaian Indeks Pengawasan Obat Tahun 2020 s.d 2024

IKSP	Capaian					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Pengawasan Obat	85,72	85,64	89,16	95,03	92,02	-

Dimensi dan atribut IKSP Indeks Pengawasan Obat Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 9 Dimensi dan Atribut IKSP Indeks Pengawasan Obat

DIMENSI DAN ATRIBUT (IKSP)	Bobot (%)	Realisasi	Nilai	Nilai Indeks Pengawasan Obat	Target Akhir Periode Renstra
Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat	12,5%	75,11	9,56	92,02	94,75
Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	12,5%	90,44	11,51		
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat	12,5%	97,09	12,35		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat	12,5%	85,15	10,84		
Persentase Obat Memenuhi Syarat	30%	97,70	29,84		
Indeks Kualitas kebijakan pengawasan obat	20%	88,05	17,93		

Nilai realisasi sebesar 92,02 ini belum memenuhi target tahun 2024 atau akhir periode Renstra 2020-2024 yang ditetapkan yaitu 94,75. Belum tercapainya target IKSP ini karena kontribusi realisasi IKSP indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dengan bobot 12,5% belum memberikan nilai yang maksimal.

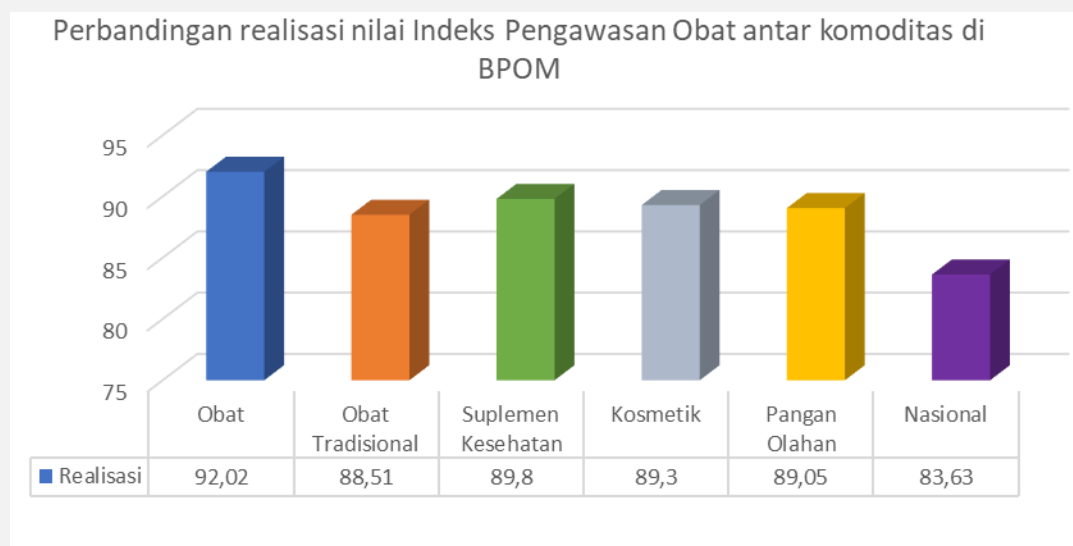
Indeks kepatuhan pelaku usaha yang belum tercapai maksimal ini karena masih belum optimalnya bimbingan dan pembinaan yang dilakukan atau karena ketatnya pengawasan yang telah dilakukan pada sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan sehingga temuan pelanggaran pada sarana meningkat.

Perbandingan realisasi nilai Indeks Pengawasan Obat dengan Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II), Indeks Pengawasan Makanan (Deputi III), serta dengan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (nasional), maka terlihat Indeks Pengawasan Obat mencapai nilai di atas indeks pengawasan

komoditi lain dan indeks secara nasional. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 10 Perbandingan realisasi nilai Indeks Pengawasan Obat antar komoditas di BPOM

No.	Komoditi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Obat	94,75	92,02	97,12
2	Obat Tradisional	89	88,51	99,45
3	Suplemen Kesehatan	89	89,80	100,90
4	Kosmetik	89	89,30	100,34
5	Pangan Olahan	86	89,05	103,55
6	Nasional	83	83,63	100,76



Gambar 3. 3 Perbandingan Indeks Pengawasan Obat dengan Indeks pengawasan komoditi lain dan indeks secara nasional

Pencapaian indikator ini menurun 3,01 dibandingkan tahun 2023, penurunan ini disebabkan penurunan tingkat keputuhan pelaku usaha di bidang obat terhadap ketentuan yang berlaku, hal ini karena semakin ketatnya pengawasan di sarana sehingga semakin banyak ditemukan pelanggaran di bidang pengawasan obat. Intensifikasi pengawasan yang saling bersinergi dengan lintas sektor terkait menjadi salah satu faktor dalam upaya meminimalisir pelanggaran di bidang obat.

Pencapaian IKSP ini didukung oleh berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian IKSP ini antara lain pengawasan post market, bimbingan teknis kepada pelaku usaha,

asistensi regulatori dan kegiatan penyusunan serta sosialisasi kebijakan. Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian IKSP ini antara lain:

- i. Sosialisasi Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tatacara Permohonan Analisis Hasil Pengawasan dalam Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Farmasi
- ii. Sosialisasi Sistem Pelaporan Hasil Pengujian Kadar Nikotin dan Tar serta Contoh Kemasan dari Industri/Importir Rokok (BPOM-WATCH)
- iii. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang tentang Kesehatan terkait Pengamanan Zat Adiktif berupa Produk Tembakau dan Rokok Elektronik
- iv. Bimbingan Teknis Farmakovigilans dalam rangka Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam Pengawasan Keamanan Obat
- v. Bimbingan Teknis/Intensifikasi Pelayanan Publik Pengawasan Pre dan Post Market Iklan/Penandaan Obat melalui desk konsultasi
- vi. Workshop Pemantapan Teknis Pengawasan Post-Market Obat Beredar



Gambar 3. 4 Kegiatan Sosialisasi Aplikasi BPOM-WATCH Tanggal 20 Februari 2024



Gambar 3. 5 Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Tanggal 21-22 Februari 2024



Gambar 3. 6 Rapat Sosialisasi Peraturan Pemerintah Bersama Kementerian Kesehatan Tanggal 12 Agustus 2024



Gambar 3. 7 Kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans dalam rangka Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam Pengawasan Keamanan Obat

Sebagai upaya perbaikan ke depan maka prioritas kegiatan yang berdampak langsung kepada pelaku usaha seperti bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi ketentuan yang terkini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Pencapaian Indeks Pengawasan Obat pada tahun 2024 ini menjadi pertimbangan dalam penetapan target IKSP tersebut pada Rencana Kerja Tahunan 2025. Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA akan terus berkomitmen melakukan rekomendasi yang diberikan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan nilai indeks pengawasan obat sehingga diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

2. IKSP. Persentase obat yang memenuhi syarat

Sebagai salah satu bentuk pengawasan post-market Obat untuk melindungi masyarakat Indonesia dari Obat yang berisiko terhadap kesehatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia sebagai lini terdepan Badan POM melakukan sampling dan pengujian dalam rangka pengawalan mutu Obat beredar. Pelaksanaan sampling Obat berdasarkan pada analisis risiko dan keterwakilan produk yang beredar. Selanjutnya Pengawas melakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kedaluwarsa,

label, pemerian dan uji laboratorium untuk memastikan produk Obat dan Makanan memenuhi standar/kesesuaian mutu dan label.

Pelaksanaan sampling obat beredar mengacu pada Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku dengan capaian indikator Persentase Obat Memenuhi Syarat berdasarkan pada sampling acak di tahun berjalan. Ruang lingkup obat yang dimaksud mencakup obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Kriteria penetapan obat memenuhi syarat, meliputi:

- 1) Memiliki Nomor Izin Edar yang sah dan berlaku,
- 2) Tidak kedaluarsa,
- 3) Tidak rusak,
- 4) Memenuhi ketentuan penandaan,
- 5) Memenuhi syarat berdasarkan pengujian,

Alur pemeriksaan hasil sampling obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5, sehingga apabila tidak memenuhi syarat pada salah satu poin maka langsung dapat diambil kesimpulan akhir tidak memenuhi syarat. Jumlah sampel obat memenuhi syarat dihitung berdasarkan satuan bets.

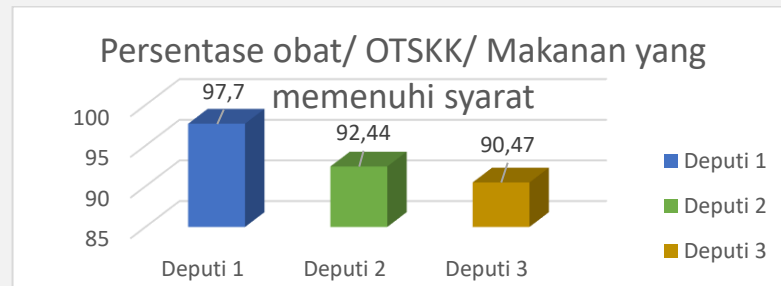
Realisasi persentase obat memenuhi syarat tahun 2024 adalah sebesar **97,70%** dengan capaian **100,41%** apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sehingga termasuk dalam kategori capaian **SANGAT BAIK**.

Tabel 3. 11 Capaian Persentase obat yang memenuhi syarat Tahun 2020 s.d 2024

IKSP	Realisasi					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase obat yang memenuhi syarat	97,84	96,29	98,12	97,22	97,70	-

Realisasi sebesar 97,70% ini telah melampaui target yang ditetapkan tahun 2024 maupun target akhir periode Renstra yaitu sebesar 97,30%. Keberhasilan pencapaian IKSP ini didukung dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan secara intensif dan berkala serta peningkatan koordinasi antara UPT BPOM seluruh Indonesia dengan unit teknis di pusat terkait dalam mengimplementasikan Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku.

Perbandingan capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2024 dengan capaian persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang memenuhi syarat (Deputi II), capaian persentase makanan yang memenuhi syarat (Deputi III), maka terlihat capaian persentase obat yang memenuhi syarat menempati urutan tertinggi. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 8 Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat vs Persentase komoditi lain tahun 2024

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKSP ini antara lain adalah:

- i. Intensifikasi implementasi *good sampling practices* dalam upaya optimalisasi pengawasan mutu obat beredar;
- ii. Perkuatan strategi dan pemantapan teknis pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif yang telah dilaksanakan secara sinergis.
- iii. Forum koordinasi Pusat dan UPT BPOM dalam manajemen sampling obat yang melibatkan UPT BPOM seluruh Indonesia maupun lintas sektor terkait antara lain Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.





Gambar 3. 9 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

SP 2 Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau

Sasaran program “**Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau**” memiliki capaian kinerja sebesar 95,66% termasuk dalam kategori **CUKUP**, program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis dengan baik (<100%).

Capaian SP2 disusun atas komponen IKSP: (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat; (2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat yang aman dan bermutu; dan (3) Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan. Sehingga nilai capaian sasaran program ini akan sangat dipengaruhi oleh nilai capaian ketiga IKSP tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, untuk memperoleh capaian SP2 yang maksimal, maka perlu dilakukan optimalisasi capaian pula pada ketiga IKSP penyusunnya tersebut.

Tabel 3. 12 Capaian IKSP pada SP2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau

SP2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
1.	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat	<u>91</u>	<u>75,11</u>	<u>82,54</u>	Cukup

SP2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
2.	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat yang aman dan bermutu	87,5	90,44	103,36	Sangat Baik
3.	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	55,2	55,8	101,09	Sangat Baik
Capaian SP 2				95,66	Cukup

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk SP2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau pada tahun 2024 memperoleh kategori **CUKUP**. Capaian IKSP SP2 ini tinggi pada Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat yang aman dan bermutu dan Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan di tahun 2024 yaitu berturut-turut sebesar 103,36 % dan 101,09 % (sudah melebihi 100%). Sedangkan Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat memperoleh capaian yang paling rendah di angka 82,54%.

Berikut ini dijabarkan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk masing-masing IKSP tersebut:

3. IKSP Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat

Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaku usaha di bidang obat mematuhi regulasi dan standar yang telah ditetapkan, yang dimaksud dengan pelaku usaha obat mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi dan pelayanan yang memproduksi/mendistribusikan/menyalurkan obat. Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa variabel, yaitu:

- 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan (GMP) ;
- 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan (GDP) ;
- 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan Obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan ; dan
- 4) Hasil pemeriksaan penandaan iklan dan penandaan Obat yang memenuhi ketentuan.

Dalam Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan tahun 2024, data yang digunakan adalah data hasil pemeriksaan/pengawasan pelaku usaha Obat dan Makanan pada sarana produksi, distribusi, pelayanan, iklan, dan penandaan pada tahun 2023 di seluruh provinsi yang telah dilakukan verifikasi grading oleh Unit Kerja di Kedeputian I, II, dan III. Data pengawasan yang digunakan untuk mengukur IKPU pada tahun ini adalah data hasil pengawasan/pemeriksaan pelaku usaha pada tahun n-1 (satu tahun sebelumnya).

Nilai Indeks Kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat tahun 2024 adalah sebesar 75,11 dengan capaian 82,54% dibandingkan target 2023 sebesar 91 dan kategori capaian **CUKUP**.

Tabel 3. 13 Pencapaian Capaian Kepatuhan (Compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tahun 2020 hingga 2024

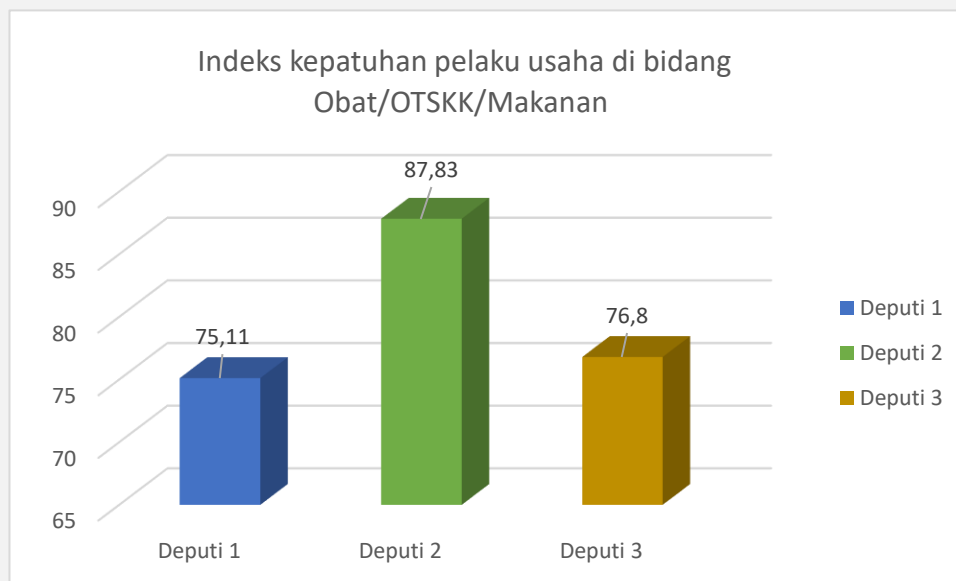
IKSP	Realisasi					Target Akhir Periode Renstra
	2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Kepatuhan (<i>Compliance index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat	79,92	85,87	89,41	82,71	75,11	91

Nilai realisasi sebesar 75,11 ini jauh dari target tahun 2024 yang ditetapkan yaitu sebesar 91 (Capaian 82,54%).

Nilai Indeks Kepatuhan (Compliance Index) yang kecil dalam industri obat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari aspek pelaku usaha maupun dari sistem pengawasan. Berikut adalah beberapa penyebab seperti Pelaku usaha kurang memahami aturan dan standar yang berlaku, seperti *Good Manufacturing Practice* (GMP) dan *Good Distribution Practice* (GDP), perusahaan farmasi kecil atau menengah menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar produksi dan distribusi karena keterbatasan modal, tenaga ahli, atau fasilitas produksi yang memadai, Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar, tidak menerapkan prosedur pengendalian mutu secara ketat, penyimpangan dalam sistem distribusi.

Perbandingan nilai Indeks Kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dengan Indeks Kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II), dan Nilai Indeks Kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Makanan (Deputi III) menunjukkan bahwa nilai Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat menempati urutan terendah. Perbandingan ketiga komoditi tersebut dapat dilihat pada gambar Berikut ini.

Perbandingan Indeks Kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha antar komoditi



Grafik 3. 1 Perbandingan Indeks Kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dengan Indeks pengawasan komoditi lain dan indeks secara nasional

Berikut ini merupakan faktor penyebab rendahnya capaian untuk IKSP ini bila ditinjau dari masing-masing unit pengawasan diantaranya:

1 Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA

Adapun kendala yang dihadapi oleh Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA sehingga mempengaruhi tidak tercapainya hasil pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha untuk sarana iklan dan penandaan obat disebabkan karena:

- a. Terdapat peningkatan tren pelanggaran publikasi iklan di media sosial oleh industri farmasi yang dimungkinkan karena masih rendahnya pemahaman terkait peraturan iklan yang berlaku terutama untuk industri farmasi kecil.

- b. Pembagian target pengawasan iklan obat di media sosial yang dilakukan oleh UPT berdasarkan industri farmasi, sehingga iklan obat yang diawasi mencakup seluruh Industri Farmasi yang melakukan kegiatan iklan obat.

Atas tidak tercapainya hasil pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha untuk pada pemeriksaan iklan dan penandaan obat, adapun rencana aksi yang akan dilakukan sebagai langkah tindak lanjut Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA di periode berikutnya, dengan melakukan peningkatan intensifikasi pengawasan yang dilakukan Badan POM terhadap iklan dan penandaan obat kepada pelaku usaha melalui desk konsultasi dan pemanggilan sehingga temuan iklan maupun penandaan obat yang tidak memenuhi ketentuan dapat segera ditindaklanjuti.

2 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP berkontribusi dalam pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Bidang Obat terkait dengan hasil pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan obat.

Nilai index kepatuhan sarana distribusi obat pada tahun 2024 adalah 83,06 sementara index kepatuhan sarana pelayanan obat pada tahun 2024 adalah 77,89.

Terjadinya penurunan index kepatuhan pelaku usaha khususnya di sarana distribusi dan sarana pelayanan obat diakibatkan oleh:

- a. Adanya perbedaan target, populasi dan proporsi dari jenis sarana yang diperiksa dibanding tahun sebelumnya. Terdapat penurunan pemeriksaan sarana Puskesmas sebesar 7,35%, dimana berdasarkan rekam jejak pemeriksaan Puskesmas selama ini termasuk sebagai sarana yang dinilai Patuh (Grading A). Penurunan populasi Puskesmas tersebut disebabkan karena adanya penurunan target pemeriksaan. Puskesmas yang ditetapkan pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 3.188 menjadi 2.561 serta dengan mempertimbangkan analisis risiko berdasarkan Juknis Pengawasan, yang mana pada 2 tahun sebelumnya Puskesmas telah diperiksa berturut-turut dalam rangka intensifikasi vaksin.
- b. Adanya pemanfaatan data e-was oleh petugas UPT Badan POM dalam menentukan prioritas target pemeriksaan. Dalam pemanfaatan data tersebut, petugas

menganalisis dan memprioritaskan pemeriksaan terhadap sarana yang menerima suatu obat dalam jumlah besar dan/atau frekuensi sering.

- c. Pada Tahun 2023 juga terdapat kegiatan intensifikasi pengawasan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan yang didasari dengan adanya kondisi, antara lain: maraknya peredaran OOT, khususnya Tramadol dan Trihexyphenidyl secara bebas di masyarakat; adanya dugaan terjadinya peredaran Tramadol dan Trihexyphenidyl secara bebas dari penyimpangan jalur distribusi Bahan Obat dan Obat Jadi yang mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl; dan menindaklanjuti hasil operasi tematik yang telah dikoordinasikan dengan Kedeputusan 4. Kondisi sebagaimana demikian juga berperan dalam penentuan sarana target pemeriksaan.
- d. Terdapat peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan di sarana sehingga pemeriksaan yang dilakukan lebih mendalam. Salah satu faktor pendukungnya yaitu karena telah diselenggarakannya Pelatihan Inspektur CDOB tingkat Junior di tahun 2023 sebanyak 2 (dua) batch, yang diikuti oleh perwakilan dari masing-masing UPT Badan POM.

Pencapaian pada tahun 2020 - 2024 menjadi bahan evaluasi dalam menetapkan target IKSP Index Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat pada tahun 2025 - 2029.

Terhadap rekomendasi atas tidak tercapainya index kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut sehingga target Index Kepatuhan Pelaku Usaha dapat tercapai di tahun berikutnya.



Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha melalui Asistensi Regulatori



Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pengawasan Periklanan Obat



Gambar 3. 10 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat

Pencapaian Indeks Kepatuhan (*Compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat pada tahun 2024 ini menjadi pertimbangan dalam penetapan target IKSP tersebut pada Rencana Kerja Tahunan 2025. Karena rendahnya capaian pada tahun 2024, maka untuk tahun berikutnya perlu dilakukan penyesuaian target.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA akan terus berkomitmen melakukan rekomendasi yang diberikan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan nilai Indeks Kepatuhan (*Compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat sehingga diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan tahun 2024 untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat penurunan indeks untuk beberapa kelompok pelaku usaha/sarana jika dibandingkan dengan indeks tahun 2023 yaitu pada sarana produksi obat, distribusi obat, pelayanan obat, iklan obat, penandaan obat. Sebagai tindak lanjut terhadap penurunan indeks ini:
 - a. Perlu dilakukan bimbingan dan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap sarana pelaku usaha Obat yang memiliki nilai grading (MK) yang rendah.
 - b. Perlu dilakukan pelayanan desk konsultasi kepada pelaku usaha dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih baik atas peraturan terbaru terkait obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap pelaku usaha Obat yang berisiko.
2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap konsep pengukuran IKPU untuk periode Renstra tahun 2025 – 2029 terutama terkait definisi operasional dan ruang lingkup pengukuran IKPU.

4. IKSP. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat yang Aman dan Bermutu

BPOM telah melakukan berbagai upaya pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM diukur dari dampaknya terhadap masyarakat, salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Kesadaran masyarakat ditunjukkan melalui pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu membeli produk dengan kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluarsa. Indeks Kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep service quality yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan, yaitu jaminan keamanan, upaya pengawasan, upaya perlindungan dan pemberian informasi, serta tindakan BPOM.

Survey indeks kesadaran masyarakat dilakukan untuk mengukur kesadaran masyarakat dalam memilih Obat yang aman skala nasional. Pengukuran indeks kesadaran masyarakat dibentuk melalui tiga aspek pembentuk kesadaran yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku. Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat yang aman dan bermutu diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PUSAKOM.

Nilai indeks kesadaran masyarakat terhadap obat yang aman dan bermutu tahun 2024 adalah sebesar 90,44 dengan capaian 103,35% dibandingkan target 2024 dan kategori capaian **SANGAT BAIK**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis dengan baik (>100%).

Tabel 3. 14 Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2020 - 2024

IKSP	Capaian					Target Akhir Periode Renstra
	2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks kesadaran masyarakat terhadap	79,08	79,26	84,2	87,12	90,44	87,5

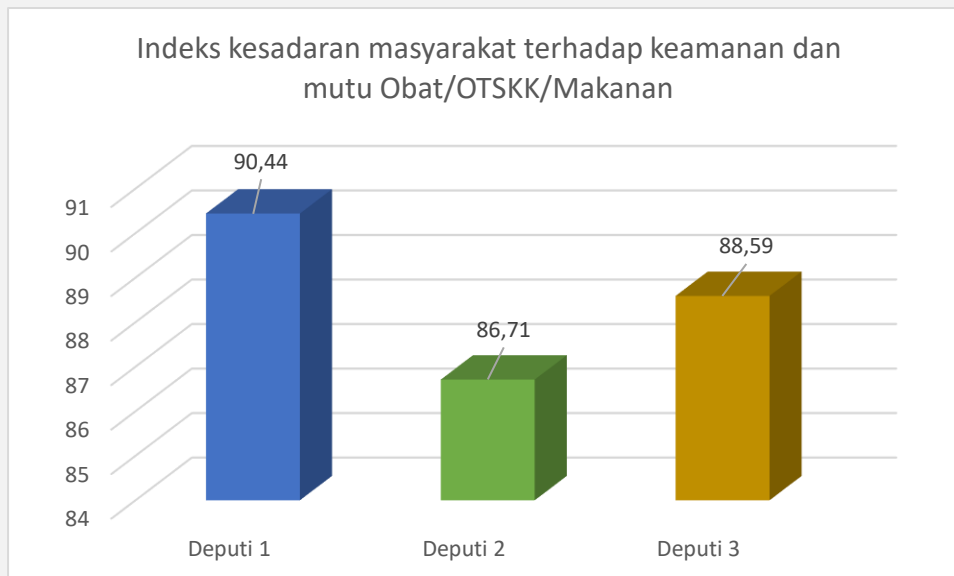
IKSP	Capaian					Target Akhir Periode Renstra
	2020	2021	2022	2023	2024	
obat yang aman dan bermutu						

Nilai realisasi sebesar 90,44, capaian 103,36% ini telah melampaui target tahun 2024 yang ditetapkan yaitu target 87,5.

Berdasarkan pesan kunci KLIK dapat disimpulkan bahwa variabel pada aspek pengetahuan dan sikap, variabel yang tertinggi yakni terkait kedaluarsa dan yang terendah adalah nomor izin edar. Pada aspek perilaku, variabel yang tertinggi adalah memilih produk dengan kemasan yang baik dan yang terendah adalah membaca informasi pada label.

Hasil uji perbandingan terhadap demografi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan indeks kesadaran masyarakat yang signifikan pada karakteristik wilayah, usia, pendidikan dan pekerjaan. Tidak terdapat perbedaan kesadaran masyarakat yang signifikan berdasarkan jenis kelamin.

Berikut ini perbandingan nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu di Bidang Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II), dan Nilai Indeks Kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Makanan (Deputi III) menunjukkan bahwa nilai Indeks kesadaran masyarakat dibidang obat menempati urutan tertinggi. Perbandingan ketiga komoditi tersebut dapat dilihat pada gambar Berikut ini.



Grafik 3. 2 Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu di Bidang Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP ini diantaranya:

1. Dilakukan kegiatan Refreshment Pelayanan Publik kepada stakeholder terkait secara berkala
2. Adanya aplikasi penunjang yang mempercepat proses pelayanan publik
3. Diikembangkan dan disosialisasikannya aplikasi pelaporan dari Industri/Importir Rokok secara elektronik

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

1. Perkuatan sinergi dengan kementerian/lembaga/*stakeholder*
2. Optimalisasi Strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan melalui KIE yang lebih menarik
3. Penyusunan konten/materi informasi dan edukasi yang menarik dan mudah dipahami masyarakat
4. Pembaharuan website BPOM agar *user friendly* bagi masyarakat, diantaranya meningkatkan kualitas informasi, cara penyajian informasi dan tampilan website
5. Optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat dan tindak lanjut hasil dan rekomendasi peningkatan kesadaran tahun sebelumnya.

Rekomendasi untuk meningkatkan Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu:

1. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi Keamanan Obat.
2. Penguatan peran UPT BPOM di daerah dalam menjalin kemitraan dengan lintas sektor seperti pemda, media lokal, dan institusi pendidikan dalam menyebarluaskan informasi Obat.
3. Meningkatkan jumlah keterlibatan dan peran aktif dari perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader dsb), media, dan influencer.
4. Meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja untuk menjadi peer educator dalam menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK seperti pada SAKA Pramuka, kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) mahasiswa, dll.
5. Menjalinkan kerjasama dengan pelaku usaha dan sarana layanan kesehatan dalam menyampaikan informasi Obat kepada konsumen, contohnya dengan pemasangan banner, poster, dan pamflet edukasi.
6. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

5. IKSP. Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan

Pengawasan peredaran produk tembakau merupakan salah satu strategi penting dalam kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah telah menetapkan target penurunan prevalensi perokok anak dan remaja usia 10-18 tahun. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan penguatan pengawasan yang komprehensif dan multisektoral dengan melibatkan lintas sektor dengan meningkatkan koordinasi untuk memaksimalkan peran masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Badan POM sebagai bagian dari pemerintah bersama-sama dengan K/L terkait lainnya dalam mendukung program pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, termasuk dalam upaya sinergisme melaksanakan amanat untuk melakukan revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang

Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, Deputi Pengawasan Obat, NPPZA melalui Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, NPPZA secara rutin melakukan serangkaian kegiatan. Kegiatan ini meliputi peningkatan koordinasi lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan iklan dan label produk tembakau, penyusunan kebijakan teknis pengawasan produk tembakau, melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan produk tembakau yang di dalamnya juga mencakup perencanaan target pengawasan produk tembakau bagi UPT BPOM, serta melakukan bimbingan teknis kepada UPT BPOM di seluruh Indonesia.

Sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan amanat tersebut, Badan POM mengembangkan mekanisme evaluasi yang terukur untuk memastikan efektivitas pengawasan produk tembakau. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Memenuhi Ketentuan Label dan Iklan. Indeks ini tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan program pengawasan, tetapi juga mencerminkan sejauh mana industri mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator ini menjadi indikator kunci dalam menilai pencapaian sasaran program, terutama peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi label dan iklan produk tembakau.

Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Memenuhi Ketentuan Label dan Iklan mendukung pencapaian sasaran program (IKSP) yaitu meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau. IKSP terkait dengan produk tembakau dihitung dengan menggunakan dua parameter utama, yaitu:

- 1) Kepatuhan industri yang telah melakukan pelaporan hasil pengujian kadar nikotin dan tar dan contoh kemasan.
- 2) Kepatuhan industri dalam mengimplementasikan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada iklan dan label produk tembakau.

Pada tahun 2024, indeks kepatuhan industri produk tembakau adalah sebesar **55,80** atau capaiannya **101,09%** terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 55,20. Capaian IKSP ini termasuk kategori **SANGAT BAIK**.

Keberhasilan pencapaian IKSP ini didukung oleh berbagai kegiatan diantaranya:

- 1) Pelaporan hasil pengawasan iklan dan produk tembakau melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mengoptimalkan kinerja UPT BPOM dalam rangka pengawasan iklan dan label produk tembakau.
- 2) Pelaksanaan kegiatan intensifikasi pengawasan iklan dan produk tembakau di beberapa media selama tahun 2024, serta telah dilaksanakan kegiatan diskusi dengan lintas sektor dengan tujuan *refreshment* dan penyamaan persepsi pemahaman petugas pengawas iklan dan label produk tembakau.
- 3) Kegiatan monitoring dan evaluasi atas pengawasan produk tembakau secara berkala.

Selain kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian IKSP, berikut merupakan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, diantaranya:

1. Bimbingan Teknis Pengawasan Produk Tembakau untuk UPT BPOM Di Seluruh Indonesia
2. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengawasan Produk Tembakau
3. Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Produk Tembakau
4. Kajian Pengawasan Produk Tembakau
5. Lokakarya Internalisasi Penguatan Integritas BPOM dalam menghadapi Transformasi Pengawasan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik di Indonesia
6. Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Produk Tembakau

Agenda Strategis Tahun 2025

Seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terjadi perubahan signifikan dalam pengaturan dan kewenangan pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik. Perubahan ini mencakup perluasan kewenangan Badan POM dalam pengawasan kandungan produk, penggunaan bahan tambahan, serta pencantuman peringatan

kesehatan pada kemasan, dengan fokus utama pada perlindungan kesehatan masyarakat.

Salah satu perubahan penting adalah penghapusan iklan produk tembakau sebagai objek pengawasan, yang menandai pergeseran fokus pengawasan ke aspek-aspek lain yang juga krusial, diantaranya:

1. Pelaporan hasil pengujian kandungan kadar nikotin dan/atau tar pada produk tembakau dan rokok elektronik.
2. Pelaporan daftar kandungan dan/atau bahan tambahan yang dilarang dalam produk tersebut.
3. Pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau dan rokok elektronik.

Pencapaian Indeks Kepatuhan Industri Tembakau dalam Label dan Iklan pada tahun 2024 menjadi pertimbangan dalam penetapan target Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Produk Tembakau dan Rokok Elektronik pada Rencana Kerja Tahunan 2025. Untuk tahun 2025, terdapat perubahan dalam penetapan indikator kinerja yang semula berupa indeks menjadi Persentase Pelaku Usaha Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang Melaporkan Informasi Produk Sesuai Ketentuan, dengan target sebesar 57%.

SP3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat

Capaian SP3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat, disusun atas komponen 3 IKSP:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat;
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat
- 3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA

Sehingga nilai capaian SP3. akan sangat dipengaruhi oleh nilai capaian masing-masing IKSP penyusun tersebut.

Pada tahun 2024 Sasaran program “**Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat**” memiliki capaian kinerja sebesar **100,54%** termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis dengan baik (>100%).

Tabel 3. 15 Capaian IKSP Meningkatkan Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat Tahun 2024

SP3. Meningkatkan Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori capaian
1.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	96,5	97,09	100,61	Sangat Baik
2.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	86	85,15	99,01	Cukup
3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	92	93,84	102	Sangat Baik
Capaian SP 3				100,54	Sangat baik

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa IKSP Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat memperoleh capaian yang paling rendah dibandingkan dengan dua (2) IKSP lainnya. Namun secara keseluruhan, capaian total SP3 telah berhasil mencapai target (100%) dan memperoleh capaian hingga 100,54% dengan predikat **SANGAT BAIK**.

Berikut ini dijabarkan analisis penyebab keberhasilan keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk masing-masing IKSP penyusun SP 3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat, tersebut:

6. IKSP Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) merupakan IKSP Kinerja Utama (IKSP) BPOM pada level 0, sasaran strategis 3 yaitu Meningkatkan kepuasan pelaku usahadan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

Metodologi pengukuran menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dan konsep *Service Quality (ServQual)* meliputi aspek *reliability, assurance, responsiveness, empathy*, dan *tangible*. Pengukuran indeks dilakukan melalui survei dengan mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam 4 kategori jenis kegiatan berupa Pendampingan, Desk, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan (Apotek, RS, dll), Lainnya (ritel, stockiest, depot dll).

Pada tahun 2024, pengukuran IKEPU untuk komoditi Obat, melibatkan responden berdasarkan kategori pelaku usaha, sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Pengukuran IKEPU untuk komoditi Obat

Komoditi	Produsen	Distribut r	Importir	Eksportir	Pelayanan	Lainnya
Obat	1877	1913	281	68	1444	46

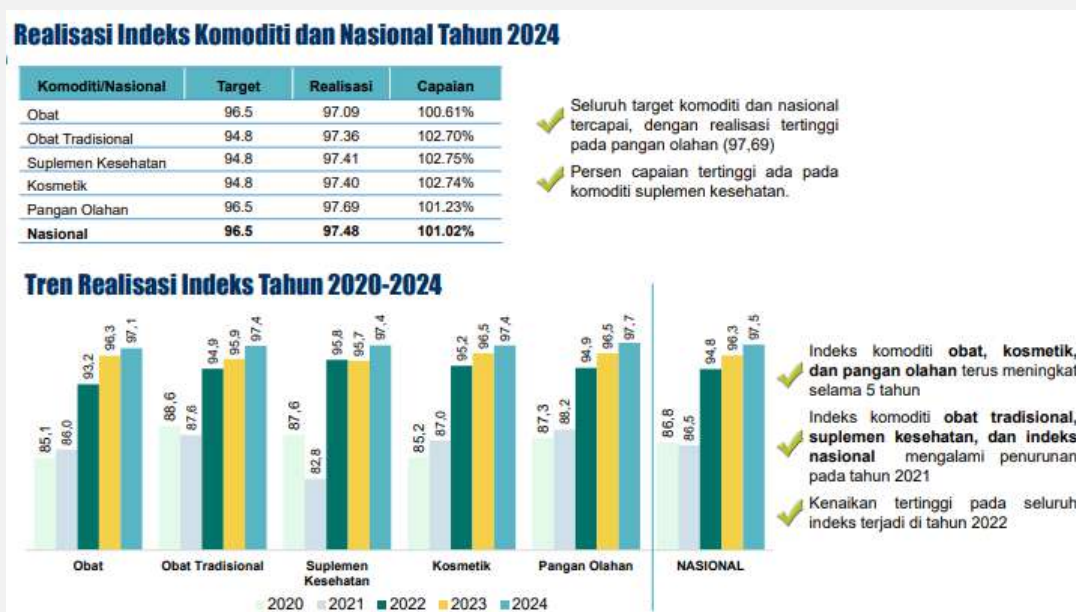
Nilai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) tahun 2024 untuk komoditi Obat pada level 1 Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA, disusun dari hasil pengukuran IKEPU dari 5 unit dibawahnya, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Nilai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) tahun 2024

No.	Unit Penyelenggara KPB	Target	Realisasi	Capaian (%)	Jumlah KPB	Jumlah responden
1.	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	96,5	95,07	98,52	7	1660
2.	Direktorat Registrasi Obat	96,5	95,95	99,43	11	230
3.	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	96,5	96,42	99,92	10	366
4.	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	96,5	95,43	98,89	16	1458
5.	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	96,5	97,24	100,77	11	162

Komoditi/Nasional	Target	Realisasi	Capaian
Obat	96.5	97.09	100.61%

adalah sebesar 97,09 (capaian 100,61% dibanding target 96,5) dengan kategori capaian **SANGAT BAIK**.



Tabel 3. 18 Perbandingan capaian indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU)

Terlihat kenaikan yang signifikan realisasi indeks untuk komoditi obat pada 5 tahun mulai dari 2020-2024. Beberapa Faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP ini, antara lain:

1. Kegiatan Desk/Bimbingan Teknis/ Sosialisasi sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha sehingga antusias pelaku usaha untuk IKSP serta dan berperan aktif dalam kegiatan ini sangat tinggi.
2. Materi dan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha
3. Dukungan sumberdaya berupa anggaran untuk dapat terlaksananya kegiatan dengan intensitas yang cukup menjawab kebutuhan pelaku usaha.
4. Telah dilakukannya inovasi atau perbaikan untuk mengatasi isu kecukupan waktu, layanan pasca KBP, video/infografis materi, media komunikasi dengan pelaku usaha, Teknik komunikasi sesuai karakteristik pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat literasi, dan cakupan pelaku usaha yang mendapatkan KBP (Konsultasi Bimbingan dan Pembinaan).



Gambar 3. 11 FGD Kolaborasi Stakeholder dalam Menjaga Ketersediaan dan Mencegah Penyalahgunaan Obat di Fasilitas Distribusi, Pelayanan Kefarmasian dan Masyarakat tanggal 31 Oktober 2024

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja diantaranya:

- 1) Asistensi regulatori terhadap hilirisasi hasil riset obat
 - a) Desk konsultasi registrasi obat
 - b) Pendampingan pemenuhan CPOB UTD dalam rangka percepatan penyiapan industri fraksionasi plasma
 - c) Asistensi regulatori terhadap industri farmasi bahan baku obat termasuk fasilitas produksi bahan tambahan obat *pharmaceutical grade*
- 2) Pendampingan terprogram untuk PBF baru melalui kegiatan SMART CDOB dan PBF penyalur Bahan Obat melalui SMART CDOB dan Fasyanfar Series
- 3) Intensifikasi pelayanan publik pengawasan pre dan post market iklan/penandaan obat melalui desk konsultasi dan bimbingan teknis.
- 4) Desk konsultasi registrasi obat dalam upaya percepatan registrasi obat
- 5) Forum komunikasi lintas sektor dalam perkuatan pengawasan pre market

Rekomendasi peningkatan IKSP:

Secara kuantitatif kepuasan pelaku usaha terhadap kegiatan bimbingan dan pembinaan yang diselenggarakan BPOM berada di level sangat puas. Unit tetap akan mencermati data kualitatif berupa saran/keluhan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kualitas Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP) dan perbaikan pelayanan BPOM.

PUSAKOM sebagai unit pengampu pengukuran IKSP, merekomendasikan Unit Penyelenggara KBP untuk:

1. melakukan inventarisasi, mengevaluasi, dan menindaklanjuti saran/keluhan responden sesuai dengan skala prioritas.
2. menindaklanjuti saran/keluhan responden sesuai dengan skala prioritas.
3. keterbatasan SDM dan sumber daya lain menyebabkan frekuensi dan durasi KBP belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi pelaku usaha, maka perlu melakukan inovasi terutama pembuatan video materi tematik dan optimalisasi media komunikasi dengan pelaku usaha.
4. mengoptimalkan Youtube BPOM untuk menyebarluaskan video materi bimbingan dan pembinaan pelaku usaha.
5. meningkatkan cakupan pelaku usaha peserta KBP.
6. menerapkan teknik komunikasi sesuai karakteristik dan tingkat literasi pelaku usaha.

7. IKSP. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat

Kedeputan Bidang Pengawasan Obat, NPPZA telah melakukan berbagai upaya pengawasan Obat untuk memberikan jaminan keamanan Obat serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan program pengawasan yang dilakukan oleh diukur dari dampaknya terhadap masyarakat, salah satunya dari kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM. Kepuasan masyarakat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Pengukuran ini yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PUSAKOM) BPOM.

Untuk mengukur keberhasilan program dan capaian target kinerja BPOM secara sistematis dan scientific based. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melakukan pengukuran dua indikator kinerja utama (IKU) BPOM level 0 pada sasaran strategis 2 dan 3 yaitu: 1) indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, dan 2) indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan

Obat dan Makanan. Kedua pengukuran indikator tersebut diintegrasikan dalam satu pengukuran agar lebih efektif dan efisien.

Pengukuran menggunakan metode kuantitatif dengan desain potong lintang (*cross sectional*) dan non-intervensi melalui survei di 34 Provinsi (sampel termasuk Provinsi baru di Papua). Kriteria inklusi responden adalah anggota rumah tangga berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta menggunakan Obat dan Makanan. Jumlah responden sebanyak 20.620 rumah tangga dengan margin of error 7% (merekpresentasikan provinsi) dan 1% (merekpresentasikan nasional). Metode sampling yang digunakan adalah sampling tiga tahap berstrata (*stratified three stage sampling*) dengan memilih blok sensus dan strata perkotaan/perdesaan di setiap Provinsi/UPT selanjutnya memilih rumah tangga secara *systematic sampling* dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga dan memilih responden eligible di setiap rumah tangga. Pemilihan metode sampling ini dilakukan agar hasil indeks merepresentasikan data indeks secara Nasional, Provinsi dan UPT serta menggambarkan kondisi riil masyarakat Indonesia. Pengembangan metode dan desain sampel dilakukan bersama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS). Masyarakat yang dimaksud dalam survei ini adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang merupakan lingkup pengawasan BPOM. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur melalui wawancara tatap muka dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yang berbasis offline dan online. Waktu pengumpulan data mulai Juli sampai September 2024.

Demografi Responden

Jumlah capaian responden sebanyak 20.610 yang merepresentasikan sejumlah 187.676.223 penduduk dewasa Indonesia yang berusia 17 - 65 tahun (Proyeksi Penduduk 2024 - BPS) dengan response rate 99,95%. Responden terpilih mewakili 60,19% wilayah urban/perkotaan dan 39,81% rural/perdesaan. Karakteristik responden terdiri dari 50,57% laki-laki dan 49,43% perempuan dengan mayoritas berada pada rentang usia 36-50 tahun (34,46%). Tingkat pendidikan responden terbanyak yaitu SLTA/ sederajat (45,07%). Sedangkan jenis pekerjaan responden 3 (tiga) terbanyak adalah Ibu Rumah Tangga (29,65%), Pegawai/Karyawan (23,45%), dan Wiraswasta (21,82%). Sejumlah 77,81% masyarakat mengetahui BPOM/Balai/Loka

POM sebagai lembaga pengawas Obat dan Makanan, nilai ini meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 6,68 poin. Sumber perolehan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui informasi keamanan Obat dan Makanan paling banyak diperoleh melalui iklan televisi (55,94%), kemasan/label produk (54,00%), iklan di media sosial (23,94 %) dan rekomendasi teman/kerabat/saudara/keluarga sebesar 20,73%. (Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, 2024)

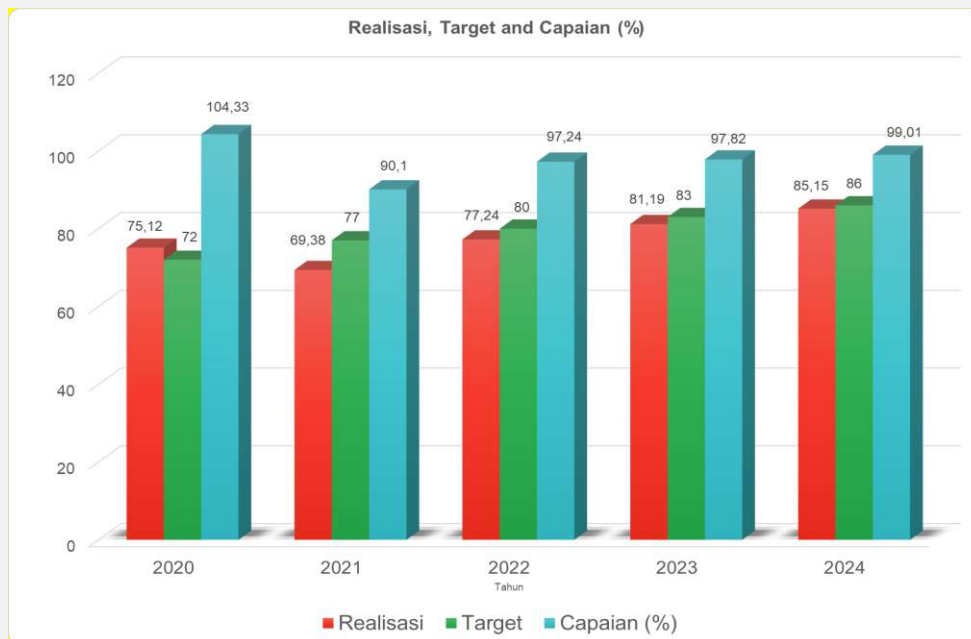
Berikut ini merupakan target, realisasi dan capaian indikator “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan obat” untuk Kedeputian 1 tahun 2024:

Tabel 3. 19 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan obat Kedeputian 1 Tahun 2024

SP... Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat	86	85,15	99,01	Cukup
Capaian SP 4					

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja untuk indikator ini **belum mencapai 100%**. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan obat tahun 2024 adalah sebesar **85,15** (capaian 99,01% dibanding target) dengan kategori capaian **CUKUP**.

Selanjutnya, apabila dilakukan perbandingan dengan tahun 2020-2024, terlihat tabel seperti dibawah ini:



Grafik 3. 3 Grafik Perbandingan Realisasi, Target, dan Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2021, realisasi indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan walaupun, realisasi indikator ini cenderung memberikan pola meningkat sejak 2021-2024. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan Kedeputian lain dan tingkat nasional, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 20 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional dan Komoditi

No	Komoditi/Nasional	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2024	Persen Capaian 2024	Kenaikan dari Tahun 2023
1	Obat	81,19	85,15	86	99,01%	3,96
2	Obat Tradisional	79,69	83,03	80	103,79%	3,34
3	Suplemen Kesehatan	79,93	83,13	80	103,91%	3,20
4	Kosmetik	80,07	83,37	80	104,22%	3,30
5	Pangan Olahan	80,67	84,29	81	104,07%	3,62
Nasional		80,45	83,97	83	101,17%	3,52

Tabel 3.20 menunjukkan bahwa, persentase capaian Kedeputian 1 memiliki nilai paling rendah bila dibandingkan dengan capaian kedeputian lain dan nasional. Namun, sebaliknya, dari segi realisasi, Kedeputian 1 berhasil meraih nilai yang paling tinggi. Hal tentunya disebabkan karena target yang ditetapkan di Kedeputian 1 lebih tinggi dibanding target nasional dan target kedeputian lain. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan belum tercapainya indikator ini yaitu karena adanya kasus cemaran etilen

glikol dan dietilen glikol (EGDEG) pada tahun 2022 yang memberikan efek hingga pada pengukuran tahun di 2024. Hal ini membuat persepsi Masyarakat kepada BPOM yang mengawal obat aman dan bermutu menurun. Berbagai upaya strategi komunikasi dilakukan untuk menahan isu-isu dan *hoax* yang muncul di Masyarakat.

Rekomendasi untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan bagi unit kerja terkait:

1. Meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan secara umum, terutama pemberian informasi kepada masyarakat, peningkatan frekuensi pengawasan dan penindakan di area rural dan perbatasan melalui pengawasan berbasis komunitas dan meningkatkan penindakan produk ilegal di pasar offline dan online.
2. Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media.
3. Meningkatkan kerja sama dengan media dalam publikasi aktivitas pengawasan Obat dan Makanan.
4. Meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja.
5. Menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dalam mempromosikan BPOM dan menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen.

(Pusat Analis Kebijakan Obat dan Makanan, 2024)

Kepuasan Masyarakat tersebut diukur baik secara langsung maupun tidak langsung. Indeks kepuasan yang diukur secara langsung yaitu dilihat sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*). Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BPOM harus ringkas, menarik, dan *up to date* serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap waktu untuk menangkal informasi sampah/*hoax* yang banyak beredar di masyarakat. Badan POM baru saja mengeluarkan *tagline* baru yaitu **KATA BPOM** untuk menangkal berbagai isu negatif dan Hoax yang beredar di masyarakat.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang kedua yaitu melalui pengukuran IKSP tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan

(*reliability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*empathy*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Peningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan BPOM melalui kegiatan *public relation* dan publikasi (liputan media massa) berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti razia obat dan makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat.
- 2) Intensifikasi program KIE kepada masyarakat dengan bentuk program yang dipahami oleh masyarakat.
- 3) Memberikan dorongan kepada UPT di daerah untuk mensosialisasikan hasil pengawasan secara inovatif sesuai dengan keunikan daerah masing masing sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.
- 4) Konsisten memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk-produk yang berbahaya
- 5) Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- 6) Aktif memberikan informasi kepada masyarakat terutama terkait bahaya produk ilegal (tidak memiliki izin edar) terhadap dampak Kesehatan jangka panjang melalui liputan TV, Radio dan Media sosial.

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Peningkatan akses dan ketersediaan obat dan vaksin, melalui:
 - a. Intensifikasi Penilaian/Evaluasi sesuai *Good Review Practices*
 - b. Peningkatan pelayanan publik melalui Desk Registrasi Obat dan kolaborasi pemerintah serta pelaku usaha di bidang ekspor impor obat
 - c. Forum komunikasi lintas sektor dan pelaku usaha di bidang obat
2. Desk Konsultasi CAPA Sertifikasi CDOB sebagai asistensi regulatory dalam rangka meningkatkan kemandirian balai dan pelaku usaha

8. IKSP. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

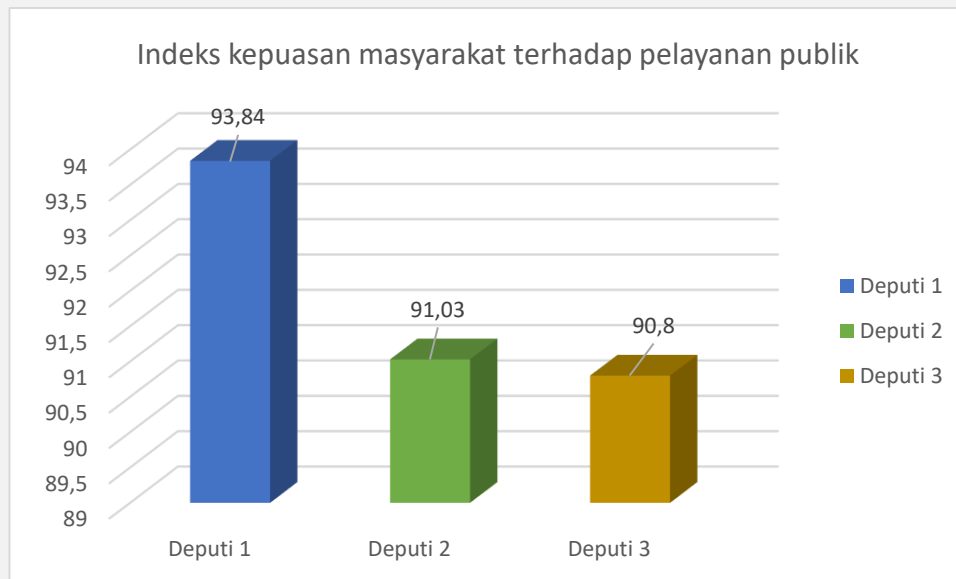
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat selaku penerima layanan publik Badan POM dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan POM, secara khusus di Kedeputan Bidang Pengawasan Obat, NPPZA. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman terkini yang disiapkan Inspektorat Utama (saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Tabel 3. 21 Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024

IKSP	Realisasi					Target Akhir Periode Renstra
	2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	85,21	89,11	89,94	90,03	93,84	90

Nilai realisasi sebesar 93,84 (capaian 102%) ini telah melampaui target tahun 2024 yang ditetapkan yaitu target 92 serta melampaui target akhir periode Renstra (92).

Perbandingan realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dibandingkan dengan Deputi 2 dan 3, dapat dilihat pada gravik berikut ini:



Dari grafik di atas disimpulkan bahwa realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi 1 memperoleh angka tertinggi diantara Deputi 2 dan 3 di angka 93,84.

Keberhasilan pencapaian IKSP ini didukung oleh berbagai faktor penunjang diantaranya:

1. Sumber daya manusia (Petugas Yanblik) yang kompeten
2. Sarana dan prasarana yang memadai
3. Respon cepat dari petugas pelayanan publik
4. Jangka waktu pengajuan permohonan yang lebih singkat
5. Konsultasi yang dapat dilakukan secara langsung, maupun tidak langsung (daring)
6. Pelayanan yang transparan dan sesuai dengan peraturan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja:

1. Pelatihan Pelayanan Publik yang diselenggarakan untuk melatih kompetensi para petugas pelayanan publik, dan kegiatan ini rutin dilakukan tiap tahun
2. Pemeliharaan sarpras di gedung pelayanan publik yang dilakukan rutin
3. Melaksanakan forum komunikasi/konsultasi publik untuk mendapatkan masukan, saran, dan kritik dari penerima layanan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan

4. Penataan dokumen atau pengarsipan yang baik agar tersimpan dengan aman dan mempermudah serta mempercepat pencarian kembali dokumen pengaduan masyarakat bila sewaktu-waktu diperlukan.
5. Asistensi Regulatori terhadap pelaku usaha

SP4 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat

9. IKSP. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pengawasan Obat

Kebijakan Pengawasan Obat harus berkualitas karena obat memiliki peran yang sangat krusial dan penting dalam kesehatan masyarakat. Pengawasan yang baik memastikan bahwa obat yang beredar di pasaran aman, berkhasiat, dan bermutu. Kebijakan pengawasan Obat harus berkualitas karena sangat menentukan keamanan masyarakat, menghindari peredaran obat yang berbahaya, palsu, atau tidak memenuhi standar, mencegah penyalahgunaan dan resistensi Obat, dan sesuai dengan Regulasi Internasional. Tanpa kebijakan pengawasan obat yang berkualitas, masyarakat berisiko terpapar obat yang tidak aman, tidak efektif, dan bahkan berbahaya. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan obat harus menjadi prioritas dalam sistem kesehatan.

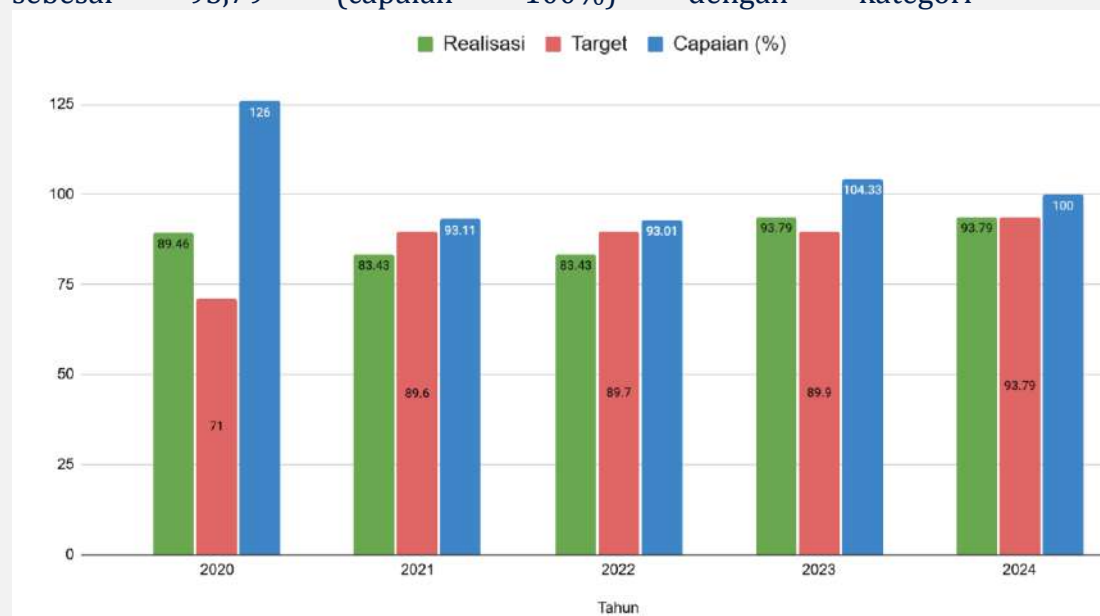
Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. BPOM harus mampu memastikan kualitas kebijakan yang disusun tersebut berjalan secara optimal, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal/stakeholder BPOM. Dengan kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Sasaran program **“Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat”** diturunkan menjadi IKSP indeks kualitas kebijakan obat yang dilakukan penilaiannya oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pada tahun 2024, tidak dilaksanakan penilaian IKK oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), sehingga pada tahun 2024, data capaian IKK berdasarkan hasil penilaian IKK tahun 2023 oleh LAN sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Capaian IKSP Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat

SP4 Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	93,79	93,79	100	Baik
Capaian SP 4				100	Baik

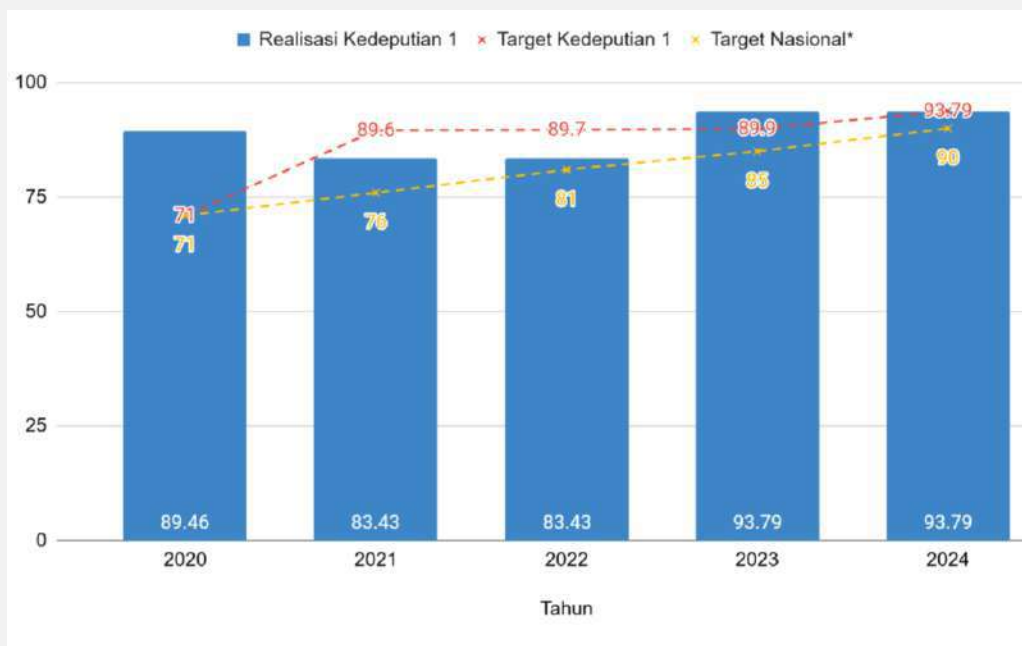
Pada tahun 2023, Berdasarkan validasi akhir Tim Nasional IKK dan Board Member Meeting IKK terhadap hasil *self assessment* kebijakan yang menjadi objek pengukuran IKK pada kedeputan 1 terhadap kebijakan “PerBPOM No.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit” diperoleh hasil penilaian sebesar 93,79 (capaian 100%) dengan kategori Baik.



Grafik 3. 4 Grafik Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tahun 2020-2024

Pengukuran IKK dilakukan pada periode 2 tahun sekali sehingga realisasi pada tahun yang tidak dilakukan pengukuran menggunakan data pada tahun sebelumnya. Secara umum, realisasi untuk indikator ini cenderung meningkat hingga periode akhir Renstra (2024). Adapun realisasi tertinggi tercapai pada tahun 2023/2024 yaitu sebesar 93,79 dengan capaian 100%.

Selanjutnya, untuk melihat performa kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA dibandingkan dengan target nasional, berikut ini ditampilkan grafik perbandingannya:



Grafik 3. 5 Grafik Perbandingan Realisasi, Target Kedeputan 1 vs Target Nasional Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2020-2024

Pada tabel diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk IKK di bidang obat mampu mencapai target nasional pada tahun 2020-2024. Sedangkan pada tahun 2021-2022 terlihat target yang ditetapkan untuk Kedeputan 1 tidak tercapai. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terdapat penyesuaian terhadap tools IKK yang baru pada saat itu.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan Kedeputan lain di BPOM, berikut hasil realisasi dan capaian IKK Kedeputan 1 bila dibandingkan sesama kedeputan lain di BPOM:

No	Nama Kebijakan	IKK*	Kategori
1	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	80.82	Sangat Baik
2	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan	85.68	Sangat Baik
3	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik	89.93	Sangat Baik
4	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit	93.79	Unggul
Nilai IKK Instansi		88.05	Sangat Baik

**Nilai pembulatan dengan 2 (dua) angka desimal, dapat terkoreksi +/- 0,01 poin.*

Tabel 3. 23 Perbandingan Capaian IKK Kedeputan 1 dibandingkan Kedeputan Lain di BPOM tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi Kedeputian 1 berhasil memperoleh predikat “Unggul” dibandingkan kedeputian lain di BPOM. Hal ini tentunya didukung oleh beberapa faktor penunjang diantaranya:

- 1) Penyusunan dan eksekusi pelaksanaan survei peraturan perundang-undangan sesuai dengan timeline yang telah disepakati
- 2) tersedianya data base penyusunan regulasi obat yang telah terdokumentasi dengan baik
- 3) melakukan kajian terhadap pemilihan perUU yang akan disurvei
- 4) koordinasi yang baik antar lintas unit di kedeputian 1 sehingga proses pengumpulan data dukung dapat terselesaikan dengan baik
- 5) adanya koordinasi intensif bersama tim Hukor dan Pusakom dalam kegiatan pembahasan persiapan penilaian IKK
- 6) proses penyusunan dan monitoring evaluasi implementasi kebijakan telah dilakukan dengan hasil memuaskan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:

- 1) Pelatihan teknis mengenai IKK
- 2) Rapat pembahasan intensif bersama dengan tim LAN
- 3) Rapat internal untuk perencanaan dan persiapan data dukung
- 4) Terselenggaranya survei efektivitas peraturan perundang-undangan tahun 2023

Berdasarkan hasil kinerja dan analisa program penunjang pencapaian kinerja, perlu dilakukan training berkesinambungan terkait materi IKK, pelaksanaan kegiatan monitoring dan implementasi peraturan perundang-undangan di bidang obat baik melalui kegiatan *Focus Group Discussion* ataupun dengan survei implementasi kebijakan dan perlu dilaksanakan rapat intensif untuk persiapan data dukung baik di lingkup internal maupun eksternal BPOM. Hasil pengukuran indeks IKK yang telah jauh memenuhi target ini dapat dijadikan dasar untuk peningkatan target di masa yang akan datang.

SP5 Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat

Capaian SP-5 disusun atas komponen 5 IKSP: (1) Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat; (2) Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu; (3) Indeks pelayanan publik di bidang Obat; (4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan

obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor dan (5) Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Sehingga nilai capaian SP-5 akan sangat dipengaruhi oleh nilai capaian masing-masing IKSP penyusun tersebut.

Sasaran program “**Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat**” memiliki capaian kinerja sebesar 102,74% termasuk dalam kategori Sangat Baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis dengan baik (>100%).

Tabel 3. 24 Capaian IKSP pada Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat

SP5 Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Presentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98	96,32	98,29	Cukup
2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82	91,63	111,74	Sangat Baik
3	Indeks pelayanan publik di bidang Obat	4,7	4,87	103,62	Sangat Baik
4	Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	92,1	87,76	95,29	Cukup
5	Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	93,9	98,36	104,75	Sangat baik
Capaian SP 5				102,74	Sangat Baik

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk SP5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat pada tahun 2024 telah berhasil memperoleh capaian sebesar **102,74%** dengan kategori capaian **SANGAT BAIK**.

Berikut ini dijabarkan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk masing-masing IKSP penyusun **SP5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat**, tersebut:

10. IKSP. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sebagai salah satu bentuk pengawasan post-market Obat dan Makanan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia sebagai lini terdepan Badan POM melakukan sampling dan pengujian dalam rangka pengawalan mutu Obat dan Makanan beredar. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan berdasarkan pada analisis risiko dan keterwakilan produk yang beredar. Selanjutnya Pengawas melakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium untuk memastikan produk Obat dan Makanan memenuhi standar/kesesuaian mutu dan label. IKSP “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” merupakan IKSP baru pada tahun 2020.

Tabel 3. 25 Capaian Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020-2024

IKSP	Realisasi					Target Akhir Periode Renstra
	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,42	95,99	97,63	96,28	96,32	98

Nilai realisasi sebesar 96,32 (capaian 98,29%) ini tidak dapat melampaui target tahun 2024 yang ditetapkan yaitu target 98, meskipun begitu, jika dibandingkan dengan Kedeputan 2 dan 3, nilai realisasi indikator ini merupakan yang tertinggi sesuai pada table di bawah ini:

Persentase obat/OTSKK/Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	
Deputi 1	96,32
Deputi 2	90,68
Deputi 3	87,82

Tabel. Perbandingan realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tiap komoditas

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja tersebut diantaranya telah dilakukan pengawasan intensif mutu obat yang beredar termasuk didalamnya integrasi pengawasan bersama yang komprehensif antara unit-unit pre dan post market terkait penyelarasan standar maupun tindak lanjut temuan, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sampling dan Pengujian Obat oleh UPT POM yang didalamnya mencakup diskusi tantangan dan observasi saat di lapangan sehingga berdampak terhadap optimalisasi hasil pengawasan mutu obat beredar, akan tetapi masih belum mendapatkan hasil yang optimal.

Telah dilakukan analisis penyebab tidak tercapainya indikator:

1. Perbedaan pemahaman petugas sampling terhadap ketentuan pada Pedoman Sampling dan Pengujian,
2. Perubahan personel penanggung jawab sampling di UPT BPOM,
3. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait (Kementerian Kesehatan, BKBN) terkait implementasi Pedoman Sampling dan Pengujian ONPPZA,

Upaya yang dilakukan untuk perbaikan kinerja berikutnya adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder antara lain Kementerian Kesehatan serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN terkait kebijakan pengawasan keamanan dan mutu obat beredar yang telah didukung dengan adanya Nota Kesepahaman.
2. Peningkatan kompetensi petugas sampling UPT BPOM seluruh Indonesia melalui pembelajaran Modul e-Learning Pedoman Sampling,
3. Mengoptimalkan penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) bagi industri farmasi

11. IKSP. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Nilai persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor didapatkan dari total rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha maupun lintas sektor selama satu tahun dibandingkan dengan total rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan.

Tabel 3. 26 Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Tahun 2020-2024

IKSP	Realisasi					Target Akhir Periode Renstra
	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	74,68	75	76,74	81,77	91,63	82

Pada tahun 2024 nilai persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor adalah sebesar 91,63 dengan capaian 111,74% dibandingkan dengan target 2023 dan kategori capaian SANGAT BAIK.

Faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP:

1. Kepatuhan pelaku usaha dalam merespons tindak lanjut hasil pengawasan.
2. Koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga terkait.
3. Adanya sinergisme antara Badan POM dengan lintas sektor terkait.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah:

1. Melakukan pertemuan Forum Komunikasi Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, Forum ini bertujuan untuk menyeleraskan pandangan dan membangun sinergitas antara unit pusat di BPOM dengan UPT serta lintas sektor terkait untuk menjawab permasalahan dan kendala yang ada dalam pengawasan obat, khususnya di Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.
2. Pelaksanaan *Joint Inspection* bersama Kementerian Pertanian dalam rangka program pengendalian resistensi antimikroba (AMR)

Pemeriksaan bersama (*joint inspection*) antara Badan POM dan Kementerian Pertanian dilaksanakan dalam rangka mengawal integritas peredaran obat dan bahan obat di sektor kesehatan manusia dan kesehatan hewan termasuk dalam pengendalian resistensi antimikroba. Kolaborasi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin ganda (izin di sektor kesehatan manusia dan hewan) atau berpotensi mengelola produk beririsasi yang dapat digunakan pada

kesehatan manusia dan hewan. Sejak tahun 2021 hingga 2024, di level pusat maupun UPT telah dilaksanakan *joint inspection* dimaksud dan terhadap pelaku usaha diberikan sanksi administratif oleh masing-masing sektor sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjaga konsistensi pelaksanaannya baik di level pusat dan UPT, telah disusun dan diterbitkan Pedoman Pemeriksaan Bersama Rantai Distribusi Antimikroba Antara Sektor Kesehatan Manusia dan Hewan.



Gambar 3. 12. Dokumentasi Kegiatan *Joint Inspection* Badan POM dan Kementerian Pertanian

3. Diseminasi Regulasi dan Orientasi Pelaporan Obat dan Bahan Obat Pemasukan Jalur Khusus (*Special Access Scheme/SAS*) kepada *Stakeholder*

Penyelenggaraan kegiatan diseminasi ini dilatarbelakangi oleh hasil pengawasan pengelolaan obat dan bahan obat SAS serta monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan pelaporan kegiatan pengelolaan obat dan bahan obat SAS kepada BPOM melalui aplikasi e-was.

Berdasarkan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi, diketahui bahwa tingkat kepatuhan pelaporan kegiatan pengelolaan obat dan bahan obat SAS melalui aplikasi e-was oleh pelaku usaha masih dibawah 50%.

Rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelaporan kegiatan pengelolaan obat dan bahan obat SAS terindikasi disebabkan oleh ketidaktahuan fasilitas pengelola mengenai kewajiban pelaporan dan keterbatasan informasi mengenai tata cara pelaporan melalui aplikasi e-was, sehingga diperlukan upaya konkrit untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan secara

tertib sesuai regulasi yang berlaku. Pada tahun 2024, kegiatan Diseminasi Regulasi dan Orientasi Pelaporan Obat dan Bahan Obat Pemasukan Jalur Khusus (*Special Access Scheme/SAS*) kepada *Stakeholder* diselenggarakan di 3 (tiga) wilayah berbeda, yaitu Solo (08 Juli 2024), Surabaya (13 Desember 2024), dan Bandung (20 Desember 2024).



Gambar 3. 13 Dokumentasi Diseminasi SAS di Wilayah Solo





Gambar 3. 14 Dokumentasi Diseminasi SAS di Wilayah Surabaya



Gambar 3. 15 Dokumentasi Diseminasi SAS di Wilayah Bandung

12. IKSP. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat

Penilaian IPP terhadap Unit Kerja dilakukan secara internal oleh Biro Hukor BPOM dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil penilaian IPP di lingkungan ke deputian 1 dilakukan terhadap 4 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) dengan hasil sebagai Berikut:

Tabel 3. 27 Indeks Pelayanan Publik Unit Teknis Kedeputian 1

Unit	Nilai IPP
Dit. Registrasi Obat	4,87
Dit. Pengawasan KMEI ONPPZA	4,87
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	4,94
Dit. Pengawasan Produksi ONPP	4,92
Deputi 1	4,87

Nilai realisasi sebesar 4,87 (capaian 103,62%) ini telah dapat melampaui target tahun 2024 yang ditetapkan yaitu target 4,7 dengan kategori SANGAT BAIK.

Keberhasilan tercapainya IKSP Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat didukung oleh beberapa faktor pendukung, yaitu dengan dilakukan pemutakhiran standar pelayanan di masing-masing unit pelayanan publik dan dipublikasikan di berbagai media, kemudahan akses konsultasi pelayanan publik baik secara *online* maupun tatap muka, kemudahan akses sistem informasi pelayanan publik diantaranya adalah e-sertifikasi, sertifikasi-cpob, siapik, e-bpom, exim.pom.go.id, e-reg, dan banyaknya inovasi pelayanan publik yang dilakukan terutama dalam peningkatan fitur aplikasi dan pendampingan pelayanan, dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Berikut ini dapat dijabarkan beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan oleh unit-unit kerja ke deputian I dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Obat dan NAPPZA melalui kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha dengan telah dilaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) kepada pelaku usaha secara berkala oleh tiap unit pelayanan publik, diantaranya FKP Layanan Sertifikasi CDOB yang dilakukan pada 30 Juni 2024 di Jakarta, Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA pada tanggal 28-

29 Mei 2024, Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Direktorat Registrasi Obat tanggal 31 Mei 2024 di Yogyakarta.

- 2) Kegiatan Intensifikasi pelayanan publik pengawasan pre dan post market iklan/penandaan obat melalui desk konsultasi sebagai langkah percepatan pelayanan publik dalam pengawasan *post-market* terhadap industri farmasi iklan dan penandaan Obat Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).
- 3) Intensifikasi Asistensi Regulatory Obat yang diikuti oleh seluruh unit di Kedeputan 1 dalam rangka pendampingan proses sertifikasi dan registrasi obat yang dilaksanakan di Medan pada 3 - 4 Oktober 2024
- 4) Forum Koordinasi Sertifikasi CDOB sebagai wadah komunikasi dan peningkatan kompetensi inspektur pelaksana sertifikasi CDOB yang dilaksanakan di kantor BPOM Pusat pada 25 - 26 November 2024
- 5) Dialog harmonis lintas sektor sinergisme stakeholder mewujudkan obat generik berkualitas 09-12 Juli 2024
- 6) Pelatihan petugas pelayanan publik registrasi obat 23-24 September 2024, training pengembangan diri petugas pelayanan publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP tanggal 11 - 12 Juni 2024 di Jakarta.



Gambar 3. 16 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat

13.IKSP. Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu

Pelayanan publik di bidang obat merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan ketersediaan, keamanan, mutu, dan manfaat obat bagi masyarakat. Tingkat keberhasilan pelayanan publik yang efisien dan efektif dapat diukur melalui ketepatan waktu dalam penyelesaian layanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja, persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu ini menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam *Service Level Agreement* (SLA).

Ketepatan waktu pelayanan publik adalah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan untuk memenuhi salah satu atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik merupakan perbandingan jumlah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang memenuhi waktu dengan jumlah pengajuan pelayanan oleh masyarakat/pelanggan.

Ketepatan waktu pelayanan publik diukur berdasarkan Peraturan Badan POM tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Dengan adanya standar ketepatan waktu pelayanan publik ini, dimaksudkan dapat sebagai acuan atas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat telah dilakukan secara efisien, tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Layanan Publik yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA meliputi: 1) Registrasi obat; 2) Evaluasi pengembangan obat; 3) Penilaian sarana produksi obat; 4) Penilaian sarana distribusi obat; 5) Surat Keterangan Impor Obat; 6) Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) Obat dan Bahan Obat; 7) Penerbitan Analisa Hasil Pengawasan (AHP) dalam rangka Ekspor dan Impor narkotika, psikotropika dan prekursor; dan 8) Penerbitan persetujuan iklan dan penandaan obat.

Penilaian Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu pada Deputi Bidang Pengawasan Keamanan, Mutu dan ekspor

Impor Obat dan NAPPZA diukur berdasarkan rata-rata hasil pencapaian unit, yaitu : 1.) Direktorat Registrasi Obat; 2.) Direktorat Pengawasan Produksi ONPP; 3.) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP; dan 4.) Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA

Penilaian Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2024 adalah sebesar 87,76 dengan capaian 95,29% dibandingkan target 2023 sebesar 92,05 dan kategori capaian **CUKUP**.

Tabel 3. 28 Capaian Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024

IKSP	Realisasi					Target Akhir Periode Renstra
	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu	84,71	82,44	86,68	92,05	87,76	92,10

Jika dilihat berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat capaian atas indikator kinerja Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2024 belum mencapai target tahun 2024 (92,1) bahkan mengalami penurunan sebesar 4,29 poin dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023.

Program kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian indikator ini antara lain:

1. Pelaksanaan desk registrasi obat registrasi obat dalam rangka percepatan penyelesaian registrasi obat ;
2. Forum Komunikasi dan dialog lintas sektoral untuk mewujudkan obat generik yang aman dan bermutu;
3. Monitoring dan evaluasi ketepatan waktu dilakukan secara ketat
4. Asistensi regulatori kepada pelaku usaha;

Adapun kendala yang dihadapi sehingga menyebabkan tidak tercapainya target secara optimal adalah:

1. Adanya peningkatan jumlah pengajuan persetujuan iklan obat sehubungan dengan beberapa hal diantaranya :
 - a.) meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana publikasi iklan obat oleh industri farmasi pemilik izin edar;
 - b.) perlunya pelaksanaan intensifikasi tindak lanjut pengawasan dan desk konsultasi yang dilakukan oleh Badan POM kepada industri farmasi pelaku pelanggaran publikasi iklan obat tanpa persetujuan Badan POM dalam melakukan pendaftaran persetujuan iklan obat tersebut.
2. Masih banyaknya pengajuan persetujuan iklan yang harus diterbitkan tambahan data secara berulang sehingga menambah waktu evaluasi.
3. Pelaksanaan desk dalam rangka asistensi regulatori sertifikasi CPOB dan evaluasi pemenuhan CPOB obat impor yang efektif
4. Persepsi yang sama antara manajemen di BPOM Pusat dengan UPT dalam menyelesaikan layanan secara tepat waktu.

Sebagai tindak lanjut perbaikan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, berikut ini beberapa rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan pada periode berikutnya, yaitu:

1. Pelaksanaan intensifikasi pelayanan publik guna percepatan penyelesaian pengajuan persetujuan iklan obat;
2. Penyelenggaraan sosialisasi, *asistensi regulatori* maupun bimbingan teknis dan *desk* konsultasi guna meningkatkan pemahaman ketentuan dan persyaratan layanan publik persetujuan iklan obat;
3. Refreshment dan penyamaan persepsi antar evaluator iklan obat sehingga dapat mempercepat proses evaluasi permohonan persetujuan iklan obat.

Namun dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) Obat dan Bahan Obat, serta penerbitan Analisa Hasil Pengawasan (AHP) dalam rangka Ekspor dan Impor narkotika, psikotropika dan prekursor menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja. Hal ini didukung oleh beberapa faktor pendukung, yaitu :

1. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha setelah dilakukan *on-site*/pengawasan dalam pemenuhan persyaratan pemasukan obat/bahan obat melalui Surat Keterangan Impor (SKI) maupun AHP;
2. Dukungan sarana prasarana dalam menjalankan pelayanan publik antara lain telah selesainya pengembangan website AHP yang baru. Proses pengajuan serta evaluasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien;
3. Kegiatan coaching maupun Forum Komunikasi Publik yang rutin dilaksanakan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA untuk mengurangi *gap* pemahaman pelaku usaha terkait regulasi maupun sistem pada pengajuan Surat Keterangan Impor/Analisis Hasil Pengawasan; dan
4. Tingginya tingkat Komitmen petugas (evaluator hingga perekomendasi) dalam menyelesaikan dokumen sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dan responsivitas dalam menjawab konsultasi melalui berbagai kanal.

Beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan dari pencapaian indikator kinerja Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu, yaitu :

1. Verifikasi kesesuaian importasi di gudang importir dilaksanakan berdasarkan Surat Keterangan Importasi (SKI) vaksin impor yang diterbitkan Direktorat Pengawasan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA serta Special Access Scheme (SAS) Vaksin Impor yang Direktorat Registrasi Obat.
2. Pemeriksaan On-site dalam rangka impor dan ekspor, narkotika, psikotropika dan prekursor dalam rangka verifikasi realisasi impor obat dan bahan obat ke sejumlah 16 (enam belas) sarana importir yang terdiri dari 9 (sembilan) Industri Farmasi (IF), 6 (enam) Pedagang Besar Farmasi (PBF), dan 1 (satu) importir kimia.
3. Sinergi Lintas K/L sebagai upaya penguatan pengawasan ekspor impor ONPP secara berkesinambungan agar pelayanan publik khususnya terkait ekspor dan impor Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

14. IKSP. Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat

Badan POM melakukan pengawasan obat yang komprehensif mulai dari pengawasan pre-market (sebelum obat diizinkan beredar) hingga post-market (setelah obat

beredar). Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif mempunyai tanggung jawab melaksanakan pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif dalam rangka meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan NAPPZA. Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA memiliki beberapa ragam media pelaksanaan KIE baik melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung kepada masyarakat serta KIE melalui media sosial.

Tingkat efektifitas KIE didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

IKSP ini diukur melalui metode survei yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui wawancara tatap muka (*face to face interview*), telepon (*phone survey*), dan via online, terhadap target responden menggunakan kuesioner, berupa pertanyaan terstruktur.

Tabel 3. 29 Tabel Perbandingan Realisasi IKSP Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat

IKSP	Realisasi					Target Periode akhir renstra
	2020	2021	2022	2023	2024	
Tingkat Efektivitas KIE	90,59	92,81	93,8	93,07	98,36	93,90

Jika dilihat berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat capaian atas indikator kinerja Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat dan NAPPZA pada tahun 2024 telah mencapai target tahun 2024 atau dengan nilai capaian senilai 104,75% bahkan mengalami peningkatan sebesar 5,29 poin dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam capaian kinerja efektivitas KIE ini, adalah sebagai berikut:

1. Bertambahnya jumlah media sosial yang digunakan dalam menyampaikan materi KIE, mampu meningkatkan interaksi dengan masyarakat sehingga diketahui masyarakat ikut aktif dalam berkontribusi terhadap peningkatan indeks KIE;

2. Ragam variasi informasi yang disampaikan dalam KIE mampu meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat;
3. Ragam inovasi serta kolaborasi dengan stakeholder serta kreativitas petugas pelaksana KIE dalam memberikan layanan KIE yang optimal kepada masyarakat.

Faktor kendala yang menghambat keberhasilan tercapainya IKSP ini, antara lain:

1. Latar belakang peserta KIE yang berbeda tingkat pendidikan, gender, usia serta perbedaan profesi menjadi faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat pemahaman materi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

1. Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat (Kie Tomas) yang dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan membangun kesadaran masyarakat atas penyalahgunaan obat serta memberantas peredaran obat ilegal
2. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan Tokoh Masyarakat yang dilakukan dalam menyampaikan materi terkait obat, narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif.

SP6. Meningkatnya *Regulatory Assistance* dalam Pengembangan Obat

15. IKSP. Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar

Inovasi dan pengembangan di bidang obat merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan kemajuan ilmiah. Pengembangan obat merupakan kunci dalam menghadapi tantangan kesehatan yang terus berkembang. Pengembangan obat dalam rangka mewujudkan kemandirian dan daya saing obat nasional memiliki banyak manfaat, Berikut adalah beberapa manfaat pengembangan obat nasional:

1. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian dalam pengembangan obat dapat meningkatkan ekonomi nasional. Produksi obat dalam negeri mengurangi ketergantungan pada impor obat-obatan, yang dapat memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan dan kestabilan ekonomi.

2. Keamanan Pasokan

Kemandirian dalam produksi bahan obat dan obat penting untuk memastikan keamanan pasokan obat di dalam negeri. Dengan memiliki industri obat yang kuat, suatu negara dapat menghadapi situasi darurat, krisis kesehatan, atau gangguan dalam rantai pasokan internasional.

3. Inovasi dan Penelitian

Kemandirian obat juga mendorong inovasi dan penelitian di bidang kesehatan. Negara yang memiliki industri obat yang kuat memiliki lingkungan riset yang berkembang, mendorong penemuan obat baru, dan meningkatkan keunggulan teknologi.

4. Mempercepat akses obat baru di masyarakat

Penguatan sektor pengembangan obat selain mendorong kemandirian obat lokal juga dapat mempercepat akses obat baru yang dibutuhkan masyarakat.

Sasaran program “Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat” merupakan komitmen Kedeputan Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam mendukung riset dan inovasi pengembangan obat. Regulatory assistance diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pengembangan obat nasional.

Sasaran kegiatan ini turun sebagai IKSP “Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar” yang ini ditunjang oleh 2 tahapan yaitu tahapan pemenuhan fasilitas produksi dengan unit pengampu Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP, dan tahapan pengembangan obat dalam rangka memperoleh izin edar diampu oleh Direktorat Registrasi Obat. Kedua tahapan tersebut memiliki proporsi yang sama dalam pembentukan persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar.

Pada tahun 2024 Sasaran program “**Meningkatnya *Regulatory Assistance* dalam Pengembangan Obat**” memiliki capaian kinerja sebesar 104,82 % termasuk dalam kategori SANGAT BAIK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis dengan baik (>100%).

Tabel 3. 30 Realisasi dan Capaian IKSP Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar Tahun 2024

SP 6 Meningkatkan <i>Regulatory Assistance</i> dalam Pengembangan Obat					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar	92%	96,43%	104,82	Sangat Baik
Capaian SP 6				104,82%	Sangat Baik

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk SP6. Meningkatkan *Regulatory Assistance* dalam Pengembangan Obat pada tahun 2024 telah berhasil memperoleh kategori **SANGAT BAIK**. Hal ini disebabkan oleh tingginya capaian Indeks penyusunan Sasaran Program tersebut yaitu Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar di tahun 2024 yaitu sebesar 104,82% (sudah melebihi 100%).

Tabel 3. 31 Pencapaian Capaian IKSP Persentase Inovasi Obat yang Dikawal sesuai Standar Tahun 2020-2024

IKSP	Realisasi					Target Akhir Periode Renstra
	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Inovasi Obat yang Dikawal Sesuai Standar	61,11	72,22	70,83	89,07	96,43	92

Dilihat berdasarkan tabel di atas, nilai realisasi indikator Persentase Inovasi Obat yang Dikawal sesuai Standar pada tahun 2024 meningkat dibandingkan capaian tahun 2023, dan telah melampaui target akhir Renstra 2020-2024 yaitu 92%. Namun demikian, untuk periode berikutnya tetap akan dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan capaian, seperti melakukan pengawalan pendampingan/asistensi terhadap permohonan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat baru secara insentif, serta melakukan audiensi dengan pihak peneliti supaya pengawalan yang dilakukan sesuai

dengan tahapan penelitian yang dilakukan. Intensifikasi pengawalan dilakukan agar pengembangan obat dapat sesuai dengan kaidah / ketentuan yang berlaku

Keberhasilan tercapainya indikator persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor penunjang, seperti:

1. Memberikan respon segera terhadap permintaan asistensi pengembangan obat sehingga progres pengembangan dapat berjalan sesuai tahapan penelitian
2. Melakukan pembahasan dengan tim ahli untuk proses pengembangan obat yang relatif baru sehingga feedback dan analisis terhadap tahapan penelitian dapat segera dibahas lebih lanjut dengan peneliti
3. Mendorong pendaftar melakukan progress bertahap pengembangan obat dan menginformasikan update data pengembangan obat secara berkala
4. Melakukan pendampingan/asistensi terhadap permohonan fasilitas produksi obat, dan bahan baku obat baru secara insentif seperti, asistensi regulatori onsite, desk pra sertifikasi, dan melakukan inspeksi sertifikasi CPOB.

Kombinasi faktor-faktor di atas dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi obat dan meningkatkan peluang keberhasilan tercapainya indikator persentase inovasi obat sesuai standar. Faktor tersebut tentunya didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi lintas sektor dengan peneliti
2. Audiensi dan asistensi regulatori dengan sponsor dan peneliti
3. Bimbingan teknis CPOB dalam rangka percepatan penyiapan fasilitas produksi obat hasil inovasi
4. Workshop CPOB produk biologi
5. Pendampingan pemenuhan CPOB fasilitas produksi produk inovasi
6. Forum CPOB Produk Biologi
7. Forum koordinasi lintas sektor untuk fasilitasi hilirisasi hasil riset
8. Pendamping pemenuhan CPOB unit transfusi darah
9. Workshop Pembuatan Dokumen Plasma Master File di Indonesia

SP7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal

Sasaran program “**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Optimal**” disusun atas komponen 3 IKSP: (1) Nilai pengelolaan kearsipan; (2) Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA dan (3) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA.

Capaian SP7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Optimal tahun 2024 sebesar **99,77%** termasuk dalam kategori **CUKUP**. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,87 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 98,90%.

Tabel 3. 32 Capaian IKSP pada Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Optimal

SP 7 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal				
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Pengelolaan Kearsipan	95,18	96,02	100,88
2.	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	93,19	92,69	99,46
3.	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	81,94	81,08	98,95
Capaian SP 7				99,77

16.IKSP. Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu langkah strategis yang dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan RB dapat dimanfaatkan juga untuk memastikan bahwa

pelayanan publik berjalan optimal, profesional, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebagai salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan atau kemajuan reformasi birokrasi dalam suatu pemerintahan atau organisasi. Indeks ini mencakup berbagai kriteria yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Reformasi ini melibatkan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, disertai dengan langkah-langkah bertahap yang konkret, realistis, inovatif, serta mendorong perubahan paradigma.

Evaluasi terhadap pelaksanaan RB K/L dilakukan oleh BPOM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB, PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2024.

Dari hasil evaluasi LKE pembangunan ZI yang telah dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI), pada tahun 2024, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA berhasil mencapai Indeks RB sebesar 92,69 (capaian 99,46%). Nilai Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA berasal dari rata-rata atas nilai realisasi unit-unit kerja di Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 33 Nilai Realisasi IKSP Indeks RB Unit Teknis di Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2024

Unit	Realisasi Indeks RB 2024
Direktorat Standardisasi Obat, NPPZA	92,08
Direktorat Registrasi Obat	91,11
Direktorat Pengawasan KMEI Obat, NPPZA	93,72
Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	93,37
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	93,19
Rata-Rata Nilai Unit di Kedeputian 1 = Indeks RB Deputi 1	92.69

Tabel 3. 34 Pencapaian Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dibandingkan dengan target tahun Tahun 2024

SP... Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal							
No.	IKSP			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
	Indeks	RB	Deputi	93,19	92,69	99,46	CUKUP
	Bidang	Pengawasan					
	Obat,	Narkotika,					
	Psikotropika,						
	Prekursor dan	Zat					
	Adiktif						
Capaian SP 4							

Bila dibandingkan dengan target akhir untuk indikator ini (93,19), terlihat bahwa nilai realisasi hanya sebesar 99,46% dengan kinerja berpredikat **CUKUP**.

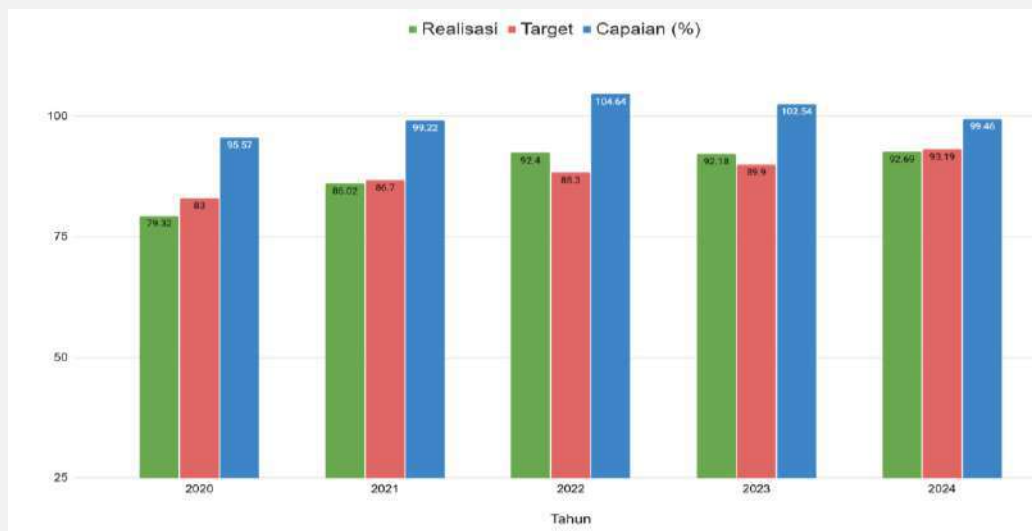
Namun, bila dilihat lebih jauh terhadap realisasi indikator ini selama rentang periode Renstra Tahun 2020-2024, terlihat ada *trend* peningkatan terhadap realisasi yang ditunjukkan pada grafik berikut ini:



Grafik 3. 6 Grafik Target vs Realisasi Indikator Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024

Secara umum terlihat realisasi (grafik batang hijau) selalu menyentuh/hampir mencapai target (garis merah) dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020, dimana antara target

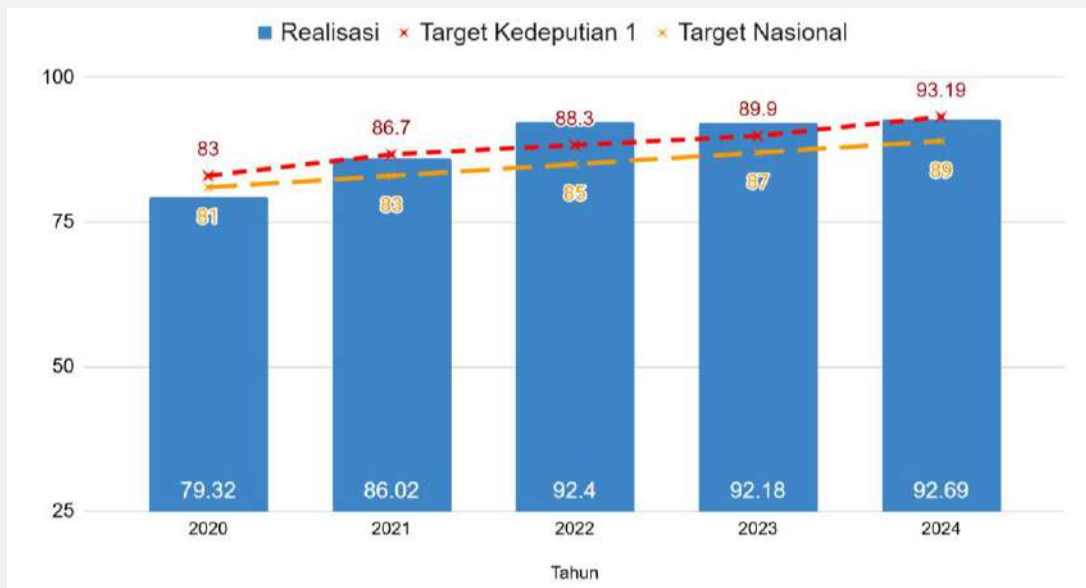
dan realisasi terdapat gap. Realisasi cenderung mengalami peningkatan sepanjang periode 2020-2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 sebelum akhirnya mencapai nilai tertinggi pada tahun 2024. Bila ditinjau dari persentase capaian juga cenderung meningkat pada periode 2020-2022 namun mengalami penurunan sepanjang tahun 2022-2024.



Grafik 3. 7 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Indikator Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024

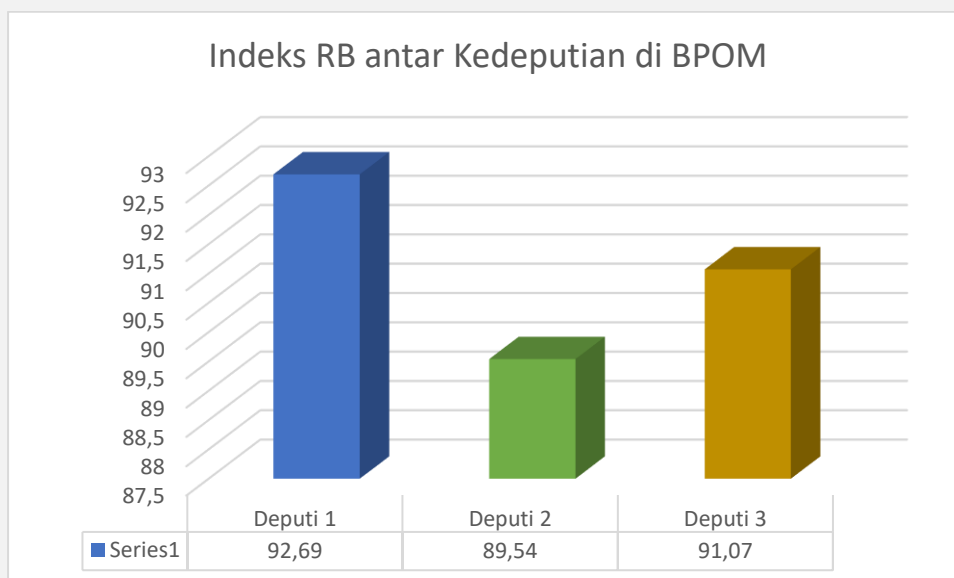
Realisasi tertinggi tercapai pada tahun 2024 yaitu sebesar 92,69 sedangkan persentase capaian tertinggi dicapai pada tahun 2022 senilai 104,64%. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh penentuan target pada setiap periodenya.

Selanjutnya, untuk melihat performa kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA dengan target nasional, berikut ini ditampilkan grafik perbandingan realisasi, target Kedeputan 1 dan target nasional untuk indikator Indeks RB.



Grafik 3. 8 Grafik Perbandingan Realisasi, Target Kedeputan 1 vs Target Nasional Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024

Perbandingan dengan unit lain (Kedeputan 1 dan Kedeputan 2)



Grafik 3. 40 Grafik Perbandingan Realisasi Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA dengan Kedeputan Lain di BPOM Tahun 2020-2024

Berikut ini merupakan analisis penyebab kegagalan terhadap capaian indikator Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dan upaya perbaikan/penyempurnaan yang akan dilakukan kedepan:

- 1) Evaluasi terhadap pelaksanaan RB K/L dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB dengan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB.

Berikut ini merupakan tabel hasil penilaian terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil pada masing-masing unit teknis di Kedeputan 1.

Penilaian	Unit - 1	Unit- 2	Unit- 3	Unit- 4	Unit- 5
A. Komponen Pengungkit	53,3 5	53,93	55,99	56,19	56,33
B. Komponen Hasil	38,7 3	37,18	37,73	37	37,04

Keterangan:

Unit-1: Dit. Standardisasi ONPPZA

Unit-2: Dit. Registrasi Obat

Unit-3: Dit. Was KMEI ONPPZA

Unit-4: Dit. Was Distribusi ONPP

Unit-5: Dit. Was Produksi ONPP

Apabila dilakukan analisis lebih dalam terhadap delapan area perubahan yang menjadi sasaran RB, maka didapatkan hasil sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. 35 Perbandingan Hasil Evaluasi Pembangunan ZI untuk Delapan Area yang Menjadi Sasaran Perubahan RB pada masing-masing unit teknis di Kedeputan 1 Tahun 2024.

Unit	A. Komponen Pengungkit												B. Komponen Hasil			
	Manajemen Perubahan		Penataan Tataaksana		Penataan Sistem Manajemen SDM		Penguatan Akuntabilitas		Penguatan Pengawasan		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Birokrasi Bersih dan Akuntabel		Pelayanan publik yang prima	Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	2. Capaian Kinerja Lebih baik		
Dit. Pengawasan Produksi ONPP	3,78	3,67	3,25	3,5	4,7	4,25	5	4,31	6,78	7,5	4,59	5	17,06	3,75	-	16,23
Dit. Pengawasan KMEI ONPPZA	3,67	3,57	3,25	3,5	4,88	5	5	4,08	6,73	6,88	4,86	4,59	16,71	5	16,01	16,01
Dit. Pengawasan Distribusi ONPP	3,89	4	3,13	3,25	4,88	5	4,41	4,34	6,88	6,88	4,96	4,59	17,11	3,75	16,14	16,14
Dit. Standardisasi ONPPZA	3,7	4	2,56	2,84	4,88	4	3,45	4,51	6,88	6,88	4,88	4,79	17,06	5	16,67	16,67
Dit Registrasi Obat	3,45	4	3,06	2,92	4,49	3	4,84	4,34	6,5	7,5	4,83	5	16,98	3,75	-	16,45

Keterangan:

- a) Aspek Pemenuhan
- b) Aspek Reform

Warna hijau menunjukkan nilai paling tinggi yang dapat dicapai unit teknis di Kedeputan 1 untuk aspek yang nilai. Sedangkan warna kuning menunjukkan hasil paling rendah yang dicapai unit teknis di Kedeputan 1. Selanjutnya, diharapkan agar unit-unit berikut dalam mengoptimalkan area perubahannya, terkhusus pada:

- a) Dit. Was Produksi ONPP : Peningkatan pelayanan publik (aspek pemenuhan) dan Capaian kinerja yang lebih baik
- b) Dit. Was KMEI ONPPZA : penguatan aspek reform pada komponen manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik. Serta peningkatan nilai SPAK, Pelayanan publik yang prima dan nilai SPKP.
- c) Dit. Was Distribusi ONPP : penguatan aspek reform pada komponen penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik serta capaian kinerja yang lebih baik.

- d) Dit. Standardisasi ONPPZA: penguatan tatalaksana, pemenuhan akuntabilitas, dan aspek reform penguatan pengawasan.
- e) Dit. Registrasi Obat: pemenuhan manajemen perubahan, pemenuhan dan aspek reform manajemen SDM, pemenuhan penguatan pengawasan dan pemenuhan capaian kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan sebagai upaya perbaikan/penyempurnaan kedepannya agar unit dengan nilai belum maksimal dapat mencontoh kepada unit dengan nilai lebih tinggi, diantaranya:

1. Manajemen perubahan: dapat menjadikan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, NPP menjadi unit percontohan dalam memaksimalkan nilai komponen Manajemen Perubahan (aspek pemenuhan dan reform).
 2. Penataan tata laksana: dapat menjadikan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, NPP dan Direktorat Pengawasan KMEI Obat, NPPZA menjadi unit percontohan dalam memaksimalkan nilai komponen Penataan tata laksana (aspek pemenuhan dan reform).
 3. Penataan sistem Manajemen: dapat menjadikan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, NPP dan Direktorat Pengawasan KMEI Obat, NPPZA menjadi unit percontohan dalam memaksimalkan nilai komponen sistem manajemen (aspek pemenuhan dan reform).
 4. Penguatan Akuntabilitas: Direktorat Pengawasan Produksi Obat, NPP dan Direktorat Pengawasan KMEI Obat, NPPZA menjadi unit percontohan dalam memaksimalkan nilai aspek pemenuhan dan Direktorat. Standardisasi Obat, NPPZA untuk memaksimalkan nilai aspek reform.
 5. Penguatan Pengawasan: Dit. Standardisasi ONPPZA dan Dit. Distribusi untuk aspek pemenuhan. Sedangkan untuk aspek reform dapat mengacu kepada Dit. Was Produksi dan Dit Reg Obat.
 6. Peningkatan pelayanan publik: Dit. Was Distribusi untuk aspek pemenuhan. Sedangkan untuk aspek reform dapat mengacu kepada Dit. Was Produksi dan Dit Registrasi Obat.
- 2) Peninjauan cara penetapan target dengan mempertimbangan faktor ketidaktercapaian tahun-tahun sebelumnya.



Grafik 3. 9 Trend Peningkatan Target Indikator Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA dan Target Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil capaian IKSP tahun 2023, terjadi penyesuaian target di tahun 2024 mengikuti hasil reviu unit pengampu (Inspektorat Utama). Adapun target yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu sebesar 93,19 dari target semula yaitu: 91,5.

Bila ditinjau dari poin kenaikannya, peningkatan target terbesar sepanjang periode Renstra tahun 2020-2024 terjadi pada tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu sebesar 3,7 poin. Lalu, peningkatan target terbesar kedua adalah tahun 2023 ke 2024 yaitu sebesar 3,29 poin. Pada tahun-tahun dengan peningkatan target terbesar tersebut (2021 dan 2024), terjadi kegagalan dalam pencapaian target (%Capaian < 100%). Hal ini tentunya menjadi penentu ketercapaian kinerja, karena melihat pola kenaikan target nasional konsisten (naik 2 poin setiap tahun).

- 3) Melakukan pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan termasuk penetapan Target Prioritas
- 4) Melakukan berbagai upaya dan/atau inovasi yang dilakukan untuk memberikan dampak pada perbaikan pelayanan publik yang prima (Cepat dan mudah), inovasi yang dilakukan antara lain:
 - a. memiliki aplikasi *push email* yang merupakan aplikasi blast email untuk notifikasi regulasi kepada stakeholder dan telah direplikasi oleh unit kerja lain.
 - b. inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Sistem Informasi Standar Obat (SISOBAT), New Aero, SIAPIK. Aplikasi Sisobat menjadi media perantara dalam penyampaian informasi, konsultasi dan penerimaan masukan dari stakeholder baik internal maupun eksternal terkait regulasi dan standar di bidang Obat, NPPZA

- c. Mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi SK Core Value BerAKHLAK yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit.
- d. Memastikan seluruh kegiatan pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas inovasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan publik belum menggambarkan dampak pemanfaatan teknologi informasi.
- f. Melakukan peningkatan kompetensi SDM pengelola akuntabilitas kinerja seperti usulan anggaran untuk peningkatan kompetensi, rencana pelaksanaan diklat dan daftar pelatihan yang telah dilaksanakan/diklat oleh pegawai.
- g. Menuangkan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi BerAKHLAK dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas.
- h. Melengkapi bukti data dukung bahwa aplikasi yanblik telah direplikasi oleh unit lain.
- i. Memahami indikator penilaian dari LAN untuk mengoptimalkan nilai

Dalam mencapai target yang telah ditentukan untuk indikator Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, berikut ini merupakan beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Capaian kinerja indikator ini tentunya diiringi dengan upaya setiap unit teknis di Kedeputan 1 untuk membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan penuh komitmen dan berkelanjutan. Terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di Kedeputan 1 untuk mendukung pencapaian target indikator ini, diantaranya: penggalangan komitmen, refreshment RB dalam rangka percepatan pembangunan ZI pada masing-masing unit teknis dan evaluasi terus menerus.



Gambar 3. 17 Direktorat Standardisasi Obat, NPPZA melakukan penggalangan komitmen dalam rangka percepatan pembangunan ZI menuju WBBM disaksikan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dan Perwakilan unit teknis lain.



Gambar 3. 18 Salah satu unit teknis di Kedeputan 1 (Direktorat Standardisasi Obat, NPPZA) melakukan kegiatan refreshment RB dalam rangka percepatan pembangunan ZI menuju WBBM.

17.IKSP. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. SAKIP memiliki tujuan dan manfaat yang penting, antara lain transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kinerja dan pelayanan publik, pembenahan tata kelola pemerintahan dan peningkatan reputasi lembaga pemerintah.

Pengukuran SAKIP merupakan suatu upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik demi kepentingan masyarakat. Dengan adanya SAKIP, diharapkan instansi pemerintah dapat bekerja lebih efisien, efektif, dan akuntabel dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Tabel 3. 36 Pencapaian Capaian IKSP Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2020-2024

IKSP	Realisasi					Target Akhir Periode Renstra
	2020	2021	2022	2023	2024	
Nilai AKIB Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA	77,18	78,44	79,55	80,69	81,08	87,2

Pada tahun 2024 hasil pengukuran nilai AKIP deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA memperoleh nilai 81,08, meningkat dibandingkan tahun 2023 (80,69) dengan kategori A akan tetapi masih berada di bawah target yang telah ditetapkan yaitu 81,94 (capaian 98,95%). Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA mengalami peningkatan terus menerus. Jika dilihat berdasarkan data realisasi tahun 2020-2024.

Berikut ini adalah faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP:

- 1) Perencanaan Kinerja yang Transparan dan Akuntabel
- 2) Peningkatan Kompetensi SDM dalam Akuntabilitas Kinerja

- 3) Telah tersedianya aplikasi penunjang perencanaan dan monitoring kinerja organisasi melalui *e-performance*
- 4) Telah tersedianya aplikasi penunjang perencanaan dan monitoring kinerja individu melalui SIMAKIN
- 5) Telah mengimplementasikan pedoman SAKIP dengan baik dan konsisten
- 6) Koordinasi yang baik antar unit di kedeputan 1 sehingga proses-proses perencanaan dan evaluasi berjalan dengan baik dan lancar

Keberhasilan IKSP ini tidak terlepas dari program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

- 1) Rapat perencanaan kinerja tahunan
- 2) Desk pemantauan dan evaluasi kinerja triwulanan
- 3) Pelatihan manajemen risiko dalam kinerja instansi pemerintah agar pegawai dapat mengidentifikasi dan mengatasi risiko dalam pencapaian target.

Implementasi program-program tersebut membantu instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja, sehingga menghasilkan layanan publik yang lebih berkualitas dan berorientasi pada hasil (*outcome-oriented governance*).

Berdasarkan capaian IKSP tahun 2024 tersebut, untuk tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian target tahun Berikutnya mengikuti hasil reuiu unit pengampu (Inspektorat). Pengkajian kembali dan menyesuaikan target diharapkan dapat lebih realistis dan mencerminkan kondisi aktual yang dihadapi.

18. IKSP. Nilai Pengelola Kearsipan

Penilaian pengelolaan kearsipan telah dilaksanakan mulai tahun 2021 untuk unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM, dan tahun 2022 untuk Loka POM. Pengawasan kearsipan internal pada tahun 2024 dilaksanakan sejak Maret s.d Mei 2024 sesuai dengan Surat Kepala Biro Umum No. B-KA.03.25.01.24.84 tanggal 29 Januari 2024.

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2024 di lingkungan BPOM yang dilakukan oleh Sekretaris Utama, diperoleh hasil unit teknis di Kedeputan 1 sebagai berikut:

Unit	Realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal 2024
Direktorat Standardisasi ONPPZA	94,37 (AA/Sangat Memuaskan)
Direktorat Registrasi Obat	98,41 (AA/Sangat Memuaskan)
Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA	91,11 (AA/Sangat Memuaskan)
Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	97,74 (AA/Sangat Memuaskan)
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	98,46 (AA/Sangat Memuaskan)
Rata-Rata Nilai Unit di Kedeputan 1 = Indeks RB Deputi 1	96,02 (AA/Sangat Memuaskan)

Tabel 3. 37 Perbandingan Realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 di Lingkungan Kedeputan 1.

Penilaian kearsipan dilakukan melalui beberapa indikator, diantaranya:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2024, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian sebelumnya. Realisasi kinerja untuk iKSP ini adalah 96,02. Namun, bila dibandingkan dengan target Kedeputan 1 yang telah ditetapkan untuk 2024, yaitu 95,18; maka capaian kinerja untuk indikator ini mencapai **100,88%** dengan predikat **SANGAT BAIK**.

Namun, bila dilakukan perbandingan dengan kedeputan lain di BPOM, nilai capaian kinerja Kedeputan 1 merupakan nilai terendah untuk indikator ini.



Grafik 3. 10 Grafik Perbandingan Realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 di Lingkungan Kedeputian 1 dengan kedeputian lain di BPOM.

Penyelenggaraan kearsipan di Kedeputian 1 dilaksanakan secara terorganisir. Pelaksanaan kegiatan kearsipan dilakukan oleh SDM kearsipan yang meliputi arsiparis dan pengelola arsip yang ditempatkan di unit teknis. Pencapaian kinerja sebesar 100,88% tersebut tentunya didukung oleh implementasi transformasi digital dalam pengelolaan arsip yang massive dilakukan. Berikut ini merupakan beberapa kegiatan/program yang telah dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target indikator ini:

1. Penerapan Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SiPANDA), digunakan untuk penomoran surat di Lingkungan BPOM.
2. Penerapan sistem kearsipan elektronik menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) ataupun aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sesuai dengan kebijakan terbaru.
3. Peningkatan awareness dan kompetensi SDM Kearsipan melalui kegiatan Sosialisasi, Workshop, dan Bimtek terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan di BPOM.

SP 8 Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal

19.IKSP. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Sasaran program “Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal” di Tahun 2024 memiliki capaian kinerja sebesar 00% karena indikator ini diexclude dari penilaian NPS. Berikut ini

merupakan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Kedeputan Bidang Pengawasan Obat NPPZA tahun 2024.

Tabel 3. 38 Capaian IKSP Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal

SP 8 Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal				
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	90,9	88,49	97,35%
Capaian SP 8				97,35%

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, nilai Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif memperoleh hasil kurang dari 100% (97,35%). Realisasi yang tidak tercapai di Tahun 2024 disebabkan oleh adanya perubahan tools pengukuran ASN Tahun 2024 sesuai dengan Surat Deputy Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN (perubahan atas objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja). 1

Namun demikian, berdasarkan manual IKSP BPOM, nilai IKSP indeks profesionalitas ASN pada angka 88,49 masuk dalam kategori profesionalitas ASN yang tinggi. SDM yang bermutu membawa dampak positif pada produktivitas dan efektivitas organisasi. Oleh karena itu, pengembangan dan pemeliharaan kualitas SDM tetap akan menjadi perhatian utama dalam manajemen sumber daya manusia di masa mendatang.

Tabel 3. 39 Pencapaian Capaian IKSP Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Kedeputan Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

IKSP	Realisasi					Target Akhir Periode Renstra
	2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA	-	87,42	86,69	91,19	88,49	90,9

Berdasarkan data tahun 2023 sebelumnya nilai Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA mengalami penurunan dibanding tahun 2024 sebesar 2,7. Beberapa upaya penunjang telah dilakukan Unit Kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Pengawasan ONPPZA, antara lain:

1. Komitmen pegawai yang tinggi untuk melaksanakan pembelajaran terus-menerus
2. Integritas dan kedisiplinan yang tinggi dari pegawai
3. Keterlibatan pimpinan untuk mendorong pegawai studi lanjut.

Keberhasilan capaian IKSP ini tentunya didukung oleh berbagai program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja, diantaranya:

- 1) Tersedianya layanan belajar secara online, sehingga pegawai terfasilitasi untuk melaksanakan kegiatan belajar secara mandiri.
- 2) tersedianya program studi lanjut master dalam dan luar negeri yang difasilitasi oleh instansi
- 3) Sosialisasi kode etik dan kedisiplinan secara kontinyu

Untuk meningkatkan capaian kinerja IKSP Indeks Profesionalitas ASN pada periode berikutnya, Unit Kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Pengawasan ONPPZA perlu meningkatkan nilai dimensi kompetensi dapat dilakukan dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/fungsional/pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.

Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tidak lagi menjadi indikator yang diperhitungkan dalam Renstra BPOM Tahun 2025-2029.

SP 9 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat

20. IKSP. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Sebagai upaya mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, BPOM senantiasa meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dengan terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antar instansi, sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Pengelolaan data dan informasi dalam pengawasan obat sangat penting untuk mendukung keberhasilan SPBE. Pengelolaan data yang baik dapat membantu menilai efektifitas untuk mendeteksi dan menanggapi masalah atau risiko yang mungkin muncul dalam rantai pasok obat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas pengawasan, selain itu pengelolaan data yang *realtime*, akurat dapat memberikan dasar yang kuat bagi pimpinan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan cepat.

Pada tahun 2024, sesuai tabel di bawah, Sasaran program “**Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat**” yang terdiri dari IKSP Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA memiliki capaian kinerja sebesar **120%** termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis dengan sangat baik (>100%).

Tabel 3. 40 Capaian IKSP Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tahun 2024

SP 9 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat				
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	3	3,6	120
Capaian SP 9				100

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, sasaran program Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat pada tahun 2024 telah berhasil memperoleh kategori **SANGAT BAIK**. Hal ini disebabkan oleh tingginya indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA di tahun 2024 yaitu sebesar 120 %.

Tabel 3. 41 Pencapaian Capaian IKSP Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

IKSP	Realisasi					Target Akhir Periode Renstra
	2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA	-	1,25	2,6	2,7	3,6	3

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi Indeks Pengelolaan data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA mengalami peningkatan sebesar 0,9 poin dari tahun 2023. Target indikator tersebut dapat terealisasi dengan adanya faktor-faktor penunjang, antara lain:

1. Koordinasi yang baik dengan pusdatin terkait permasalahan jaringan dan updating database
2. Partisipasi seluruh pegawai untuk selalu menggunakan *email corporate*
3. Proses aliran data registrasi dan pengawasan berjalan dengan lancar
4. Peran PIC masing-masing unit kerja yang selalu memantau pemanfaatan data dan informasi oleh pegawai

Selain itu, terdapat program/kegiatan yang turut menunjang capaian indikator Pengelolaan data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yaitu:

1. Rapat pembahasan peningkatan upgrade aplikasi bersama Pusdatin
2. Pengembangan fitur-fitur baru yang semakin mempermudah layanan kepada masyarakat
3. Penyediaan SDM terkait dengan sistem informatika
4. Pemutakhiran data pada aplikasi BOC

Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tidak lagi menjadi indikator yang diperhitungkan dalam Renstra BPOM Tahun 2025-2029.

SP 10 Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel

Anggaran merupakan sumber daya yang sangat penting untuk melaksanakan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA dengan berbagai kegiatan yang ditetapkan dalam DIPA dan POK. Dalam implementasi pengelolaan anggaran dituntut akuntabel dan transparan dalam penggunaannya. Sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Sasaran program “**SP10. Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel**” disusun atas komponen 4 IKSP: (1) Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA dan (2) Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa; (3) Nilai pengelolaan barang milik negara; (4) Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri.

Tahun 2024 memperoleh capaian kinerja sebesar **108,98%** termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**. Program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan (<100%).

Tabel 3. 42 Capaian IKSP pada SP10. Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel

SP 10 Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
1	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	93,06	96,61	103,81	Sangat baik
2	Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa	81,41	90	110,55	Sangat baik
3	Nilai pengelolaan barang milik negara	90	91,41	101,57	Sangat baik
4	Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri.	60%	96,44	120	Tidak dapat disimpulkan
Capaian SP 10				108,98	Sangat Baik

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk SP10. Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA secara Akuntabel pada tahun 2023 memperoleh kategori **SANGAT BAIK** (Capaian > 100%).

Berikut ini dijabarkan analisis penyebab keberhasilan keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk masing-masing IKSP penyusun SP10, tersebut:

21. IKSP. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan IKSP Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 26 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari: a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus Berikut ini:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

- Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.
- Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)

Tabel 3. 43 Pencapaian Realisasi Nilai Kerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024

IKSP	Realisasi					Target Akhir Periode Renstra
	2020	2021	2022	2023	2024	
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	95,82	89,22	94,13	91,58	96,61	93,06

Dalam pengukuran IKPA 2024 terdapat 3 aspek pengukuran yaitu 3 Aspek: 1) Kualitas Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran (25%). 2) Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran (50%). 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%), dan nilai IKSP Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 IKSP, indikator Dispensasi SPM menjadi pengurang nilai IKPA, sebagaimana tabel Berikut:

Tabel 3. 44 Tabel Ukuran Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran

No	IKSP	2021		2022		2023		2024	
		B	R	B	R	B	R	B	R
	Aspek kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran								
1	Revisi DIPA	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2	Deviasi Hal III DIPA	5%	3.79%	10%	5.52%	10%	4.48%	15%	13,55%
3	Pagu minus	5%	5%	-	-	-	-	-	
	Aspek kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran								
4	Penyerapan anggaran	15%	12.22%	20%	19.04%	20%	19.3%	20%	19,95%
5	Belanja Kontraktual	10%	9.30%	10%	9.57%	10%	9.43%	10%	9,7%
6	Penyelesaian Tagihan	10%	9.52%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Pengelolaan UP dan TUP	8%	7.60%	10%	9.77%	10%	9.86%	10%	9,91%
8	Dispensasi SPM*	5%	4.50%	5%	5%	5%	5%	-	-
9	LPJ Bendahara	5%	5%	-	-	-	-		
10	Renkas	5%	0%	-	-	-	-		
11	Kesalahan SPM	5%	4.5%	-	-	-	-		
12	Retur SP2D	5%	4.99%	-	-	-	-		
	Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran								
13	Capaian output	17%	17%	25%	25%	25%	24,84	25%	24,95%
	Total	100%	88.92%	100%	93.88%	100%	93,44	100%	98,06%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	175	063	445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	Nilai	100.00	90.34	99.77	97.00	100.00	99.10	99.78	98.06	100%	0.00	98.06	
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	13.55	19.95	9.70	10.00	9.91	24.95					
					Nilai Aspek	95.17		98.97				99.78					

Gambar 3. 19 IKSP Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA Tahun 2024

Nilai Indeks Pelaksanaan Anggaran akhir tahun 2024 mendapatkan Nilai total sebesar 98.46% naik dari tahun sebelumnya sebanyak 4,62 poin.

IKSP pembentuk IKSP Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). antara lain:

1. Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran. yang terdiri dari:
 - a. Revisi DIPA mendapatkan nilai 100 dengan bobot 10% maka memperoleh nilai akhir sebesar 10. Selama tahun 2024 telah dilakukan 51 kali revisi yang terdiri dari:
 - Revisi DIPA sebanyak 9 kali;
 - Revisi POK sebanyak 42 kali

Satu DJA

Sistem Aplikasi Terpadu DJA

Standar Biaya 2024

Revisi DIPA

Download DIPA

Target PNPB

Laporan

Referensi 2024

Arsip Pengumuman

Infografik

T.A. 2024

445155

Download DIPA 2024

Home

Download ADK

063 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN M...

063.01 - Badan Pengawas Obat dan M...

Kode	Uraian	POK	ADK	PDF
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN			
445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF			
	Ora Awal	POK	ADK Perken	DIPA Perken
	Revisi Ke-1	POK	ADK Perken	DIPA Perken
	Revisi Ke-2	POK	ADK Perken	DIPA Perken
	Revisi Ke-3	POK	ADK Perken	DIPA Perken
	Revisi Ke-4	POK	ADK Perken	DIPA Perken
	Revisi Ke-5	POK	ADK Perken	DIPA Perken
	Revisi Ke-6	POK	ADK Perken	DIPA Perken
	Revisi Ke-7	POK	ADK Perken	DIPA Perken
	Revisi Ke-8	POK	ADK Perken	DIPA Perken
	Revisi Ke-9 (Revisi Kanwil)	POK	ADK Perken	DIPA Perken

Gambar 3. 20 Rincian Revisi DIPA Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA Tahun 2024

- b. Deviasi Halaman III DIPA mendapatkan nilai sebesar 13.55 dari bobot penilaian 15%, dengan perhitungan sebagai berikut:

MAK	Target	Penyerapan	Deviasi	% Deviasi	Rata Deviasi Kumulatif	Nilai IKPA
a	b	c	d	e (d/v *100)	f	
52	4,660,745,675	3,971,692,942	689,052,733	14.78	9,66	90,34
53	5,219,186	232,964,000	227,744,814	100		

Perhitungan hasil penilaian = (90,34/100) x 15 = 13,55

maka memperoleh nilai akhir sebesar 13,55 dari target 15, bahwa Satker cukup optimal melakukan perubahan hal III (RPD) sehingga deviasi sampai dengan akhir tahun mendekati nilai target. Hal ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali untuk dapat mencapai target di tahun 2025

2. Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran. yang terdiri dari:

a. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran Satker Deputi I sebesar 99.98% merupakan pencapaian yang optimal dari target Badan POM yang ditetapkan sebesar 99%. Untuk target nasional adalah 95% pencapaian Satker telah melampaui target nasional. Hasil Perhitungan sebagai berikut:

Pagu alokasi untuk Belanja Barang (MAK 52) = Rp. 52.337.449.000 dan MAK 53 = Rp. 2.128.332.000 setelah dikurangi blokir sebesar Rp. 3.612.654.000, Pagu Netto MAK 52 = Rp. 48.724.795.000 dan MAK 53 = 2.128.332.000

	Pagu Netto	Target penyerapan		Realisasi	NKPA Tertimbang	Nilai IKPA
52	48.724.795.000	90%	48,718,782,584	43.852.315.500	95.81	99.77
53	2.128.332.000	90%	2,128,330,868	1.915.498.800	4.19	

Perhitungan hasil penilaian = (99,77/100) x 20 = 19,95

Rincian Realisasi Anggaran sampai dengan TW 4 sesuai Pagu Netto yang telah dikurangi nilai Pagu Blokir, sebagai berikut:

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF		LAPORAN PAGU DANA PER KEGIATAN					
No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3.462.465.000	3.462.456.198	100.00%	0	0	8.802
2	4122 Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	6.997.315.000	6.497.817.005	92.72%	0	509.454.000	43.995
3	4123 Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	14.069.111.000	12.941.832.395	91.99%	0	1.127.251.000	27.605
4	4125 Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	10.527.153.000	9.725.676.849	92.39%	0	801.110.000	366.151
5	4127 Registrasi Obat	11.215.579.000	10.660.678.910	95.05%	0	554.568.000	332.090
6	4131 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	9.194.158.000	7.573.734.319	82.43%	0	629.271.000	152.681
Jumlah		54.465.781.000	50.852.195.676	93.37%	0	3.612.654.000	931.324

Unit Kerja	Total Pagu	Realisasi	Presentase	Target	Capaian	Target Efisiensi Akhir Periode Renstra
Direktorat Distribusi dan Pelayanan Obat NPP	7.382.821.000	7.382.775.942	99,999	99,99	100	100
Direktorat Pengawasan KMEI	13.816.560.000	13.816.532.395	99,9998	99,99	100	
Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP	10.555.153.000	10.554.779.110	99,9965	99,99	100	
Direktorat Registrasi Obat	11.026.876.000	11.026.543.910	99,9970	99,99	100	
Direktorat Standardisasi Obat NPPZA	8.071.717.000	8.071.564.319	99,9981	99,99	100	
Satker	50.853.127.00	50.852.195.67	99,9982	99,99		
	0	6				

Tabel 3. 45 Target dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA Tahun 2024 (Pagu setelah dikurangi blokir)

- b. Belanja Kontraktual: Nilai dalam IKPA mencapai 97 dengan bobot yang ditetapkan sebesar 10% capaian nilai akhir sebesar 9,7; dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan mekanisme kontrak tidak ada yang mengalami keterlambatan penyelesaian pembayarannya.
- Hasil Perhitungan

Nilai Belanja Kontraktual mendapatkan nilai akhir 9,7 (target 10) terdapat data kontrak yang terlambat didaftarkan dan tagihan melewati batas waktu penyelesaian pada (LLAT)

Jumlah Nilai Kontrak pada TW 4 sebesar Rp. 223.534.120, dengan nilai akhir sebagai berikut :

Nilai Distribusi Akselerasi Kontrak = 20	} 97 (nilai akhir 9,7 target 10)
Nilai Kinerja Kontrak Dini = 44	
Nilai Kinerja Akselerasi 53 = 33	

- c. Pengelolaan UP dan TUP capaian pada IKPA sebesar **9.91 dari target nilai 10**

Selama TW 4 revolving pengajuan SPM UP sebanyak 42 waktu penyelesaian dari pengajuan tepat waktu. Penyelesaiain GUP Nihil akhir tahun semua unit melakukan tepat waktu. Jumlah TUP (RM) dimintakan sebesar Rp. 1.331.958.433, dengan setoran pengembalian sebesar Rp. 24.102.814 Nilai Komponen UP/TUP sebesar 97,89.

Target GUP KKP sebesar Rp. 300.000.000 dengan realisasi Rp. 896.044.737 menghasilkan nilai GUP KKP = 110.

Nilai Pengelolaan UP dan TUP mendapatkan nilai akhir **9,91 (target 10)**

- d. Dispensasi SPM: selama tahun 2024 terdapat 1 SPM yang harus menggunakan Dispensasi karena adanya keterlambatan dalam memasukan kontrak ke KPPN dan dalam penyelesaian harus menggunakan Dispensasi juga karena melampaui LLAT

3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Konfirmasi capaian Output

Pelaporan data capaian output merupakan bagian dari monev pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, data capaian output dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran. Batas akhir pelaporan

bagi Satker pengguna Aplikasi SAKTI **paling lambat 10 hari kerja pada bulan Berikutnya.**

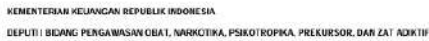
Tahun 2024 terdapat 15 output dengan peroleh nilai 14 output mendapatkan nilai 100 dan 1 output mendapatkan nilai 95,36 yaitu pada output Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika dan prekursor target output 2090 laporan realisasi 1993 laporan.

Nilai akhir capaian output diperoleh **$(1495,36/1500) \times 25 = 24,95$ target 25**

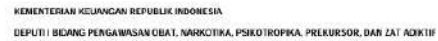
Tabel 3. 46 Capaian Realisasi Output Unit di Kedeputan 1 Tahun 2024

Unit Kerja	Jumlah Output	Realisasi	Capaian (%)
Sosialisasi KIE	1	1	100
Dit. Registrasi Obat	1	1	100
Dit. Standardisasi Obat dan NPPZA	3	3	300
Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP	3	3	300
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP	2	2	500
Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif	5	5	495,36
DEPUTI I	15	13	1.495,36

Detail Capaian Rincian Output sebagai berikut:

[illegible]

Intergalaksi : 34-82-20-87.5 : 18.000 : 445.000



6	IN40-1	DEPUTY SECRETARY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND POLICY COORDINATION DEPUTY SECRETARY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND POLICY COORDINATION DEPUTY SECRETARY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND POLICY COORDINATION	175	1	87%	1538	36	20	Regulation and Control of the Environment and Planning Act 1962 (RCA 1962)	6,330,271,028	8,710,233,161	67%	Logistics	87.80	762	active/active	DE - Data Info	3	1	Nonrecn	Statutory	8730	3740	50%
7	IN40-1	DEPUTY SECRETARY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND POLICY COORDINATION DEPUTY SECRETARY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND POLICY COORDINATION DEPUTY SECRETARY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND POLICY COORDINATION	175	1	87%	1538	36	20	Regulation and Control of the Environment and Planning Act 1962 (RCA 1962)	4,127,756,028	4,160,722,647	100%	Logistics	100	87.31	active/active	DE - Data Info	3	1	Nonrecn	Statutory	2700	1290	50.1%
8	IN40-1	DEPUTY SECRETARY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND POLICY COORDINATION DEPUTY SECRETARY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND POLICY COORDINATION DEPUTY SECRETARY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND POLICY COORDINATION	175	1	87%	1511	60	20	Control of the Environment and Planning Act 1962 (RCA 1962)	171,080,028	171,080,028	8	Local	7	760	active/active	DE - Data Info	3	1	Nonrecn	Time Efficiency	5	0	50%
9	IN40-1	DEPUTY SECRETARY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND POLICY COORDINATION DEPUTY SECRETARY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND POLICY COORDINATION DEPUTY SECRETARY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND POLICY COORDINATION	175	1	87%	1511	60	20	Strategic and Policy Coordination and Planning Act 1962 (RCA 1962)	5,131,351,028	5,131,351,028	100	Local	100	760	active/active	DE - Data Info	3	1	Nonrecn	Time Efficiency	100	100	100%
10	IN40-1	DEPUTY SECRETARY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND POLICY COORDINATION DEPUTY SECRETARY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND POLICY COORDINATION DEPUTY SECRETARY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND POLICY COORDINATION	175	1	87%	1511	60	20	Regulation and Control of the Environment and Planning Act 1962 (RCA 1962)	11,17,761,028	8,260,261,114	61.88%	Regulation	76.00	760	active/active	DE - Data Info	4	1	Nonrecn	Statutory	8730	3740	50%
11	IN40-1	DEPUTY SECRETARY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND POLICY COORDINATION DEPUTY SECRETARY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND POLICY COORDINATION DEPUTY SECRETARY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND POLICY COORDINATION	175	1	87%	1512	60	20	Regulation and Control of the Environment and Planning Act 1962 (RCA 1962)	1,127,351,028	9,100,611,147	811	Reg. person	100%	760	active/active	DE - Data Info	3	1	Nonrecn	Statutory	8730	3740	50%

Language codes : 34-62-25 87 3 7 76 (ref: 445755)

[illegible]

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala antara lain adanya kegiatan yang dilakukan secara mendadak, sehingga dalam pencairan anggaran harus menunggu revisi POK/DIPA. Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA akan terus berupaya melakukan perbaikan dan konsistensi dalam pelaksanaan anggaran dengan kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang telah disusun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 26 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari: a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

165

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

- Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.
- Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)

No	NKA	Kategori
1	> 90	Sangat Baik
2	> 80 < 90	Baik
3	> 60 < 80	Cukup
4	> 50 < 60	Kurang
5	= 50	Sangat Kurang

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Tahun

Tampilkan 20 entri

Cari

No.	Bede Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF		99,84	98,06	98,95

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Selanjutnya

Gambar 3. 22 Nilai SMART Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2024 dari aplikasi SMART DJA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	175	063	445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	Nilai	100.00	90.34	99.77	97.00	100.00	99.10	99.78	98.06	100%	0.00	98.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.55	19.95	9.70	10.00	9.91	24.95				
					Nilai Aspek	95.17		98.97				99.78				

Gambar 3. 23 Nilai IKPA Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2024 dari aplikasi Omspan

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

$$\text{Nilai NKA} = (98,86 \times 50\%) + (98,06 \times 50\%)$$

$$= 49,43 + 49,03$$

$$= \mathbf{98,46 \text{ (Baik)}}$$

Adapun penyebab belum maksimalnya capaian untuk IKSP ini, yaitu:

- Deviasi Hal III DIPA berkaitan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang belum optimal, penyesuaian setiap Triwulanan (akselerasi) terhadap pelaksanaan dengan RPD belum dimanfaatkan secara optimal.
- Pada akhir periode Persetujuan revisi DIPA karena penyesuaian perubahan target output, waktu persetujuan lebih lama
- Capaian Output belum semua indikator rincian output belum mencapai nilai maksimal
- Masih terdapat dana yang tidak terserap disebabkan adanya perubahan pada saat pemutakhiran data pada aplikasi SAKTI belum dilaksanakan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

- Terdapat penyelesaian PTUP yang masih belum terselesaikan di akhir tahun sampai dengan batas akhir di tanggal 8 Januari 2025. Penyelesaian keterlambatan pengajuan SPM PTUP ke KPPN tersebut dilakukan setelah adanya surat resmi dari Kementerian Keuangan pada akhir bulan Januari 2025.

22. IKSP. Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa

Pengukuran nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa penting karena untuk menjamin efisiensi dan efektivitas, menghindari pemborosan anggaran dan sumber daya, memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan organisasi. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi yaitu memberikan kepastian bahwa proses pengadaan dilakukan secara adil dan terbuka dan mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, dengan melakukan pengukuran kualitas, organisasi dapat memastikan bahwa pengelolaan barang dan jasa berjalan optimal, memberikan manfaat maksimal, serta sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

IKSP “**Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa**” adalah IKSP baru pada tahun 2024 serta telah berhasil tercapai dengan sangat baik (>100%) dengan kategori **SANGAT BAIK**.

Program kegiatan yang dapat menunjang nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan evaluasi. Berikut adalah beberapa program yang diterapkan, antara lain perencanaan dan pengadaan barang dan jasa yang baik, pelatihan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa agar setiap unit dapat mengajukan kebutuhan yang tepat guna dan efisien, penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah dengan penerapan sistem berbasis *e-procurement* untuk transparansi dan efisiensi. Efisiensi dan optimalisasi penggunaan barang dan jasa dengan Sosialisasi Tata Kelola Penggunaan Barang/Jasa untuk meningkatkan pemahaman pegawai dalam pemanfaatan barang secara optimal dan monitoring dan evaluasi kinerja penyedia barang/jasa agar hanya penyedia yang memenuhi standar yang dapat berkontrak.

22. IKSP. Nilai pengelolaan barang milik negara

Tujuan dari penilaian indikator ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN, adapun dalam pengelolaan BMN terdiri dari aspek yaitu :

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan dan Pemeliharaan
6. Penilaian
7. Pemindahtanganan
8. Pemusnahan
9. Penghapusan
10. Penatausahaan, serta
11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan, dan Pemusnahan.

Target indikator ini adalah **90**, pada tahun 2024 penilaian yang dilakukan oleh Biro Umum adalah terhadap satuan kerja yang mampu mengelola BMN dengan baik, dengan parameter:

- a. Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN;
- b. Ketepatan Waktu penyampaian Usulan RkBMN;
- c. Jumlah PSP BMN dibandingkan total aset;
- d. Jumlah Penghapusan BMN Rusak Berat dibandingkan Total Aset Rusak Berat;
- e. Jumlah Pemusnahan Persediaan usang/rusak dibandingkan Total Persediaan Usang/Rusak

Tabel 3. 47 Hasil Penilaian Pengelolaan BMN Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA

Ketepatan Waktu (25%)	Kualitas (75%)	Pelaporan yang Baik (30%)	RKBMN (10%)	PSP (20%)	Penghapusan (20%)	Pemusnahan (20%)	Total	Kategori	Capaian Indikator
22,92	70,50	28,03	7,50	19,88	20	16	91,41	sangat baik	101,57%

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi tahun pertama indikator ini meraih angka 91,41, dengan capaian indikator 101,57% dengan kategori sangat baik. Program kegiatan yang dapat menunjang nilai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baik meliputi beberapa aspek, seperti perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penghapusan. Berikut adalah beberapa program yang diterapkan, antara lain perencanaan dan pengadaan BMN yang baik, pelatihan perencanaan kebutuhan BMN untuk meningkatkan pemahaman unit kerja dalam

menyusun kebutuhan BMN yang efektif dan efisien, optimalisasi sistem informasi BMN dengan memanfaatkan aplikasi seperti BMN untuk transparansi dalam pengelolaan aset negara, evaluasi dan penyusunan rencana kebutuhan BMN untuk memastikan pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan dan tidak terjadi pemborosan, sosialisasi tata kelola dan pemanfaatan BMN agar setiap pegawai memahami prosedur penggunaan BMN secara optimal dan sesuai aturan, bimbingan Teknis (Bimtek) Penghapusan BMN, agar proses penghapusan BMN sesuai regulasi dan transparan. Implementasi program-program ini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMN sesuai dengan prinsip *good governance*.

23.IKSP. Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Produksi Dalam Negeri (PDN) diartikan sebagai suatu barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri di dalam negeri yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu.

Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sebagai salah satu upaya strategi nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kemandirian industri, serta penguatan daya saing produk lokal. Diharapkan dengan adanya peningkatan penggunaan PDN, maka berdampak semakin besar kontribusi terhadap industri nasional, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan ketergantungan terhadap impor.

Dalam hal mendukung peningkatan penggunaan PDN, BPOM telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Surat Edaran Nomor PL.01.25.2511.01.23.01 Tentang Surat Edaran Akselerasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tanggal 2 Januari 2023 berserta perubahannya Surat Edaran Nomor HK.02.01.2.22.05.24.16 Tahun 2024 Tentang Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri dan Pengurangan Penggunaan Produk Impor Tanggal 13 Mei 2024. Yang kemudian peraturan tersebut dilakukan *cascading* menjadi indikator kinerja Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri di level satker kerja yang dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang di-*tagging* PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan ; dan
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN yang dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP

Penilaian Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri pada tahun 2024 adalah sebesar 96,44 dengan capaian 160,73% dan kategori capaian **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.

Pencapaian indikator ini telah didukung oleh kegiatan berikut :

1. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi oleh unit-unit kerja di Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA; dan
2. Program pengawasan terhadap Kepatuhan P3DN dalam PKPT Pengawasan APIP K/L.

3. 6. Analisis efisiensi atas penggunaan anggaran per IKSP dalam mencapai kinerja

Prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk memastikan pengalokasian anggaran dapat menghasilkan output yang direncanakan/ditargetkan dengan mengacu pada ketentuan pelaksanaan anggaran yang berlaku. Belanja Berkualitas adalah belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pada tahun 2024 Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, mempunyai 10 Sasaran Program dengan 24 Indikator Kinerja. Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel 3.47 terdapat 8 indikator yang tidak efisien disebabkan capaian indikator tidak melebihi angka 100%.

Namun demikian secara keseluruhan diperoleh Nilai Efisiensi **0.0333** hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA pada tahun 2024 terhadap capaian indikator dapat dikatakan telah Efisien.

Tabel 3. 48 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Indikator (%) (a)	Anggaran Capaian (%) (b)	Indeks Efisiensi (IE) (d) IE= a/b	Standar Efisiensi (e)	Nilai Efisiensi (TE) TE=(e-1)/1	Kategori
1	Sasaran Program 02 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat serta kepatuhan industri produk tembakau	IKP 01 - Indeks Kepatuhan (Compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat	82,54	100	0,8254	1	-0,1746	Tidak Efisien
		IKP 02 - Indeks Kesadaran (Awareness index) Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	103,36	100	1,0336	1	0,0336	Efisien
		03 - Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam label dan iklan	101,09	100	1,0109	1	0,0109	Efisien
2	Sasaran Program 07 Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	01 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	100	100	1	1	0	Efisien
3	Sasaran Program 10 Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat	01 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,81	100	0,9881	1	-0,0119	Tidak Efisien
		02- Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	111,74	100	1,1174	1	0,1174	Efisien
		03- Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu	95,29	99,99	0,9529953	1	-0,0470047	Tidak Efisien
		04 - Indeks pelayanan publik di Bidang Obat	103,5	100	1,035	1	0,035	Efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Indikator (%) (a)	Anggaran Capaian (%) (b)	Indeks Efisiensi (IE) (d) IE= a/b	Standar Efisiensi (e)	Nilai Efisiensi (TE) TE=(e-1)/1	Kategori
		05 - Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	104,74	98,51	1,06324231	1	0,06324231	Efisien
4	Sasaran Program 16 Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu	01 - Indeks Pengawasan Obat	92,2	99,99	0,922092209	1	-0,077907791	Tidak Efisien
		02 - Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	100,41	100	1,0041	1	0,0041	Tidak Efisien
5	Sasaran Program 17 Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat	01 - Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat	100,61	100	1,0061	1	0,0061	Efisien
		02 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat	99,01	100	0,9901	1	-0,0099	Tidak Efisien
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	102	100	1,02	1	0,02	Efisien
6	Sasaran Program 18 Meningkatnya Regulatory Assistance dalam Pengembangan Obat	01 - Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	104,82	100	1,0482	1	0,0482	Efisien
7	Sasaran Program 19 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan	01 - Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	99,46	100	0,9946	1	-0,0054	Tidak Efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Indikator (%) (a)	Anggaran Capaian (%) (b)	Indeks Efisiensi (IE) (d) IE= a/b	Standar Efisiensi (e)	Nilai Efisiensi (TE) TE=(e-1)/1	Kategori
	Kerjasama Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika	02 - Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	98,95	99,99	0,98959896	1	- 0,01040104	Tidak Efisien
		04 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	100,88	100	1,0088	1	0,0088	Efisien
8	Sasaran Program 20 - Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	97,35	100	0,9735	1	-0,0265	Tidak Efisien
9	Sasaran Program 21 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	01 - Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Baik	100	100	1	1	0	Efisien
10	Sasaran Program 22 Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif secara akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	105,8	99,99	1,03820382	1	0,03820382	Efisien
		03 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	110,55	100	1,1055	1	0,1055	Efisien
		04 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	101,57	100	1,0157	1	0,0157	Efisien
		05 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	160,73	100	1,6073	1	0,6073	Efisien
							0.0333	Efisien

3. 7 Evaluasi tahun ke-5

3.2.A Analisis Tren

Pada sub bagian ini dipaparkan analisis perkembangan indikator dari tahun 2020-2024 berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear. Analisis trend dilakukan menggunakan kelompok analisis 1, dimana histori data relatif konsisten dan dapat dihitung perkiraan pencapaian terhadap target akhir renstra, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 49 Analisis Tren Evaluasi tahun ke-5

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseli ne (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024						PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024												Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R (Prognosis)	Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi								
														1	2	3	4								
1	SP 1 - Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	IKSP 1- Indeks Pengawasan Obat	76,53	80,00	85,72	91,00	85,64	92,25	89,16	93,50	95,03	94,75	92,02	2019	76,53	2024	92,02	94,75	5	5	0,04	0,04	86,06	Meningkat (Moderat)	
		IKSP 2- Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,16	89,10	97,84	95,50	96,29	96,00	98,12	96,5	97,2	97,3	97,00	2019	98,16	2024	97,7	97,0	5	5	0,00	0,00	39,54	Meningkat (Moderat)	
2	SP 2 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha	IKSP 3- Indeks kepatuhan (compliance index)	84,43	84,50	79,92	87	85,87	88	89,41	89	82,71	91	75,11	2019	84,43	2024	75,11	91	5	5	0,02	-0,02	-153,13	Menurun	

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseli ne (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024						PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024												Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R (Prognosis)														
												Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9													
	dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat serta kepatuhan industri produk tembakau	pelaku usaha di bidang Obat																							
		IKSP 4 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat yang aman dan bermutu	73,84	76,50	79,08	80,00	79,26	81,50	84,2	84,0	87,1	87,5	90,44	2019	73,84	2024	90,44	87,5	5	5	0,03	0,04	119,87	Meningkat (On The Track)	
		IKSP 5 - Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	46,00	46,00	45,13	47,00	53,62	48,00	54,37	49,00	55,16	55,2	55,80	2019	46,00	2024	55,80	55,2	5	5	0,04	0,04	106,04	Meningkat (On The Track)	
3	SP 3 - Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja	IKSP 6 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat	82,50	82,50	85,14	86,00	86,00	87,00	93,20	88,00	96,30	96,50	97,09	2019	82,50	2024	97,09	96,50	5	5	0,03	0,03	103,95	Meningkat (On The Track)	

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseli ne (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024						PERKEMBANGAN KINERJA						
				2020		2021		2022		2023		2024												Perkembangan Kinerja	Kategori					
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R (Prognosis)	Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi													
														1	2	3	4									5	6	7	8	9
	pengawasan obat	IKSP 7 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat	70,58	72,00	75,12	77,00	69,38	80,00	77,24	83,0	81,2	86,0	85,15	2019	70,58	2024	85,15	86,0	5	5	0,04	0,04	94,88	Meningkat (Moderat)						
		IKSP 8 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	83,32	83,50	85,21	87	89,11	88	89,04	89	90,03	92	93,84	2019	83,32	2024	93,84	92	5	5	0,02	0,02	120,22	Meningkat (On The Track)						
4	SP 4 - Meningkatny a kualitas Kebijakan pengawasan Obat	IKSP 9 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	79,43	71,00	89,46	89,60	83,43	89,70	83,4	86,1	93,79	93,79	93,79	2019	79,43	2024	93,79	93,79	5	5	0,03	0,03	100,00	Meningkat (On The Track)						
5	SP 5 - Meningkatny a efektivitas pengawasan dan pelayanan	IKSP 10 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,42	0,00	87,42	87,50	95,99	88,50	97,63	89,50	96,28	98,0	96,83	2019	87,42	2024	96,83	98,0	5	5	0,02	0,02	89,38	Meningkat (Moderat)						

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseli ne (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024						PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024												Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R (Prognosis)												
														1	2	3	4								
	publik di bidang Obat	IKSP 11 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	79,84	77,00	74,68	78,00	75,00	79,00	76,74	80,00	81,77	82,00	91,63	2019	79,84	2024	91,63	82,00	5	5	0,01	0,03	521,74	Meningkat (On The Track)	
		IKSP 12 - Persentase pelayanan publik dibidang obat yang diselesaikan tepat waktu	85,10	82,00	84,71	85,00	82,44	86,00	86,68	87,0	92,05	92,1	87,76	2019	85,10	2024	87,76	92,1	5	5	0,02	0,01	38,75	Meningkat (Moderat)	
		IKSP 13 - Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	3,41	3,41	3,98	4,12	4,21	4,28	4,54	4,44	4,67	4,70	4,87	2019	3,41	2024	4,87	4,70	5	5	0,07	0,07	111,47	Meningkat (On The Track)	
		IKSP 14 - Tingkat Efisiensi KIE di Bidang Obat	87,30	87,30	90,59	90,77	92,81	92,59	93,8	94,4	93,1	93,9	98,36	2019	87,30	2024	98,36	93,9	5	5	0,01	0,02	164,44	Meningkat (On The Track)	

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseli ne (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024						PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024												Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R (Prognosis)												
														1	2	3	4								
6	SP 6 - Meningkatny a regulatory assistance dalam pengembang an Obat	IKSP 15 - Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar	60,00	60,00	61,11	82,00	86,11	85,00	86,11	89,00	89,07	92,0	96,43	2019	60,00	2024	96,43	92,0	5	5	0,09	0,10	111,53	Meningkat (On The Track)	
7	SP 7 - Terwujudnya tata kelola pemerintah n dan kerjasama Deputi Bidang	IKSP 16 - Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	83,00	83,00	79,32	86,70	86,02	88,30	92,40	89,90	92,18	93,19	92,69	2019	83,00	2024	92,69	93,19	5	5	0,02	0,02	95,30	Meningkat (Moderat)	
	Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat	IKSP 17 - Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	79,20	81,00	77,18	79,70	78,44	82,20	79,55	84,7	80,69	81,94	81,08	2019	79,20	2024	81,08	81,94	5	5	0,01	0,00	68,90	Meningkat (Moderat)	

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseli ne (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024						PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024												Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R (Prognosis)												
														Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9													
	Adiktif yang optimal	IKSP 18 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	95,18	95,18	96,02	2019	0	2024	96,02	95,18	5	5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	SP 8 - Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal	IKSP 19 - Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	77,00	77,00	83,40	82,60	87,42	83,33	86,69	84,06	91,19	90,09	88,44	2019	77,00	2024	88,44	90,09	5	5	0,03	0,03	88,06	Meningkat (Moderat)	

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseli ne (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024						PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024												Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R (Prognosis)	Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi								
														1	2	3	4								
9	SP 9 - Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	IKSP 20 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NAPPZA	1,51	1,51	0,25	2,00	1,25	2,26	2,70	2,50	2,70	3,0	3,00	2019	1,51	2024	3,00	3,0	5	5	0,15	0,15	100,00	Meningkat (On The Track)	
10	SP 10 - Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif secara Akuntabel	IKSP 21 - Nilai Kinerja Anggaran	93,20	93,20	95,82	93,30	93,60	93,40	94,13	93,50	91,58	93,06	96,61	2019	93,20	2024	96,61	93,06	5	5	0,00	0,01	-2.399,39	Menurun	
		IKSP 22 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	81,41	90,00	2019	0,00	2024	90,00	81,41	5	5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		IKSP 23- Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	90,0	91,4	2019	0,00	2024	95,00	91,4	5	5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseli ne (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024						PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024												Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R (Prognosis)												
														Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9													
		IKSP 24- Persentase Realisasi penggunaan roduk dalam negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69	60,0	96,4	2019	0,00	2024	96,44	60,0	5	5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kategori perkembangan ke-20 indikator dari tahun 2020-2024 yang dapat diukur (4 indikator tidak dapat diukur Trend karena tidak terdapat data baseline/ merupakan IKSP baru) adalah sebagai berikut:

- a. Tren “Menurun” terjadi pada 2 (dua) indikator berikut:
 1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat
 2. Nilai Kinerja Anggaran
- b. Tren “Meningkat-moderat” terjadi pada 8 (delapan) indikator berikut:
 1. Indeks Pengawasan Obat
 2. Persentase Obat yang memenuhi syarat
 3. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat
 4. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 5. Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu
 6. Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
 7. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
 8. Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
- c. Tren “Meningkat-*On The Track*” terjadi pada 10 (sepuluh) indikator berikut:
 1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat yang aman dan bermutu
 2. Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan
 3. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat
 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
 5. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat
 6. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
 7. Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan
 8. Tingkat Efisiensi KIE di Bidang Obat
 9. Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar
 10. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NAPPZA

3.2.B Analisis GAP

Analisis GAP ini merupakan perbandingan kondisi saat ini dengan yang seharusnya, digunakan pada saat pemutakhiran data dengan data realisasi tahun ke-5 dan target tahun ke-5, dengan hasil sebagai berikut:

No. Kode (Kolom 1)	Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)	
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori			
SP. 1	1	Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	1	Indeks Pengawasan Obat	Indeks	80,00	85,72	91,00	85,64	92,25	89,16	93,50	95,03	94,75	92,02	97,1	Baik	Direktorat Registrasi Obat	Periode Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dibuktikan dengan dengan pencapaian sebanyak 23 indikator yang berhasil memenuhi predikat tersebut, 1 indikator berpredikat baik dan 1 indikator yang belum dapat disimpulkan karena tidak lagi diperhitungkan menjadi indikator kinerja Kedeputian Bidang Pengawasan Obat. Secara keseluruhan, hasil ini memberikan gambaran positif mengenai arah dan implementasi kebijakan yang telah dilakukan, serta membuka peluang untuk
			2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Persentase	89,10	97,84	95,50	96,29	96,00	98,12	96,5	97,2	97,3	97,77	100,5	Sangat Baik	Dit Was KMEI ONPPZA	
SP. 2	1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat serta kepatuhan industri produk tembakau	1	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat	Indeks	84,50	79,92	87	85,87	88	89,41	89	82,71	91	75	82,5	Cukup Baik	Dit Was KMEI ONPPZA Dit Distribusi ONPP Dit. Produksi ONPP	
			2	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat yang aman dan bermutu	Indeks	76,50	79,08	80,00	79,26	81,50	84,2	84,0	87,1	87,5	90	103,4	Sangat Baik	Dit Was KMEI ONPPZA	
			3	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	Indeks	46,00	45,13	47,00	53,62	48,00	54,37	49,00	55,16	55,2	56	101,1	Sangat Baik	Dit Was KMEI ONPPZA	
SP. 3	1	SP 3 - Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat	Indeks	82,50	85,14	86,00	86,00	87,00	93,20	88,00	96,30	96,50	97,09	100,6	Sangat Baik	Dit, Registrasi Obat Dit. Was Distribusi dan Pelayanan ONPP	

No. Kode (Kolom 1)	Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
	terhadap kinerja pengawasan obat	2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat	Indeks	72,00	75,12	77,00	69,38	80,00	77,24	83,0	81,2	86,0	85,15	99,0	Baik	Seluruh Eselon II di lingkungan Kedeputan 1	pengembangan lebih lanjut dalam periode yang akan datang.
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks	83,50	85,21	87	89,11	88	89,04	89	90,03	92	93,84	102,0	Sangat Baik	Seluruh Eselon II di lingkungan Kedeputan 1	
SP. 4	1 SP 4 - Meningkatkan kualitas Kebijakan pengawasan Obat	1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks	71,00	89,46	89,60	83,43	89,70	83,4	86,1	93,79	93,79	93,79	100,0	Sangat Baik	Dit Standardisasi Obat, NPPZA	
SP. 5	1 SP 5 - Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat	1	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persentase	0,00	87,42	87,50	95,99	88,50	97,63	89,50	96,28	98,0	96,8	98,8	Baik	Dit Was KMEI ONPPZA	
		2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Persentase	77,00	74,68	78,00	75,00	79,00	76,74	80,00	81,77	82,00	91,6	111,7	Sangat Baik	Dit Distribusi dan Pelayanan ONPP	
		3	Persentase pelayanan publik dibidang obat yang diselesaikan tepat waktu	Persentase	82,00	84,71	85,00	82,44	86,00	86,68	87,0	92,05	92,1	87,8	95,3	Baik	Dit Was KMEI ONPPZA Dit Distribusi dan Pelayanan ONPP Dit. Produksi ONPP Dit. Registrasi Obat	

No. Kode (Kolom 1)	Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
		4	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	Indeks	3,41	3,98	4,12	4,21	4,28	4,54	4,44	4,67	4,70	4,87	103,6	Sangat Baik	Seluruh Eselon II di lingkungan Kedeputan 1	
		5	Tingkat Efisiensi KIE di Bidang Obat	Tingkat	87,30	90,59	90,77	92,81	92,59	93,8	94,4	93,1	93,90	98,36	104,7	Sangat Baik	Dit Was KMEI ONPPZA	
SP. 6	1	SP 6 - Meningkatkan regulatory assistance dalam pengembangan Obat	1	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	Persentase	60,00	61,11	82,00	86,11	85,00	86,11	89,00	89,07	92,0	96,43	104,8	Sangat Baik	Dit Registrasi Obat Dit Was Produksi ONPP
SP. 7	1	SP 7 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang	1	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks	83,00	79,32	86,70	86,02	88,30	92,40	89,90	92,18	93,19	92,69	99,5	Baik	Seluruh Eselon II di lingkungan Kedeputan 1
		Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang optimal	2	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Nilai	81,00	77,18	79,70	78,44	82,20	79,55	84,7	80,69	81,94	81,08	99,0	Baik	Seluruh Eselon II di lingkungan Kedeputan 1
			3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai	0	0	0	0	0	0	0	95,18	95,18	96,02	100,9	Sangat Baik	Seluruh Eselon II di lingkungan Kedeputan 1

No. Kode		Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)
(Kolom 1)						T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP. 8	1	SP 8 - Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks	77,00	83,40	82,60	87,42	83,33	86,69	84,06	91,19	90,09	88,44	98,2	Baik	Seluruh Eselon II di lingkungan Kedeputian 1	
SP. 9	1	SP 9 - Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NAPPZA	Indeks	1,51	0,25	2,00	1,25	2,26	2,70	2,50	2,70	3,0	3,00	100,0	Sangat Baik	Seluruh Eselon II di lingkungan Kedeputian 1	
SP. 10	1	SP 10 - Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif secara Akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	93,20	95,82	93,30	93,60	93,40	94,13	93,50	91,58	93,06	96,61	103,8	Sangat Baik	Seluruh Eselon II di lingkungan Kedeputian 1	Indikator Direktif Penugasan
			2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Tingkat Efisiensi	100,00	100,00	100,00	91,20	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0,0	#DIV/0!	Belum dapat disimpulkan	Seluruh Eselon II di lingkungan Kedeputian 1	Indikator tersebut tidak dilanjutkan perhitungannya sesuai dengan surat dari Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.01.02.2.21.12.21.683
			3	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	81,41	90,00	110,6	Sangat Baik	Seluruh Eselon II di lingkungan Kedeputian 1	Indikator Direktif Penugasan

No. Kode (Kolom 1)	Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
		4	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	90,0	91,4	101,6	Sangat Baik	Seluruh Eselon II di lingkungan Kedeputan 1	Indikator Direktif Penugasan
		5	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69	60,0	96,4	160,7	Sangat Baik	Seluruh Eselon II di lingkungan Kedeputan 1	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa GAP ke-24 indikator dari tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- d. Kategori “Sangat Baik” terjadi pada 16 (enam belas) indikator berikut:
 - i. Persentase Obat yang memenuhi syarat
 - ii. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat yang aman dan bermutu
 - iii. Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan
 - iv. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat
 - v. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
 - vi. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat
 - vii. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
 - viii. Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan
 - ix. Tingkat Efisiensi KIE di Bidang Obat
 - x. Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar
 - xi. Nilai Pengelolaan Kearsipan
 - xii. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NAPPZA
 - xiii. Nilai Kinerja Anggaran
 - xiv. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
 - xv. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
 - xvi. Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri
- e. Kategori “Baik” terjadi pada 7 (tujuh) indikator berikut:
 - i. Indeks Pengawasan Obat
 - ii. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat
 - iii. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 - iv. Persentase pelayanan publik dibidang obat yang diselesaikan tepat waktu
 - v. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
 - vi. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

- vii. Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
- viii. Kategori “Cukup” terjadi pada 1 (satu) indikator “Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat”

2. 8 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis

Sub bab ini, menguraikan penilaian ketercapaian tujuan secara komprehensif dan dijelaskan penyebab ketercapaian dan ketidaktercapaian tujuan serta dilengkapi dengan rekomendasi sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan. Penilaian ketercapaian tujuan, dinyatakan dalam kategori berikut:

1. Tujuan sudah tercapai/on track jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait lebih dari 100% ($x > 100\%$).
2. Tujuan belum tercapai/perlu kerja keras jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait kurang dari 100% ($x < 100\%$).

Dengan hasil berikut ini:

Tabel 3. 50 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis

Tujuan	Sasaran Strategis	IKSP	Sifat Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C			
Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat yang beredar aman dan bermutu	Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat	Indeks Pengawasan Obat	kumulatif	80	85,72	107,15	91	85,64	94,11	92,25	89,16	96,65	93,5	95,03	101,64	94,75	92,02	97,12	99,334	102,14	Tujuan sudah tercapai/on track
		Persentase obat yang memenuhi syarat	kumulatif	89,1	97,84	109,81	95,50	96,29	100,83	96	98,12	102,21	96,5	97,22	100,75	97,3	97,7	100,41	102,658		
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	kumulatif	71	89,46	126	89,6	83,43	93,11	89,7	83,43	93,01	89,9	93,79	104,33	93,79	93,79	100	103,29		
Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan obat	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat	kumulatif	84,5	79,92	94,58	87	85,87	98,70	88	89,41	101,6	89	82,71	92,93	91	75,11	82,54	94,07	101,49	Tujuan sudah tercapai/on track
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat yang aman dan bermutu	kumulatif	76,5	79,08	103,37	80	79,26	99,08	81,5	84,2	103,31	84	87,12	103,71	87,5	90,44	103,36	102,566		

Tujuan	Sasaran Strategis	IKSP	Sifat Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C			
		Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	kumulatif	46	45,13	98,11	47	53,62	114,09	48	54,37	113,27	49	55,16	112,57	55,2	55,8	101,09	107,826		
Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing dan kemandirian Industri Obat Nasional	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	kumulatif	82,5	85,14	103,2	86	86	100	87	93,2	106,7	88	96,3	109,43	96,5	97,09	100,61	103,988	101,88	Tujuan sudah tercapai/on track
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	kumulatif	72	75,12	104,33	77	69,38	90,10	80	77,24	97,24	83	81,19	97,82	86	85,15	99,01	97,7		
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	kumulatif	83,5	85,21	102,05	87	89,11	102,43	88	89,04	101,18	89	90,03	101,16	92	93,84	102	101,764		

Tujuan	Sasaran Strategis	IKSP	Sifat Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C			
	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar	kumulatif	60	61,11	101,85	82	86,11	105,01	85	86,11	101,31	89	89,07	100,08	92	96,43	104,82	102,614		
Terwujudnya kelembagaan pengawasan obat yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Meningkatkan kapasitas SDM pengawasan obat		Presentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	kumulatif	-	87,42	-	87,5	95,99	109,71	88,5	97,63	110,32	89,5	96,28	107,58	98	96,32	98,29	106,605	108,15	Tujuan sudah tercapai/on track
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	kumulatif	77	74,68	96,99	78	75	96,15	79	76,74	97,14	80	81,77	102,21	82	91,63	111,74	100,846		
		Indeks pelayanan publik di bidang Obat	kumulatif	3,41	3,98	116,72	4,12	4,21	102,18	4,28	4,54	106,07	4,44	4,67	105,18	4,7	4,87	103,57	106,744		
		Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	kumulatif	82	84,71	103,31	85	82,44	96,98	86	86,68	100,8	87	92,05	105,80	92,1	87,76	95,29	100,436		

Tujuan	Sasaran Strategis	IKSP	Sifat Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C			
		Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	kumulatif	87,3	90,59	103,77	90,77	92,81	102,25	92,59	93,8	101,31	94,44	93,07	98,55	93,9	98,36	104,75	102,126		
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	kumulatif	83	79,32	95,57	86,7	86,02	99,22	88,3	92,4	104,64	89,9	92,18	102,54	93,19	92,69	99,46	100,286		
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	kumulatif	81	77,18	95,28	79,7	78,44	98,42	82,2	79,55	96,78	84,7	80,69	95,27	81,94	81,08	98,95	96,94		
	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	kumulatif	1,51	0,25	16,56	2	1,25	62,5	2,26	2,7	119,47	2,5	2,7	108	3	3	100	81,306		

Tujuan	Sasaran Strategis	IKSP	Sifat Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C			
	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	kumulatif	93,2	95,82	102,81	93,3	93,6	100,32	93,4	94,13	99,85	93,5	91,58	97,95	93,06	96,61	103,81	100,948		
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	kumulatif	100	100	100	100	91,20	91,20	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-		
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	kumulatif	IKSP baru tahun 2024												81,41	90	110,55	110,55		
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	kumulatif	IKSP baru tahun 2024												90	91,41	101,57	101,57		

Tujuan	Sasaran Strategis	IKSP	Sifat Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C			
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	kumulatif	IKSP baru tahun 2024												60	96,44	160,73	160,73		
Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	kumulatif	77	83,40	108,31	82,6	87,42	105,84	83,33	86,69	104,03	84,06	91,19	108,48	90,9	88,44	97,29	104,79	104,79	Tujuan sudah tercapai/on track

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa semua tujuan sasaran strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA telah tercapai.

3.9 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 3. 51 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW 3 Tahun 2024 dan Rekomendasi TW 4 Tahun 2024

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pengawasan Obat	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 91,35	Tidak dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 karena diperkirakan dapat mencapai target 2024 (94,75)	TW 4/2024	Tidak dilakukan revisi target untuk tahun 2023.	-	-	✓ Realisasi 2024 = 92,02, Capaian= 97,12% ✓ Belum mencapai target yang ditentukan. ✓ Realisasi terbesar dibandingkan komoditi lain
2	Persentase obat yang memenuhi syarat	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 97,22% (menurun dari tahun 2022)	Terdapat perubahan target tahun 2024 sesuai dengan rekomendasi hasil revidu dengan Biro Perencanaan dan Keuangan	TW 4/2024	1) Telah dilakukan revisi target untuk 2024 menjadi 97,3 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi pengawasan mutu obat melalui sampling dan pengujian. 3) Pengawasan iklan dan label obat oleh UPT BPOM yang telah dilaksanakan pada beberapa UPT BPOM terpilih berdasarkan prioritas 4) Intensifikasi pelaksanaan pedoman sampling yang telah ditetapkan 5) Koordinasi yang baik antara Pusat dan UPT BPOM	-	-	✓ Realisasi 2024 = 97,7 ✓ Capaian= 100,41% ✓ Telah mencapai target yang ditentukan.
3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 82,71 (menurun dari tahun 2022)	Tidak dilakukan perubahan target karena diperkirakan dapat mencapai target 2024.	TW 4/2024	Tidak dilakukan revisi target untuk tahun 2024.	-	-	✓ Realisasi 2024 = 75,11 ✓ Capaian= 82,54% ✓ Belum mencapai target yang ditentukan.
4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat yang aman dan bermutu	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 87,12 (meningkat dari tahun 2022)	Target dinaikkan untuk tahun 2024 menjadi 87,5.	TW 4/2024	Dilakukan perubahan target untuk tahun 2024 (87,5).	-	-	✓ Realisasi 2024 = 90,44 ✓ Capaian= 103,36% ✓ telah mencapai target yang ditentukan.

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 55,16 (meningkat dari tahun 2022)	Target dinaikkan untuk tahun 2024 menjadi 55,2.	TW 4/2024	Dilakukan perubahan target untuk tahun 2024 (55,2).	-	-	✓ Realisasi 2024 = 55,8 ✓ Capaian= 101,09% ✓ telah mencapai target yang ditentukan.
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 96,3 (meningkat dari tahun 2022)	Target dinaikkan untuk tahun 2024 menjadi 96,5.	TW 4/2024	Dilakukan perubahan target untuk tahun 2024 (96,5).	-	-	✓ Realisasi 2024 = 97,09 ✓ Capaian= 100,61% ✓ telah mencapai target yang ditentukan.
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 81,19 (meningkat dari tahun 2022)	Tidak ada perubahan target untuk tahun 2024.	TW 4/2024	Tidak dilakukan perubahan target untuk tahun 2024.	-	-	✓ Realisasi 2024 = 85,15 ✓ Capaian= 99,01% ✓ belum mencapai target yang ditentukan.
8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 90,03 (meningkat dari tahun 2022)	Target dinaikkan untuk tahun 2024 menjadi 92.	TW 4/2024	Dilakukan perubahan target untuk tahun 2024 (92).	-	-	✓ Realisasi 2024 = 93,84 ✓ Capaian = 102% ✓ Sudah mencapai target yang ditentukan
9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 93,79 (meningkat dari tahun 2022)	Target dinaikkan untuk tahun 2024 menjadi 93,79.	TW 4/2024	Dilakukan perubahan target untuk tahun 2024 (93,79).	-	-	✓ Realisasi = 93,79 ✓ Capaian= 100% ✓ telah mencapai target yang ditentukan
10	Presentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	- Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 96,28 - Pada TW 3 tahun 2024, realisasi meningkat menjadi 96,78	1) Revisi target untuk tahun 2024 2) Percepatan tindak lanjut laporan obat TMS dilakukan melalui pembahasan dengan unit kerja terkait di	TW 4/2024	1) Revisi target untuk tahun 2024 2) Percepatan tindak lanjut laporan obat TMS dilakukan melalui pembahasan dengan unit kerja terkait di Kedeputian I, PPPOMN serta UPT BPOM Penguji. 3) Mengoptimalkan monitoring pemenuhan timeline tindak lanjut laporan obat TMS serta laporan Industri Farmasi	-	-	✓ Realisasi = 96,32 ✓ Capaian= 98,29% ✓ belum mencapai target yang ditentukan

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kedeputian I, PPPOMN serta UPT BPOM Penguji. 3) Mengoptimalkan monitoring pemenuhan timeline tindak lanjut laporan obat TMS serta laporan Industri Farmasi					
11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 81,77% (meningkat dari tahun 2022)	1) Target dinaikkan untuk tahun 2024 menjadi 82 2) Peningkatan koordinasi dan bimbingan teknis kepada stakeholder terkait hasil pengawasan dan monitoring dan koordinasi intens dengan lintas sektor hingga akhir tahun tetap harus dilaksanakan dengan berkala dan intensif	TW 4/2024	1) Dilakukan perubahan target untuk tahun 2024 (82). 2) Peningkatan koordinasi dan bimbingan teknis kepada stakeholder terkait hasil pengawasan dan monitoring dan koordinasi intens dengan lintas sektor hingga akhir tahun tetap harus dilaksanakan dengan berkala dan intensif	-	-	✓ Realisasi 2024 = 91,63 ✓ Capaian= 111,74% ✓ Telah mencapai target yang ditentukan
12	Indeks pelayanan publik di bidang Obat	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 4,67 (meningkat dari tahun 2022)	Target dinaikkan untuk tahun 2024 menjadi 4,7	TW 4/2024	Dilakukan perubahan target untuk tahun 2024 (4,7).	-	-	✓ Realisasi 2024 = 4,87 ✓ Capaian= 103,62 % ✓ telah mencapai target yang ditentukan.

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 92,05% (meningkat dari tahun 2022)	1) Target dinaikkan untuk tahun 2024 menjadi 92,1 2) Pendampingan terhadap sarana produksi obat melalui diskusi/konsultasi dua arah secara online /offline. 3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan desk prasertifikasi CPOB dan evaluasi pemenuhan CPOB obat impor. 4) Bimbingan teknis dan sosialisasi untuk industri farmasi. 5) Penyelesaian berkas dengan desk konsul dokumen carry over 6) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal dalam penyelesaian permohonan penilaian termasuk monitoring dan evaluasi	TW 4/2024	Seluruh rekomendasi di kolom 4 telah selesai dilaksanakan	-	-	✓ Realisasi = 87,76 ✓ Capaian = 95,29% ✓ belum mencapai target yang ditentukan.
14	Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 93,07%	Target diturunkan untuk tahun 2024 menjadi 93,9	TW 4/2024	1) Dilakukan perubahan target untuk tahun 2024 (93,9).	-	-	✓ Realisasi 2024 = 98,36 ✓ Capaian= 104,75%

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(menurun dari tahun 2022)			2) Kordinasi terkait penjadwalan dengan Tokoh Masyarakat			✓telah mencapai target yang ditentukan.
15	Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 89,07% (meningkat dari tahun 2022)	Target dinaikkan untuk tahun 2024 menjadi 92	TW 4/2024	1) Dilakukan perubahan target untuk tahun 2024 (92). 2) Penyelenggaraan desk konsul bagi pelaku usaha dan bimtek pada TW 3 telah dilakukan workshop CPOB Produk Biologi bagi para inspektur CPOB untuk meningkatkan kompetensi personil yang melakukan inspeksi CPOB ke fasilitas produksi produk biologi dan mengevaluasi dokumen terkait. 4) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal dalam penyelesaian permohonan penilaian termasuk monitoring dan evaluasi. 5) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan desk pra sertifikasi CPOB dan evaluasi pemenuhan CPOB obat impor	-	-	✓ Realisasi 2024 = 96,43 ✓ Capaian = 104,82% ✓Telah mencapai target yang ditentukan
16	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 92,18 (menurun dari tahun 2022)	Target dinaikkan untuk tahun 2024 menjadi 93,19	TW 4/2024	Dilakukan perubahan target untuk tahun 2024 (93,19).	-	-	✓ Realisasi = 92,69 ✓ Capaian= 99,46% ✓ Belum mencapai target yang ditentukan
17	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 80,69 (meningkat dari tahun 2022)	Target diturunkan untuk tahun 2024 menjadi 81,94	TW 4/2024	Dilakukan perubahan target untuk tahun 2024 (81,94).	-	-	✓ Realisasi 2024 = 81,08 ✓ Capaian = 98,95% ✓ Belum mencapai target yang ditentukan
18	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 91,19 (meningkat dari tahun 2022)	Target diturunkan untuk tahun 2024 menjadi 90,90	TW 4/2024	Dilakukan perubahan target untuk tahun 2024 (90,90).	-	-	✓ Realisasi = 88,49 ✓ Capaian= 97,35 % ✓ Belum mencapai target yang ditentukan

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 2,7 (sama dengan tahun 2022)	Target dinaikkan untuk tahun 2024 menjadi 3	TW 4/2024	1) Dilakukan perubahan target untuk tahun 2024 (3). 2) Dilakukan penunjukan PIC yang bertugas secara rutin melakukan verifikasi pemutakhiran data dasbor unit kerja, mengingatkan seluruh pegawai untuk menggunakan email corporate, dan akses dasbor BOC Pimpinan Unit Kerja Eselon II, dan memonitoring penggunaan email corporate pegawai setiap bulan 3) Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk penanganan kondisi down pada aplikasi penunjang kerja	-	-	✓ Realisasi = 3,6 ✓ Capaian = 120% ✓ telah mencapai target yang ditentukan.
20	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini yaitu 91,58 (menurun dari tahun 2022)	Target diturunkan untuk tahun 2024 menjadi 93,06	TW 4/2024	Dilakukan perubahan target untuk tahun 2024 (93,06).	-	-	✓ Realisasi 2024= 96,61 ✓ Capaian = 103,81% ✓ Telah mencapai target yang ditentukan
21	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	-	-	-	-	-	-	✓ IKU ini dihapus
22	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	✓ Realisasi 2024 = 90 ✓ Capaian = 110,57% ✓ Telah mencapai target yang ditentukan
23	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	✓ Realisasi = 91,41 ✓ Capaian= 101,57% ✓ Telah mencapai target yang ditentukan
24	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	✓ Realisasi = 96,44 ✓ Capaian = 160,73%

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai **	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								✓telah mencapai target yang ditentukan.
25	Nilai Pengelolaan Kearsipan	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	✓ Realisasi = 96,02 ✓ Capaian = 100,88% ✓Telah mencapai target yang ditentukan

3.10 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Sebagai bentuk pemanfaatan informasi pada laporan kinerja, Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA senantiasa melakukan penyesuaian terhadap strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja untuk tahun berikutnya. Namun, sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tentunya berdampak pada anggaran di BPOM, maka terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan yaitu:

3.10.1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Secara umum, penyesuaian aktivitas untuk mencapai target kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran program. Penyesuaian ini perlu dilakukan agar dapat mencapai target di tahun berikutnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Pengalihan kegiatan secara daring dan pemanfaatan sarana/prasarana kantor untuk kegiatan rapat/sosialisasi/bimbingan teknis/kegiatan pertemuan lain serta mengurangi kegiatan luar lainnya.
- b. Meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan secara umum, terutama pemberian informasi kepada masyarakat, peningkatan frekuensi pengawasan dan penindakan di area rural dan perbatasan melalui pengawasan berbasis komunitas dan meningkatkan penindakan produk ilegal di pasar offline dan online.
- c. Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media.
- d. Meningkatkan kerja sama dengan media dalam publikasi aktivitas pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja.
- f. Menjalinkan kerja sama dengan pelaku usaha dalam mempromosikan BPOM dan menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen.

- g. Melaksanakan Forum Koordinasi Pusat dan UPT BPOM dalam rangka manajemen sampling obat yang melibatkan UPT BPOM seluruh Indonesia.
- h. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal dalam penyelesaian permohonan penilaian termasuk monitoring dan evaluasi.

3.10.2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada anggaran di BPOM, maka dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3. 52 Penyesuaian penggunaan anggaran untuk tahun 2025

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 – Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 – Persentase Obat yang aman dan bermutu		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	11,353,073,000
		02 – Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat												88.05	4,071,170,000
		03 – Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti												30	2,175,000,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		oleh lintas sektor													
		04 - Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	4,605,876,000
		05 - Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	1,983,071,000
		06 - Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	157,547,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		07 - Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	833,687,000
		08 - Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter			4.9			4.9			4.9			4.9	325,000,000
2.	05 - Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu												90.6	2,500,000,000
3.	06 - Meningkatkan efektifitas regulatory	01 - Persentase pengawasan hilirisasi Obat			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	3,419,326,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar													
		02 - Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya												52	279,700,000
4.	09 - Layanan Publik BPOM yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat												4.68	10,417,571,000
5.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Deputy 1												92.9	1,244,008,000
		02 - Nilai AKIP Deputy 1												81.47	2,380,428,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputy 1												5	3,930,271,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko Deputy 1												2.97	683,133,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
													Total	50,358,861,000	

3.10.3 Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode Berikutnya

Menindaklanjuti hasil capaian pada tahun 2024, Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA telah melakukan beberapa penyesuaian terhadap target IKSP tahun 2025 maupun dalam tahun renstra 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 3. 53 Penyesuaian Kinerja Sesuai Hasil Evaluasi Kinerja

Indikator Sasaran Program	Baseline	Realisasi	Target				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IKSP1. Persentase Obat yang aman dan bermutu	90%		90%	91%	92%	93%	94%
IKSP2. Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	-	-	88,05	89	90	91	92
IKSP3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82%	91,63%	84,00 %	84,5%	85,0%	85,5%	86,0%
IKSP4. Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	72,96		77%	79%	81%	83%	85%
IKSP5. Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	77,50%		78,50 %	79%	79,50%	80%	80,50 %
IKSP6. Persentase penurunan Apotek yang melakukan penyerahan Antibiotik tanpa resep dokter			4,9 %	5,10%	7,70%	8,30%	9,1 %
IKSP7. Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan	78%		79%	80%	81%	82%	83%
IKSP8. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan	-		75%	77%	79%	81%	83%
IKSP9. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	87,12	90,44	90,6	90,7	90,8	90,9	91

Indikator Sasaran Program	Baseline	Realisasi	Target				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IKSP10. Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	70%		75%	78,50%	82%	84,50%	87%
IKSP11. Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	-		52%	54%	56%	58%	60%
IKSP12. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	4,67	4,87	4,68	4,73	4,78	4,83	4,88
IKSP 13. Nilai Pembangunan ZI Deputy 1	92,18	92,69	92,9	93,09	93,28	93,47	93,63
IKSP 14. Nilai AKIP Deputy 1	80,69	81,08	81,47	81,86	82,25	82,64	83,03
IKSP 15. Nilai Kinerja Anggaran Deputy 1	91,58	98,86	5	5	5	5	5
IKSP 16. Indeks Manajemen Risiko Deputy 1	2,906	2,938	2,97	3	3,03	3,06	3,1

3.11 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2024 adalah sebesar Rp. 53.801.474.000 sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan No. SP DIPA-063.01.1.445155/2024 tanggal 24 November 2023 dengan rincian sumber dana dari Rupiah Murni sebesar Rp. 40.194.817.000 dan PNPB sebesar Rp. 13.606.657.000.

Pada bulan Maret Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA mendapatkan tambahan anggaran untuk kegiatan Trimonthly Risk management Program JKN sebesar Rp. 585.510.000 sehingga pagu pada revisi DIPA 4 menjadi Rp. 54.386.984.000. terdapat juga pengesahan hibah sebesar Rp. 78.797.000 total rincian pagu menjadi Rp. 54.465.781.000.

Sampai dengan akhir tahun 2024 telah dilakukan 9 kali revisi DIPA terdapat perubahan Pagu menjadi sebesar Rp. 54.465.781.000 blokir anggaran sebesar Rp. 3.612.654.000 sehingga Pagu yang dapat digunakan sebesar **Rp. 50.853.127.000**.

Realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. **50.852.195.676 (99,998%)** dibandingkan dengan Pagu yang dapat digunakan, sedangkan jika dibandingkan dengan pagu **Rp. 54.465.781.000** realisasi menjadi 93,37%, dengan rincian per Kode Kegiatan sebagai berikut:

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF							
LAPORAN PAGU DANA PER KEGIATAN							
No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	3185 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3.462.465.000	3.462.458.198	100.00%	0	0	8.802
2	4122 Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	6.997.315.000	6.487.817.005	92.72%	0	509.454.000	43.995
3	4123 Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	14.068.111.000	12.941.832.385	91.59%	0	1.127.251.000	27.805
4	4125 Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	10.527.153.000	9.725.678.849	92.39%	0	801.110.000	366.151
5	4127 Registrasi Obat	11.215.579.000	10.680.878.910	95.05%	0	554.508.000	332.080
6	4131 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	8.194.158.000	7.573.734.319	92.43%	0	620.271.000	152.881
Jumlah		54.465.781.000	50.852.195.676	93.37%	0	3.612.654.000	931.324

3.6.1 Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Dengan adanya anggaran yang mengalami pemblokiran yang berdampak pada perubahan alokasi anggaran di setiap indikator kinerja, adapun perubahan alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3. 54 perubahan anggaran pada setiap indikator kinerja

No	Indikator Kinerja	Alokasi Pagu	Perubahan Alokasi Pagu
1	Indeks Pengawasan Obat	414.523.000	396,541,000
2	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	6.514.695.000	6,320,560,000
3	Indeks Kepatuhan (<i>Compliance index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat	1.968.129.200	2,235,963,600
4	Indeks Kesadaran (<i>Awareness index</i>) Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	632.183.000	632,168,000
5	Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan	1.053.879.000	857,574,000
6	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat	604.780.000	518,523,000
7	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat	3.169.660.000	3,479,602,000
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	787.161.596	1,738,516,000
9	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	4.156.296.000	3,315,350,000
10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	4.524.891.800	496,541,000
11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	4.230.583.000	3,480,216,600
12	Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu	1.673.263.596	1,231,825,000,00
13	Indeks pelayanan publik di Bidang Obat	4.319.848.000	5,516,357,000,00
14	Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	2.135.525.000	3,064,325,000

15	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	2.686.107.000	2,204,302,000
16	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	4.630.705.450	4,929,677,350
17	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	1.054.870.000	4.205.249.000.0
18	Nilai Pengelolaan Kearsipan	620.373.125	569,106,100
19	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	2.446.580.000	2,729,593,000
20	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Baik	675.987.350	710,582,550
21	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	675.987.350	4,767,157,000
22	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	419.179.000	419,179,000
23	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	419,179,000	419,179,000
24	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	419,179,000	355,517,000
Total Anggaran		54.465.781.000	50.853.127.000

Tabel 3. 55 Perbandingan Realisasi Kinerja vs Realisasi Anggaran

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target akhir tahun	Realisasi Kinerja TW 4 Tahun 2024			Anggaran (Rp)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Sasaran Program 02 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat serta kepatuhan industri produk tembakau	01 - Indeks Kepatuhan (<i>Compliance index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat	91	91	75,11	82,54%	Rp 2,235,963,600	Rp 2,235,880,226	100.00%
		02 - Indeks Kesadaran (<i>Awareness index</i>) Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	87,5	87,5	90,44	103,36%	Rp 632,168,000	Rp 632,167,494	100.00%
		03 - Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam label dan iklan	55,2	55,2	55,8	101,09%	Rp 857,574,000	Rp 857,571,264	100.00%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target akhir tahun	Realisasi Kinerja TW 4 Tahun 2024			Anggaran (Rp)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2	Sasaran Program 07 Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	01 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	93,79	93,79	93,79	100,00%	Rp 3,315,350,000	Rp 3,315,214,899	100.00%
3	Sasaran Program 10 Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat	01 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98%	98	96,32	98,29%	Rp 9,350,683,800	Rp 9,350,683,800	100.00%
		02- Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82	82	91,63	111,74	Rp 3,480,216,600	Rp 3,480,149,727	100.00%
		03- Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu	92,1	92,1	87,76%	95,29%	Rp 2,774,370,000	Rp 2,774,224,368	99.99%
		04 - Indeks pelayanan publik di Bidang Obat	4,7	4,7	4,87	103,57%	Rp 1,738,516,000	Rp 1,738,497,938	100.00%
		05 - Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	93,9	93,9	98,36	104,75%	Rp 3,064,325,000	Rp 3,018,726,198	98.51%
4	Sasaran Program 16	01 - Indeks Pengawasan Obat	94,75	94,75	diukur akhir tahun	diukur akhir tahun	Rp 396,541,000	Rp 396,518,276	99.99%
	Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu	02 - Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97,3	97,3	97,7	100,41%	Rp 6,320,560,000	Rp 6,320,549,719	100.00%
5	Sasaran Program 17 Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat	01 - Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat	96,5	96,5	97,09	100,61	Rp 518,523,000	Rp 518,518,479	100.00%
		02 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat	86	86	85,15	99,01	Rp 3,479,602,000	Rp 3,479,501,355	100.00%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target akhir tahun	Realisasi Kinerja TW 4 Tahun 2024			Anggaran (Rp)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	92	92	93,84	102	Rp 603,604,000	Rp 603,576,771	100.00%
6	Sasaran Program 18 Meningkatnya Regulatory Assistance dalam Pengembangan Obat	01 - Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	92	92	96,43	104,82	Rp 2,204,302,000	Rp 2,204,239,197	100.00%
7	Sasaran Program 19 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Kerjasama Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika	01 - Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	93,19	93,19	92,69	99,46	Rp 4,929,677,350	Rp 4,929,555,588	100.00%
		02 - Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	81,94	81,94	81,08	98,95	541,026,000	540,977,252	99.99%
		04 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	95,18	95,18	96,02	100,88	Rp 569,106,100	Rp 569,100,877	100.00%
8	Sasaran Program 20 - Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	90,9	90,9	88,44	97,29	Rp 2,729,593,000	Rp 2,729,502,363	100.00%
9	Sasaran Program 21 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	01 - Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Baik	3	3	3	100	Rp 710,582,550	Rp 710,582,284	100.00%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target akhir tahun	Realisasi Kinerja TW 4 Tahun 2024			Anggaran (Rp)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
10	Sasaran Program 22	01 - Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	93,06	93.06	96,61	103,81	Rp 4,767,157,000	Rp 4,766,622,968	99.99%
	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif secara akuntabel	03 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81,41	81,41	Data belum keluar	N/A	Rp 419,179,000	Rp 419,179,000	100.00%
		04 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	90	90	91,41	101,57	Rp 419,179,000	Rp 419,179,000	100.00%
		05 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60%	60%	96,44	160,73	Rp 355,517,000	Rp 355,517,000	100.00%
	Total						50,853,127,000	50,847,113,452	99,998%

3.6.2 Realisasi anggaran per Sasaran Program

Berikut ini merupakan realisasi anggaran per sasaran program

Tabel 3. 56 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran vs Sasaran Program Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Rp3.725.705.600,00	Rp3.725.618.984,40	100
2	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Rp3.315.350.000,00	Rp3.315.214.899,00	100
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat	Rp20.408.111.400,00	Rp20.362.282.031,40	99,77
4	Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu	Rp6.717.101.000,00	Rp6.717.067.995,00	100
5	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat	Rp4.601.729.000,00	Rp4.601.596.605,00	100
6	Meningkatnya Regulatory Assistance dalam Pengembangan Obat	Rp. 2,204,302,000	Rp. 2,204,239,197	100
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Kerjasama Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika	Rp. 6,039,809,450	Rp. 6,039,633,717	100
8	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal	Rp2.729.593.000,00	Rp2.729.502.363,00	100

No.	Sasaran Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	Rp710.582.550,00	Rp710.582.283,50	100
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif secara akuntabel	Rp5.961.032.000,00	Rp5.960.497.968,00	100

3.6.3 Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran program

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien. apabila: $IE < SE$ maka dianggap tidak efisien

bel 3. 57 Perhitungan Efisiensi Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Indikator (%) (a)	Anggaran Capaian (%) (b)	Indeks Efisiensi (IE) a/b	Nilai Efisiensi (TE) TE=(IE-1)/1	Kategori
Sasaran Program 02 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks Kepatuhan (Compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat	82,54	100	0,8254	-0,1746	Tidak Efisien (-0,04)
	Indeks Kesadaran (Awareness index) Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	103,36	100	1,0336	0,0336	
	Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam label dan iklan	101,09	100	1,0109	0,0109	
Sasaran Program 07 Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	100	100	1	0	Efisien (0,028)
Sasaran Program 10 Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,29	100	0,9829	-0,0119	
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	111,74	100	1,1174	0,1174	
	03- Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu	95,29	99,99	0,9529953	-0,0470047	
	Indeks pelayanan publik di Bidang Obat	103,5	100	1,035	0,035	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Indikator (%) (a)	Anggaran Capaian (%) (b)	Indeks Efisiensi (IE) a/b	Nilai Efisiensi (TE) TE=(IE-1)/1	Kategori
	Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	104,74	98,51	1,06324231	0,06324231	
Sasaran Program 16 Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu	Indeks Pengawasan Obat	92,2	99,99	0,922092209	-0,077907791	Tidak Efisien (-0,04)
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	100,41	100	1,0041	0,0041	
Sasaran Program 17 Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat	100,61	100	1,0061	0,0061	Efisien (0,05)
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat	99,01	100	0,9901	-0,0099	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	102	100	1,02	0,02	
Sasaran Program 18 Meningkatnya Regulatory Assistance dalam Pengembangan Obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	104,82	100	1,0482	0,0482	Efisien
Sasaran Program 19	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	99,46	100	0,9946	-0,0054	Tidak Efisien (-0,02)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Indikator (%) (a)	Anggaran Capaian (%) (b)	Indeks Efisiensi (IE) a/b	Nilai Efisiensi (TE) TE=(IE-1)/1	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Kerjasama Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	98,95	99,99	0,98959896	-0,01040104	Tidak Efisien
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	100,88	100	1,0088	0,0088	Efisien
Sasaran Program 20 - Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	97,35	100	0,9735	-0,0265	Tidak Efisien
Sasaran Program 21 Memperkuatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Baik	100	100	1	0	Efisien
Sasaran Program 22 Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	103,81	99,99	1,03820382	0,03820382	Efisien (0,19)
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	110,55	100	1,1055	0,1055	Efisien
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	101,57	100	1,0157	0,0157	Efisien
	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	160,73	100	1,6073	0,6073	Efisien

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran program Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA 6 sasaran program efektif dan 4 sasaran program tidak efektif



BAB IV: HASIL EVALUASI TAHUN KE-5

Pada bab ini akan dijelaskan hasil evaluasi indikator kinerja tahun ke-5 pada Deputy Bidang pengawasan ONPPZA.

4.1 Target Kinerja Periode Akhir Renstra

1. Direktorat Standardisasi ONPPZA

Tabel 4. 1 Target Kinerja Direktorat Standardisasi ONPPZA hingga Akhir Periode Renstra

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	71,00	89,60	89,70	86,10	94,00
2	Tersedianya Identifikasi kebutuhan standar ONPPZA	Persentase Kesesuaian Perencanaan Penyusunan Standar ONPPZA sesuai Roadmap	80,00	83,00	0,00	0,00	0,00
3	Penyusunan standar ONPPZA yang efektif	Persentase standar ONPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	84,00	86,00	89,00	90,00	95,50
4	Sosialisasi standar ONPPZA yang efektif	Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada stakeholder yang efektif	92,00	88,00	89,00	90,00	95,00
5	Pelayanan publik di bidang standardisasi ONPPZA	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang standardisasi ONPPZA	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50
6	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik di Direktorat Standardisasi ONPPZA	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi ONPPZA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan dilingkup Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA	85,00	85,33	87,30	89,30	91,79
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
6	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi ONPPZA yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA	75,00	81,00	82,00	83,00	90,35
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat di Direktorat Standardisasi ONPPZA	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	1,51	2,00	2,25	2,50	3,00
8	Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi ONPPZA secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Direktorat Registrasi Obat

Tabel 4. 2 Target Kinerja Direktorat Registrasi Obat hingga Akhir Periode Renstra

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	70	88,5	89	89,5	90
Pelayanan publik di bidang registrasi obat yang prima	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	82	85	86	87	90,75
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang Registrasi Obat	Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	63	66	76	77	78
	Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	70	73	76	79	82
	Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat	3,79	4,01	4,2	4,4	4,8
	Persen pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pre Market terhadap Sarana UK/Lab BE	Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	78	81	84	87	90

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100	100	100	100	100
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Direktorat Registrasi Obat yang optimal	Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	88	88,5	90	90,1	91,3
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	N/A	N/A	N/A	N/A	96,96
Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi Obat yang optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	75	88,5	88,9	89,3	92,54
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi Obat	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	1,51	2	2,25	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi Obat secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	92	93	94	95	100

3. Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA

Tabel 4. 3 Target Kinerja Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA hingga Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Nama Indikator	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan publik di bidang pengawasan iklan Obat dan Ekspor Impor Obat dan NPP yang prima	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor.	85	87	88	89	92
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Obat dan NPP dalam rangka penjaminan mutu keamanan informasi Obat dan NPP serta promosi Obat	Indeks Kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan Obat dan NPP	86	84,7	87	93	93,5
Kepatuhan industri produk tembakau yang tinggi atas aturan pengawasan label, promosi, dan iklan produk tembakau	Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam label dan iklan	46,00	47,00	48,00	49,00	55,20
Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor Obat dan NPP	Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	70	72	74	76	78
	Jumlah permohonan ekspor impor Obat dan NPP yang diselesaikan tepat waktu	16.300	18.000	18.100	18.100	22.500
	Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	3,11	4,45	4,51	4,25	4,7
	Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	87,3	90,77	92,59	94,44	93,91

Sasaran Strategis	Nama Indikator	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas pengawasan keamanan dan mutu Obat dan NPP	Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70	70	70	70	80,20
	Persentase laporan pengawasan mutu, label dan iklan obat dan NPP yang ditindaklanjuti	86	86	87	87	88
Meningkatnya efektivitas pengawasan produk tembakau	Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	50000	60200	60400	60400	60800
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang efektif	Nilai RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	90	87,4	88,4	89,4	95,43
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	(belum ada IKU pengelolaan kearsipan)				89,68
Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	75	78	79	80	91,26
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	1,51	2	2,25	2,5	3

Sasaran Strategis	Nama Indikator	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terkelolanya Keuangan secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	98	98	98	98	98

4. Direktorat Pengawasan Produksi ONPP

Tabel 4. 4 Target Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi ONPP hingga Akhir Periode Renstra

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Sarana Produksi Obat yang Mandiri	IKK1. Persentase sarana produksi obat yang mandiri dalam pemenuhan CPOB	50%	55%	60%	65%	77,20%
2	Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Sarana Produksi Obat yang Prima	IKK2. Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	85	87	88	89	91

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Meningkatnya Sarana Produksi Obat JKN, Bahan Baku Obat, dan Obat High Risk Lainnya yang Mematuhi CPOB	IKK3. Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	72%	74%	76%	78%	76%
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Obat Berbasis Risiko	IKK4. Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	90%	95%	95%	100%	100%
		IKK5. Persentase fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku yang diawasi sesuai standar	84%	86%	90%	91%	94%
		IKK6. Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	72%	74%	76%	78%	80%
5	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Sarana Produksi Obat	IKK7. Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi bahan baku obat, obat, produk biologi dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	65%	70%	75%	80%	85%
		IKK8. Indeks pelayanan publik	3,51	3,76	4,01	4,4	4,85
6	Meningkatnya Kemampuan Mendorong Inovasi Pengembangan Obat	IKK9. Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	60%	65%	70%	75%	85%

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi ONPP yang Optimal	IKK10. Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	85	89	93	88,4	94,1
8	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Produksi ONPP yang Berkinerja Optimal	IKK11. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	75	77.00	87,75	88.00	91.22
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	IKK12. Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi ONPP yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3
10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan Produksi ONPP secara Akuntabel	IKK13. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	95	95	100	95	100
		IKK14. Nilai Pengelolaan Kearsipan	N/A	N/A	N/A	96.48	97.75

5. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP

Tabel 4. 5 Target Kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP hingga Akhir Periode Renstra

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kepatuhan stakeholder di bidang distribusi dan pelayanan obat	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70%	75%	77%	79%	81%
2	Meningkatnya kepuasan stakeholder di bidang pengawasan distribusi obat	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan publik di bidang distribusi obat	87,5	89	90	91	93,5
3	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	80%	81%	86%	87%	95,5%
		Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan	N/A	N/A	86%	87%	97%
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai	65%	79%	80%	81%	88%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat	Persentase keputusan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	65%	70%	75%	80%	85%
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	3,51	4,01	4,20	4,40	4,65

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat	N/A	N/A	75%	80%	85%
5	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP	90	91	93	94	93,33
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	N/A	N/A	N/A	N/A	96,94
6	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Produksi ONPP yang Berkinerja Optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP	75	77	80	82	87,21
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3
8	Terkelolanya Keuangan di Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	88	88	88	88	100

4.2 Analisis Capaian Kinerja

4.2.1 Analisis Tren (Tahun ke-5)

1. Direktorat Standardisasi Obat NPPZA

Tabel 4. 6 Analisis Tren Tahun ke-5 Direktorat Standardisasi ONPPZA

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024						PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024												Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R										
																1	2								
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	79	71	89,4	89,6	83,43	89,7	83,43	86,1	93,79	94	93,79	2019	79	2024	93,79	93,79	5	5	0,03	0,03	100,00	Meningkat (On The Track)	
2	Tersedianya Identifikasi kebutuhan standar ONPPZA	Persentase Kesesuaian Perencanaan Penyusunan Standar ONPPZA sesuai Roadmap	N/A	80	100	83	100	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseli ne (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024						PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024												Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R										
												1	2	3	4	5	6								
3	Penyusunan standar ONPPZA yang efektif	Persentase standar ONPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	76,92	84	83,33	86	100	89	100	90	100	95,5	100	2019	76,92	2024	100	95,50	5	5	0,04	0,05	121,85	Meningkat (On The Track)	
4	Sosialisasi standar ONPPZA yang efektif	Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada stakeholder yang efektif	93,75	92	91,19	88	84,48	89	94,32	90	94,6	95	96,24	2019	93,75	2024	96,24	95,00	5	5	0,00	0,01	198,17	Meningkat (On The Track)	
2	Pelayanan publik di bidang standarisasi ONPPZA	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang standarisasi ONPPZA	N/A									85,5	95,37	2023	84,92	2024	95,37	85,5	1	1	0,01	0,12	1.801,72	Meningkat (On The Track)	

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024						PERKEMBANGAN KINERJA				
				2020		2021		2022		2023		2024												Perkembangan Kinerja	Kategori			
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	5	6									7	8	9
												1	2	3	4													
3	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik di Direktorat Standardisasi ONPPZA	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi ONPPZA	N/A									4,50	4,78	2023	4,41	2025	4,78	5	1	2	0,02	0,04	201,42	Meningkat (On The Track)				
4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan dilingkup Direktorat Standardisasi ONPPZA	Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA	N/A	85,00	72,63	85,33	85,30	87,30	90,98	89,30	90,79	91,79	92,08	2020	72,63	2024	92,08	91,79	4	4	0,06	0,06	101,39	Meningkat (On The Track)				
	Standardisasi ONPPZA yang optimal	Nilai Pengelolaan Kearsipan	N/A							0,00	94,62	94,80	94,37	2023	94,62	2024	93,37	94,80	1	1	0,00	-0,01	-694,44	Menurun				
5	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi ONPPZA yang	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat	N/A	75,00	80,57	81,00	86,94	82,00	86,29	83,00	90,22	90,35	88,72	2020	80,57	2024	88,72	90,35	4	4	0,03	0,02	83,92	Meningkat (Moderat)				

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024						PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024												Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R										
												1	2	3	4	5	6								
	berkinerja optimal	Standardisasi ONPPZA																							
6	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat di Direktorat Standardisasi ONPPZA	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	N/A	1,51	0,00	2,00	1,75	2,25	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	2020	0,00	2024	3,00	3	3	3		N/A	N/A	N/A	
7	Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi ONPPZA secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2020	100,00	2024	100,00		4	4	-1,00	0,00	0,00	Stagnan	

Dalam periode 2020-2024, Direktorat Standardisasi Obat, NPPZA telah mengalami perkembangan capaian kinerja yang bervariasi di berbagai indikator. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat menunjukkan capaian sebesar 100, yang berarti kebijakan pengawasan obat telah berhasil mencapai target optimal sesuai dengan yang direncanakan. Persentase Standar ONPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan mencapai 121,85, mencerminkan efektivitas yang tinggi dalam perencanaan dan implementasi standar.

Sementara itu, Presentase Sosialisasi Standar ONPPZA kepada stakeholder yang efektif mencapai 198,17, menunjukkan bahwa sosialisasi telah berjalan sangat baik dan melampaui target. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di bidang Standardisasi ONPPZA mencapai 1.801,72, mencerminkan peningkatan kepuasan yang luar biasa terhadap layanan yang diberikan. Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi ONPPZA juga mengalami peningkatan yang signifikan dengan capaian sebesar 201,42, yang menunjukkan efektivitas kebijakan dan implementasi layanan.

Dalam hal Reformasi Birokrasi, indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA mencapai 101,39, menandakan bahwa reformasi birokrasi berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditetapkan. Namun, di sisi lain, nilai Pengelolaan Kearsipan mengalami penurunan signifikan dengan capaian sebesar -694,44, yang menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan kearsipan. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA meningkat moderat dengan capaian sebesar 83,92, meskipun masih memiliki ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA tidak dapat terdefinisi karena pada baseline tahun 2020 realisasi kinerjanya nol, namun jika dilihat dari realisasi dan capaian tahun 2021-2024 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Meningkat bahkan realisasi telah mencapai target maksimal dari tahun 2023. Sementara itu, Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA berada pada kategori stagnan, dimana hal ini terjadi dikarenakan sejak awal dilakukan pengukuran terhadap indikator tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan dari tahun 2020-2024 sehingga hingga periode Renstra berakhir capaian dianggap stagnan.

Secara keseluruhan, Direktorat Standardisasi Obat, NPPZA menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan sebagian besar indikator berada dalam kategori *on the track*. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, terutama dalam pengelolaan kearsipan yang mengalami penurunan. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan area yang masih memerlukan perbaikan agar capaian kinerja semakin optimal di masa mendatang.

2. Direktorat Registrasi Obat

Tabel 4. 7 Analisis Tren Tahun ke-5

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Baselin e (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024	N1	N2	R1	R2	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024											Perke mbang an Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	Tahun	R										Tahun	R
												1	2	3	4	5	6						7	8
				SK.1	Obat yang memenuh i persyarat an keamanan dan mutu sebelum diedarkan	IKK 1- Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	65.00	70.00	88.53	88.50	85.17	89.00	84.13	89.50	95.45	90.00	98.63	2019	65.00	2024	94.12	90.00	5	5
SK.2	Pelayanan publik di bidang registrasi obat yang prima	IKK 2- Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	80.00	82.00	82.37	85	88.54	86	87.35	87	90.22	91	93.83	2019	80.00	2024	93.83	90.75	5	5	0.03	0.03	126.90	Meningk at (On The Track)

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Baselin e (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024	N1	N2	R1	R2	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024											Perke mbang an Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R										Tahun	R
				1	2	3	4	5	6	7	8	9												
SK.3	Meningkat nya kualitas pelayanan publik di bidang Registrasi Obat	IKK 3 - Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	67.36	63.00	74.90	66.00	71.21	76.00	66.98	77.00	80.97	78.00	74.17	2019	67.36	2024	74.17	78.00	5	5	0.03	0.02	65.34	Meningk at (Moderat)
		IKK 4 - Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	67.36	70	82.85	73	80.54	76	76.56	79	83.77	82	75.99	2019	67.36	2024	75.99	82.00	5	5	0.04	0.02	60.83	Meningk at (Moderat)
		IKK 5 - Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat	N/A	3.79	3.51	4.01	3.99	4.2	4.51	4.4	4.71	4.8	4.87	2020	3.51	2024	4.87	4.80	4	4	0.08	0.09	104.82	Meningk at (On The Track)
		IKK 6 - Persen pengaduan/ keluhan/ ma sukan terkait registrasi Obat yang	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2019	100.00	2024	100	100.00	5	5	0.00	0.00	0.00	Stagnan

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Baseline (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024	N1	N2	R1	R2	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024											Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	Tahun	R	Tahun	R									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		ditindaklanjuti																						
SK.4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pre Market terhadap Sarana UK/Lab BE	IKK 7 - Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	N/A	78	50	81	57.14	84	90	87	94.74	90	94.12	2020	50.00	2024	94.12	90.00	4	4	0.16	0.17	108.23	Meningkat (On The Track)
SK.5	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat	IKK 8 - Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2020	100	2024	100	100.00	4	4	0.00	0.00	0.00	Stagnan

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Baselin e (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024	N1	N2	R1	R2	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024											Perke mbang an Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R											
				Tahun	R	Tahun	R	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9												
SK.6	Terwujud nya tata kelola pemerinta han di lingkup Direktorat Registrasi Obat yang optimal	IKK 9- Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	N/A	88	80.85	88.5	85.92	90	90.92	90.1	90.24	91.3	91.11	2020	80.85	2024	91.11	91.30	4	4	0.03	0.03	98.26	Meningk at (Moderat)
		IKK 10 -Nilai Pengelolaan Kearsipan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96.96	94.41	2019	N/A	2024	93.37	96.96	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A
SK.7	Terwujud nya SDM Direktorat Registrasi Obat yang optimal	IKK 11 - Indeks Profesionalit as ASN Direktorat Registrasi Obat	N/A	75	88.41	88.5	89.21	88.9	88.94	89.3	92.55	92.54	89.78	2020	88.41	2024	89.78	92.54	5	5	0.01	0.00	33.58	Meningk at (Moderat)
SK.8	Menguatn ya pengelola an data dan informasi pengawas an Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi Obat	IKK 12- Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	N/A	1.51	0	2	0.75	2.25	2	2.5	1.75	3	3	2020	0.00	2024	3	3.00	5	5	0.00	0	0.00	Stagnan

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Baselin e (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024	N1	N2	R1	R2	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024											Perke mbang an Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Tahun	R	Tahun	R							
														1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				SK.9	Terkelola nya Keuangan Direktorat Registrasi Obat secara Akuntabel	IKK 13 - Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	N/A	92	100	93	100	94	100	95	100	100	100	2019	90.00	2024	100	100.00	5	5

Analisis tren terhadap capaian kinerja Direktorat Registrasi Obat menunjukkan adanya hasil yang positif dengan indikator meningkat, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan pre market mampu untuk menjamin obat yang aman, berkhasiat dan bermutu. Dengan adanya lima indikator yang menunjukkan peningkatan moderat, dan lima indikator lainnya menunjukkan perkembangan yang meningkat dan berada di jalur yang tepat (*on track*), hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Registrasi Obat telah melakukan kinerja optimal dalam pengawasan pre market untuk menjamin obat yang aman, berkhasiat dan bermutu. Seluruh kegiatan pendukung mampu meningkatkan kinerja dan anggaran yang digunakan telah efisien dalam membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab peningkatan kinerja tersebut antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Evaluator

Tingkat kompetensi SDM berkontribusi besar dalam ketepatan dan ketajaman dalam melakukan evaluasi. Evaluasi berbasis risiko pada obat-obat yang esensial yang membutuhkan kecepatan dalam evaluasi sangat dibutuhkan SDM handal. Berbagai training dan pelatihan yang diikuti dinilai efektif dalam meningkatkan kompetensi evaluator.

2. Inovasi dalam Teknologi dan Sistem Informasi

Penggunaan teknologi yang lebih canggih, seperti sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis data, dapat mempermudah kegiatan di Registrasi Obat. Pelayanan publik secara online dan penggunaan sarana daring dalam desk registrasi mempersingkat waktu layanan dan mendukung percepatan dalam penerbitan ijin edar.

3. Peningkatan kerjasama lintas sektor

Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait mendukung ekosistem pengawasan pre market, baik dalam hilirisasi riset obat pengembangan baru, pemenuhan Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB), dan pemenuhan standar dokumen registrasi.

3. Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP

Tabel 4. 8 Analisis Tren Tahun ke-5 Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Base line (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024	N1	N2	R1	R2	PERKEMBANGAN KINERJA				
				2020		2021		2022		2023		2024											Perkembangan Kinerja	Kategori			
				T	R	T	R	T	R	T	R	Tahun	R	Tahun	R												
												1	2	3	4	5	6								7	8	9
SK.1	Terwujudnya Sarana Produksi Obat yang Mandiri	IKK1. Persentase sarana produksi obat yang mandiri dalam pemenuhan CPOB	100%	50%	53.33%	55%	65.79%	60%	70%	65%	77.14%	77.20%	90.48%	2019	100%	2024	90.48%	77.20 %	5	5	-0.05	-0.02	39.28	Meningkat (Moderat)			

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Base line (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024	N1	N2	R1	R2	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024											Perkem bangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	Tahun	R	Tahun	R									
												1	2	3	4	5	6							
SK.2	Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Sarana Produksi Obat yang Prima	IKK2. Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	82	85	85.16	87%	88.27%	88	90.4	89	90.45	91	93.75	2019	83	2024	93.75	91	5	5	0.02	0.02	133.94	Meningkat (On The Track)
SK.3	Meningkatnya Sarana Produksi Obat JKN, Bahan Baku Obat, dan Obat High Risk Lainnya yang Mematuhi CPOB	IKK3. Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	70%	72%	82.26%	74%	77.19%	76%	76.20%	78%	68.97%	76%	67.88%	2019	80.58%	2024	67.38%	76%	5	5	-0.01	-0.04	302.08	Meningkat (On The Track)
SK.4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Obat Berbasis Risiko	IKK4. Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan	90%	90%	88.89%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	2019	88.89%	2024	100%	100%	5	5	0.02	0.02	100.00	Meningkat (On The Track)

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Base line (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024	N1	N2	R1	R2	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024											Perkem bangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	Tahun	R	Tahun	R									
												1	2	3	4	5	6							
		sarana produksi di Balai																						
		IKK5. Persentase fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku yang diawasi sesuai standar	80%	84%	88.94%	86%	88.24%	90%	105.31 %	91%	93.97%	94%	101.71 %	2019	90.72%	2024	101.71 %	94%	5	5	0.01	0.02	324.51	Meningkat (On The Track)
		IKK6. Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	N/A	72%	83.07%	74%	74.24%	76%	76.92%	78%	78.26%	80%	80.82%	2019	N/A	2024	80.82%	80%	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A
SK.5	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan	IKK7. Persentase keputusan penilaian fasilitas	60%	65%	73.08%	70%	70.75%	75%	77.54%	80%	82.76%	85%	85.05%	2019	73.18%	2024	85.05%	85%	5	5	0.03	0.03	100.40	Meningkat (On The Track)

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Base line (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024	N1	N2	R1	R2	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024											Perkem bangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Tahun	R	Tahun	R							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9												
	Sarana Produksi Obat	produksi bahan baku obat, obat, produk biologi dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu																						
		IKK8. Indeks pelayanan publik	N/A	3.51	3.89	3.76	4.26	4.01	4.54	4.40	4.78	4.85	4.92	2019	N/A	2024	4.92	4.85	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A
SK.6	Meningkatnya kemampuan mendorong inovasi pengembangan obat	IKK9. Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	N/A	60%	61.11%	65%	72.22%	70%	70.83%	75%	78.13%	85%	92.86%	2019	N/A	2024	92.86%	85%	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Base line (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024	N1	N2	R1	R2	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024											Perkem- bangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R											
				Tahun	R	Tahun	R	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
SK.7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Dit.Was.Produk- si ONPP yang optimal	IKK10. Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	N/A	85	78.38	89	87.78	86.4	92.09	88.40	93.10	94.1	93.37	2019	N/A	2024	93.37	94.1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A
SK.8	Terwujudnya SDM Ditwas Produksi ONPP yang berkinerja optimal	IKK11. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	N/A	75	87.4	77	85.85	87.75	87.13	88	91.41	91.22	88.53	2019	N/A	2024	88.53	91.22	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A
SK.9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP	IKK12. Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi ONPP yang optimal	N/A	1.51	1	2	1.75	2.26	3	2.5	3	3	3	2019	N/A	2024	3	3	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Base line (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024	N1	N2	R1	R2	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024											Perkem- bangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Tahun	R	Tahun	R							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9												
SK.10	Terkelolanya Keuangan Ditwas Produksi ONPP secara Akuntabel	IKK13. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	N/A	95	100	95	100	100	100	95	100	100	100	2019	N/A	2024	100	100	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A
		IKK14. Nilai Pengelolaan Kearsipan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97.75	97.74	2019	N/A	2024	97.74	97.75	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A

Analisis tren terhadap capaian kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP menunjukkan adanya hasil yang positif dalam upaya pengawasan kualitas produksi obat, terutama dalam pemenuhan standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Dengan adanya satu indikator yang menunjukkan peningkatan moderat, dan lima indikator lainnya menunjukkan perkembangan yang meningkat dan berada di jalur yang tepat (*on track*), hal ini mencerminkan bahwa Ditwasprod ONPP telah menjalankan peranannya dengan baik dalam memastikan bahwa produksi obat, termasuk narkotika, psikotropika, dan prekursor, memenuhi standar yang ditetapkan.

Indikator kinerja yang mengalami peningkatan menunjukkan adanya progres positif dalam pelaksanaan kegiatan di Ditwasprod ONPP. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab peningkatan kinerja tersebut antara lain:

4. Perbaikan dalam Sistem Koordinasi

Koordinasi yang lebih baik antara Ditwasprod ONPP dengan *stakeholders* yang berperan dalam kinerja, bisa memastikan setiap tahapan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Hal ini juga mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan untuk penyimpangan.

5. Peningkatan Kapasitas SDM

Sumber daya manusia (SDM) yang lebih terlatih dan kompeten dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan kinerja. Pelatihan dan pengembangan kompetensi di bidang pengawasan, dan peningkatan pemahaman terhadap standar CPOB dapat meningkatkan kualitas kinerja di lingkungan Ditwasprod ONPP.

6. Inovasi dalam Teknologi dan Sistem Informasi

Penggunaan teknologi yang lebih canggih, seperti sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis data, dapat mempermudah kegiatan di lingkungan Ditwasprod ONPP. Teknologi ini memungkinkan cara kerja yang lebih efisien dan mengurangi kemungkinan adanya kesalahan manusia.

7. Peningkatan Kepatuhan Industri

Peningkatan kepatuhan industri farmasi mungkin juga berkontribusi pada perkembangan positif indikator-indikator tersebut. Hal ini bisa dicapai melalui pendekatan persuasif dan edukasi yang dilakukan oleh Ditwasprod ONPP untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya CPOB.

Faktor-faktor diatas dapat saling mendukung satu sama lain dalam menciptakan sistem kinerja yang lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya menghasilkan kinerja yang positif dalam pengawasan produksi obat & NPP.

4. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Tabel 4. 9 Analisis Tren Tahun ke-5 Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Base line (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024	N1	N2	R1		R2	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024												Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Tahun	R	Tahun	R								
				1	2	3	4	5	6	7	8		9												
SK 1	Meningkatnya kepatuhan Stakeholder di bidang distribusi dan pelayanan obat	IKK1 Persentase keputusan hasil pengawasab di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	N/A	70	74,68	75	80,36	77	80,01	79	82,68	81	82,18	2019	N/A	2024	82,18	81	5	5	N/A		N/A	N/A	N/A
SK 2	Meningkatnya kepuasan Stakeholder di bidang pengawasan distribusi obat	IKK2 Indeks kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan publik di bidang distribusi obat	76	87,5	88,01	89	90,26	90	90,73	91	92,94	93,5	94,03	2019	86,36	2024	94,03	93,5	5	5	0,02		0,02	107,18	Meningkat (On The Track)

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Base line (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024	N1	N2	R1		R2	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024												Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	Tahun	R	Tahun	R										
												1	2	3	4	5	6								
				SK.3	Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat	IKK3 Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan Output : Keputusan Hasil Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	80	80	85,24	81	82,73	86	87,89	87	94,52	95,5	96,46	2019	88,16	2024	96,46	95,5	5	5	0,02

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Base line (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024	N1	N2	R1		R2	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024												Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Tahun	R	Tahun	R								
				1	2	3	4	5	6	7	8		9												
		IKK4 Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan	N/A					86	92,59	87	100	97	97,56	2019	N/A	2024	97,56	97	5	5	N/A		N/A	N/A	N/A
		IKK5 Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai	65	65	76	79	84,53	80	81,01	81	87,42	88	93,86	2019	69,22	2024	93,86	88	5	5	0,05		0,06	127,68	Meningkat (On The Track)

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Base line (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024	N1	N2	R1		R2	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024												Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Tahun	R	Tahun	R								
				1	2	3	4	5	6	7	8		9												
SK.4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat	IKK6 Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang diselesaikan tepat waktu Output : Keputusan Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang diselesaikan tepat waktu	95	78	84,33	80	93,76	86	89,26	94	94,63	96	96,17	2019	92,30	2024	96,17	96	5	5	0,01		0,01	104,52	Meningkat (On The Track)
		IKK7 Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	N/A	3,51	3,9	4,01	4,08	4,20	4,61	4,40	4,55	4,65	4,94	2019	N/A	2024	4,94	4,65	4	4	N/A		N/A	N/A	N/A

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Base line (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024	N1	N2	R1		R2	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024												Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Tahun	R	Tahun	R								
				1	2	3	4	5	6	7	8		9												
		IKK8 Persentase stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang dan pelayanan obat	N/A					75	84,30	80	82,14	85	93	2019	N/A	2024	93	85	5	5	N/A		N/A	N/A	
SK.5	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	IKK9 Indeks RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	N/A	90	76,37	91	83,66	93	92,20	94	92,33	93,33	93,19	2019	N/A	2024	93,19	93,33	5	5	N/A		N/A	N/A	N/A
		IKK10 Nilai Pengelolaan Kearsipan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96,94	98,68	2019	N/A	2024	98,68	96,94	5	5	N/A		N/A	N/A	N/A
SK.6	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP yang berkinerja Optimal	IKK11 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	N/A	N/A	N/A	N/A	85	80	83,1	82	87,8	87,21	87,02	2019	N/A	2024	87,02	87,21	5	5	N/A		N/A	N/A	N/A

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Base line (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024	N1	N2	R1		R2	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024												Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Tahun	R	Tahun	R								
				1	2	3	4	5	6	7	8		9												
SK.7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	IKK12 Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	N/A	1,51	N/A	2	1	2,26	3	2,5	3	3	3	2019	N/A	2024	3	3	5	5	N/A		N/A	N/A	N/A
SK.8	Terkelolanya Keuangan di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP secara Akuntabel	IKK13 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	N/A	88	100	88	104,9	88	100	88	100	100	100	2019	N/A	2024	100	100	5	5	N/A		N/A	N/A	N/A

Berdasarkan perhitungan hasil Analisis Tren capaian kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor periode 2020-2024, untuk perkembangan kinerja adalah sebagai berikut dari 13 (tigabelas) indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 4 (empat) indikator yang menunjukkan tren positif dengan kategori "meningkat" atau "on the track". Hal ini menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor telah menjalankan perannya dengan baik dalam bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor .

Indikator yang menunjukkan tren positif dengan kategori meningkat atau on the track yaitu : Indikator kepuasan stakeholder terhadap pelayanan publik di bidang distribusi obat, Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan, Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai dan Persentase Keputusan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator-indikator yang mengalami peningkatan ini menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan program kerja, dengan hasil yang tercermin dalam capaian yang semakin membaik. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi peningkatan ini antara lain perbaikan proses internal, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, serta koordinasi yang lebih baik dengan berbagai pihak terkait. Keempat indikator yang menunjukkan perkembangan positif ini menjadi acuan untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan di area yang lainnya, sehingga kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP semakin baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

5. Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA

Tabel 4. 10 Analisis Tren Tahun ke-5 Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024-t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0) [^] (1/N1)) -1	R2 ((xt/xt0) [^] (1/N2))-1	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024											Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9												
SK 1.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Obat dan NPP dalam rangka penjaminan mutu keamanan informasi Obat dan NPP serta promosi Obat	IKK 1. Indeks Kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan Obat dan NPP	98,63	86	86	84,7	93,2	87	92,2	93	82,71	94	75,11	2019	98,63	2024	75,11	94	5	5	-0,01	-0,05	499,03	Meningkat (On The Track)
SK 2.	Kepatuhan industri produk tembakau yang tinggi atas aturan pengawasan label, promosi, dan iklan produk tembakau	IKK 2. Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam label dan iklan	45,85	46	45	47	54	48	54	49	55	55	56	2019	45,85	2024	55,80	55	5	5	0,04	0,04	105,94	Meningkat (On The Track)
SK 3.	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan	IKK 3. Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	N/A	70	98	72	70	74	73	76	77	78	75	2019	N/A	2024	75,33	78	5	5	N/A	N/A	N/A	Belum dapat disimpulkan

No Kode		Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024-t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0) [^] (1/N1)) -1	R2 ((xt/xt0) [^] (1/N2))-1	PERKEMBANGAN KINERJA	
					2020		2021		2022		2023		2024											Perkembangan Kinerja	Kategori
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Tahun (t0)	R (xt0)	Tahun (t)	R (xt)							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9												
	ekspor impor Obat dan NPP	IKK 4. Jumlah permohonan ekspor impor Obat dan NPP yang diselesaikan tepat waktu	17280	16300	18550	18000	20499	18100	19224	18100	22642	22500	25271	2019	17280	2024	25271	22.500	5	5	0,05	0,08	145,70	Meningkat (On The Track)	
		IKK 5. Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZaf	N/A	3,11	4,33	4,45	4,52	4,51	4	4	5	5	5	2019	N/A	2024	4,87	5	5	5	N/A	N/A	N/A	Belum dapat disimpulkan	
		IKK 6. Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	60,85	87,3	90,41	90,77	93,75	92,59	94	94	94	94	98	2019	60,85	2024	98,36	94	5	5	0,09	0,10	111,19	Meningkat (On The Track)	
SK 4.	Pelayanan publik di bidang pengawasan iklan Obat dan Ekspor Impor Obat dan NPP yang prima	IKK 7. Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor.	83,72	85	85,3	87	90,23	88	91	89	92	92	92	2019	83,72	2024	92,24	92	5	5	0,02	0,02	102,79	Meningkat (On The Track)	

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024-t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0) ^{1/N1}) -1	R2 (((xt/xt0) ^{1/N2})-1	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024											Perkembangan Kinerja	Kategori
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Tahun (t0)	R (xt0)	Tahun (t)	R (xt)							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9												
SK 5.	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKK 8. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZAf	N/A	75	77,74	78	87,71	79	88	80	92	91	88	2019	N/A	2024	88,24	91	5	5	N/A	N/A	N/A	Belum dapat disimpulkan
SK 6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZAf yang efektif	IKK 9. Nilai Pengelolaan Kearsipan	N/A	(belum ada IKU pengelolaan kearsipan)								89,68	91,11	2019	N/A	2024	91,11	90	5	5	N/A	N/A	N/A	Belum dapat disimpulkan
SK 7.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZAf	IKK 10. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZAf yang optimal	N/A	1,51	0	2	1	2,25	3	3	3	3	3	2019	N/A	2024	3,00	3	5	5	N/A	N/A	N/A	Belum dapat disimpulkan

No Kode		Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2019)	Tahun										Baseline		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024-t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0)^ (1/N1)) -1	R2 ((xt/xt0)^ (1/N2)) -1	PERKEMBANGAN KINERJA	
					2020		2021		2022		2023		2024											Perkembangan Kinerja	Kategori
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
SK 8.	Terkelolanya Keuangan secara akuntabel	IKK 11. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZaf	N/A	98	99,97	98	100	98	100	98	100	98	100	2019	N/A	2024	100,00	98	5	5	N/A	N/A	N/A	Belum dapat disimpulkan	

Berdasarkan perhitungan hasil analisis tren terhadap capaian kinerja di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA, menunjukkan adanya hasil yang positif dengan pola peningkatan sesuai *track* dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA telah menjalankan peranannya dengan baik dalam bidang pengawasan keamanan, mutu dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif.

Adapun indikator kinerja yang mengalami perkembangan kinerja dengan kategori Meningkat (*On The Track*), yaitu

1. Indeks Kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan Obat dan NPP
2. Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam label dan iklan;
3. Jumlah permohonan ekspor impor Obat dan NPP yang diselesaikan tepat waktu;
4. Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat; dan
5. Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor.

Beberapa faktor yang mendukung terhadap peningkatan dan progres positif dalam pelaksanaan kegiatan di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA, antara lain:

1. Penerapan kebijakan dan program kerja yang tepat sasaran serta sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan pengelolaan teknologi serta penerapan sistem kerja yang efektif dan efisien di lingkungan kerja Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin dan berkelanjutan dalam memastikan keberhasilan capaian indikator kinerja di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA dan
4. Adanya komitmen seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima serta pelaksanaan kolaborasi dengan seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan pengawasan keamanan, mutu dan ekspor impor obat dan NAPPZA.

Meskipun tren kinerja secara keseluruhan menunjukkan peningkatan dan berada *on the track*, terdapat beberapa capaian indikator kinerja di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA yang masih mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi kinerja, mengoptimalkan sumber daya, serta memperkuat strategi adaptif guna memastikan bahwa seluruh indikator dapat mencapai target yang lebih stabil dan berkelanjutan.

4.2.2 Analisis Gap (Evaluasi Tahun ke-5)

1. Direktorat Standardisasi Obat NPPZA

Tabel 4. 11 Analisis Gap Evaluasi Tahun ke-5 Direktorat Standardisasi ONPPZA

No. Kode		Program dan Kegiatan	Kod e*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)	
						T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori
K.1		Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif															
SK.1	1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	1	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	Indeks	71	89,4	89,6	83,43	89,7	83,43	86,1	93,79	94	93,79	100,0	Sangat Baik
		Tersedianya Identifikasi kebutuhan standar ONPPZA		Persentase Kesesuaian Perencanaan Penyusunan Standar ONPPZA sesuai Roadmap	Persentase	80	100	83	100	0	0	0	0	0	0	N/A	Belum dapat disimpulkan
SK.2	2	Penyusunan standar ONPPZA yang efektif	2	Persentase standar ONPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	Persentase	84	83,33	86	100	89	100	90	100	95,5	100	104,7	Sangat Baik
SK.3	3	Sosialisasi standar ONPPZA yang efektif	3	Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada stakeholder yang efektif	Persentase	92	91,19	88	84,48	89	94,32	90	94,6	95	96,24	101,3	Sangat Baik
SK.4	4	Pelayanan publik di bidang standardisasi ONPPZA	4	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang standardisasi ONPPZA	Indeks									85,5	95,37	111,5	Sangat Baik
SK.5	5	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik di Direktorat Standardisasi ONPPZA	5	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi ONPPZA	Indeks									4,50	4,78	106,2	Sangat Baik

No. Kode		Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)	
						T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori
SK.6	6	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan dilingkup Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	6	Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA	Indeks	85,00	72,63	85,33	85,30	87,30	90,98	89,30	90,79	91,79	92,08	100,3	Sangat Baik
			7	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai							0,00	94,62	94,80	94,37	99,5	Baik
SK 7	7	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi ONPPZA yang berkinerja optimal	8	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA	Indeks	75,00	80,57	81,00	86,94	82,00	86,29	83,00	90,22	90,35	88,72	98,2	Baik
SK 8	8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat di Direktorat Standardisasi ONPPZA	9	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	Indeks	1,51	0,00	2,00	1,75	2,25	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	100,0	Sangat Baik
SK 9	9	Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi ONPPZA secara Akuntabel	10	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	Sangat Baik

Dalam periode 2020-2024, Direktorat Standardisasi Obat, NPPZA telah menunjukkan capaian kinerja yang bervariasi berdasarkan analisis gap terhadap [target yang telah ditetapkan](#).

Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat mencapai 100%, yang masuk dalam kategori *Sangat Baik*, menandakan bahwa kebijakan pengawasan obat telah mencapai target optimal dan perlu dipertahankan. Persentase Standar ONPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan mencapai 104,7%, yang juga dikategorikan sebagai *Sangat Baik*, mencerminkan efektivitas yang tinggi dalam penyusunan standar.

Persentase Sosialisasi Standar ONPPZA kepada stakeholder yang efektif mencapai 101,3%, berada dalam kategori *Sangat Baik*, yang menunjukkan efektivitas sosialisasi kepada pemangku kepentingan. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di bidang standardisasi ONPPZA mencapai 111,5%, juga masuk dalam kategori *Sangat Baik*, mencerminkan peningkatan kepuasan yang luar biasa terhadap layanan yang diberikan. Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi ONPPZA berada di angka 106,2%, masuk dalam kategori *Sangat Baik*, yang menunjukkan efektivitas kebijakan dan implementasi layanan yang terus mengalami peningkatan.

Dalam hal Reformasi Birokrasi, Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA mencapai 100,3%, yang dikategorikan *Sangat Baik*, menandakan bahwa reformasi birokrasi berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu, Nilai Pengelolaan Kearsipan mencapai 99,5%, yang dikategorikan *Baik*, mengindikasikan bahwa kinerja di bidang kearsipan hampir mencapai target yang diharapkan dan perlu dipertahankan.

Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA mencapai 100%, masuk dalam kategori *Sangat Baik*, mencerminkan profesionalisme ASN yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA tidak dapat terdefinisi karena pada baseline tahun 2020 realisasi kinerjanya nol, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan analisis gap. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA mencapai 100%, masuk dalam kategori *Sangat Baik*, yang menunjukkan efisiensi anggaran yang optimal.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Direktorat Standardisasi Obat, NPPZA didominasi oleh kategori *Sangat Baik*, yang menunjukkan bahwa kinerja secara umum telah memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan. Namun, beberapa aspek

seperti Pengelolaan Kearsipan yang berada pada kategori *Baik* masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk memastikan peningkatan capaian di masa mendatang. Evaluasi dan optimalisasi berkelanjutan akan diperlukan guna menjaga serta meningkatkan capaian kinerja di semua indikator yang telah ditetapkan.

2. Direktorat Registrasi Obat

Tabel 4. 12 Analisis Gap Evaluasi Tahun ke-5 Direktorat Registrasi Obat

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun										Nilai	Kategori
				T1		T2		T3		T4		T5			
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
SK.1	Obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	IKK 1-Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	persen	70.00	88.53	88.50	85.17	89.00	84.13	89.50	95.45	90.00	98.63	109.6	Sangat Baik
SK.2	Pelayanan publik di bidang registrasi obat yang prima	IKK 2- Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	indeks	82.00	82.37	85	88.54	86	87.35	87	90.22	91	93.83	103.4	Sangat Baik

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun										Nilai	Kategori
				T1		T2		T3		T4		T5			
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang Registrasi Obat	IKK 3 -Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	persen	63.00	74.90	66.00	71.21	76.00	66.98	77.00	80.97	78.00	74.17	95.1	Baik
		IKK 4 - Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	persen	70	82.85	73	80.54	76	76.56	79	83.77	82	75.99	92.7	Baik
		IKK 5 - Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat	indeks	3.79	3.51	4.01	3.99	4.2	4.51	4.4	4.71	4.8	4.87	101.5	Sangat Baik

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun										Nilai	Kategori
				T1		T2		T3		T4		T5			
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
		IKK 6 - Persen pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0	Sangat Baik
SK.4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pre Market terhadap Sarana UK/Lab BE	IKK 7 - Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	persen	78	50	81	57.14	84	90	87	94.74	90	94.12	104.6	Sangat Baik
SK.5	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat	IKK 8 - Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0	Sangat Baik

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun										Nilai	Kategori
				T1		T2		T3		T4		T5			
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
SK.6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Direktorat Registrasi Obat yang optimal	IKK 9-Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	indeks	88	80.85	88.5	85.92	90	90.92	90.1	90.24	91.3	91.11	99.8	Baik
		IKK 10 -Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96.96	94.41	97.4	Baik
SK.7	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi Obat yang optimal	IKK 11 - Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	indeks	75	88.41	88.5	89.21	88.9	88.94	89.3	92.55	92.54	89.78	97.0	Baik
SK.8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi Obat	IKK 12- Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	indeks	1.51	0	2	0.75	2.25	2	2.5	1.75	3	3	100.0	Sangat Baik

No Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun										Nilai	Kategori
				T1		T2		T3		T4		T5			
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
SK.9	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi Obat secara Akuntabel	IKK 13 -Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	persen	92	100	93	100	94	100	95	100	100	100	100.0	Sangat Baik

Secara keseluruhan dalam periode 2020-2024, capaian indikator kinerja Direktorat Registrasi Obat didominasi oleh kategori *Sangat Baik*, yang menunjukkan bahwa kinerja secara umum telah memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan. Namun, beberapa 5 (lima) indikator seperti Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar, Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu, Indeks RB, Pengelolaan Kearsipan dan Profesionalisme ASN yang berada pada kategori *Baik* masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk memastikan peningkatan capaian di masa mendatang. Evaluasi dan optimalisasi berkelanjutan akan diperlukan guna menjaga serta meningkatkan capaian kinerja di semua indikator yang telah ditetapkan.

Gap pada Indikator dengan Kategori "Sangat Baik"

8 (delapan) indikator kinerja yang mencapai kategori "Sangat Baik" menunjukkan bahwa Direktorat Registrasi Obat telah berhasil memenuhi sebagian besar target yang ditetapkan, bahkan melampaui ekspektasi dalam beberapa aspek. Namun, meskipun capaian ini sangat baik, gap analysis tetap perlu dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut, seperti apakah sumber daya yang ada dimanfaatkan secara optimal dan apakah ada potensi untuk meningkatkan efisiensi lebih lanjut.

Gap pada Indikator dengan Kategori "Baik"

Lima indikator yang memperoleh kategori "Baik" menunjukkan bahwa meskipun capaian kinerja sudah berada dalam batas yang memadai, masih terdapat ruang untuk perbaikan. Gap yang teridentifikasi pada indikator-indikator ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala dalam implementasi program, keterbatasan sumber daya, atau variabel eksternal yang memengaruhi hasil. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dalam melakukan perbaikan agar pencapaian pada dua indikator tersebut dapat ditingkatkan ke kategori "Sangat Baik". Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar dan Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu masih belum mencapai 100%, yang masuk dalam kategori *Baik*, hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan intervensi agar penyelesaian dokumen registrasi dapat memenuhi ketentuan tepat waktu. Intervensi yang diperlukan antara lain peningkatan dialog dengan pelaku usaha mengenai pemenuhan dokumen, peningkatan kompetensi evaluator dalam evaluasi berbasis risiko sehingga akan mempercepat proses penyelesaian layanan.

Tindak Lanjut dan Rekomendasi

Berdasarkan gap analysis, beberapa rekomendasi dapat diambil untuk memastikan perbaikan capaian kinerja pada indikator yang berada pada kategori "Baik". Direktorat Registrasi Obat perlu fokus pada peningkatan aspek-aspek yang menjadi kendala, baik itu melalui peningkatan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia, pembaruan prosedur operasional, ataupun penggunaan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien.

3. Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP

Tabel 4. 13 Analisis Gap Evaluasi Tahun ke-5 Direktorat *Pengawasan Produksi Obat & NPP*

No. Kode (Kolom 1)	Program dan Kegiatan (kolom 2)	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori
P.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia														
K.1	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor														

No. Kode (Kolom 1)	Program dan Kegiatan (kolom 2)	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori
SK.1	Terwujudnya Sarana Produksi Obat yang Mandiri	Persentase sarana produksi obat yang mandiri dalam pemenuhan CPOB	Persentase	50%	53.33%	55%	65.79%	60%	70%	65%	77.14%	77.20%	90.48%	117.2	Sangat Baik
SK.2	Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Sarana Produksi Obat yang Prima	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	Nilai	85	85.16	87	88.27	88	90.4	89	90	90.00	93.75	104.2	Sangat Baik
SK.3	Meningkatnya Sarana Produksi Obat JKN, Bahan Baku Obat, dan Obat High Risk Lainnya yang Mematuhi CPOB	Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	Persentase	72%	82.26%	74%	77.19%	76%	76.20%	78%	68.97%	76%	67.88%	89.3	Cukup Baik
SK.4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Obat Berbasis Risiko	Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	Persentase	90%	88.89%	95%	100%	95%	100%	100%	100.00 %	100%	100.00 %	100.0	Sangat Baik
		Persentase fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku yang diawasi sesuai standar	Persentase	84%	88.94%	86%	88.24%	90%	105.13 %	91%	93.97%	94%	101.71 %	108.2	Sangat Baik
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	Persentase	72%	83.07%	74%	74.24%	76%	76.92%	78%	78.26%	80%	80.82%	101.0	Sangat Baik
SK.5	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Sarana Produksi Obat	Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi bahan baku obat, obat, produk biologi dan sarana	Persentase	65%	73.08%	70%	70.75%	75%	77.54%	80%	82.76%	85%	85.05%	100.1	Sangat Baik

No. Kode (Kolom 1)	Program dan Kegiatan (kolom 2)	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori
		khusus yang diselesaikan tepat waktu													
		Indeks pelayanan publik	Nilai	3.51	3.89	3.76	4.26	4.01	4.54	4.4	4.78	4.85	4.92	101.4	Sangat Baik
SK.6	Meningkatnya kemampuan mendorong inovasi pengembangan obat	Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	Persentase	60%	61.11%	65%	72.22%	70%	70.83%	75%	78.13%	85%	92.86%	109.2	Sangat Baik
SK.7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Dit.Was.Produksi ONPP yang optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	Nilai	85	78.38	89	87.78	93	92.09	88.4	93.1	94.1	93.37	99.2	Baik
SK.8	Terwujudnya SDM Ditwas Produksi ONPP yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	Nilai	75	87.4	77	85.85	87.75	87.13	88	91.41	91.22	88.53	97.1	Baik
SK.9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi ONPP yang optimal	Nilai	1.51	1	2	1.75	2.26	3	2.5	3	3	3	100.0	Sangat Baik
SK.10	Terkelolanya Keuangan Ditwas Produksi ONPP secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	Nilai	95	100	95	100	100	100	95	100	100	100	100.0	Sangat Baik
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97.75	97.74	100.0	Baik

4. Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP

Tabel 4. 14 Analisis Gap Evaluasi Tahun ke-5 Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP

No. Kode (Kolom 1)	Program dan Kegiatan (kolom 2)	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori
P.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia														
K.1	Pengawasan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor														
SK.1	Meningkatnya kepatuhan Stakeholder di bidang distribusi dan pelayanan obat	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Persentase	70	74,68	75	80,36	77	80,01	79	82,68	81	82,18	101,5	Sangat Baik
SK.2	Meningkatnya kepuasan Stakeholder di bidang pengawasan distribusi obat	Indeks kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan publik di bidang distribusi obat	Nilai	87,5	88,01	89	90,26	90	90,73	91	92,94	93,5	94,03	100,57	Sangat Baik
SK.3	Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan Output : Keputusan Hasil Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	Persentase	80	85,24	81	82,73	86	87,89	87	94,52	95,5	96,46	101,0	Sangat Baik

No. Kode (Kolom 1)	Program dan Kegiatan (kolom 2)	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori
		Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan	Persentase	N/A	N/A	N/A	N/A	86	92,59	87	100	97	97,56	100,6	Sangat Baik
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai	Persentase	65	76,26	79	84,53	80	81,01	81	87,42	88	93,86	106,7	Sangat Baik
SK.4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat	Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang diselesaikan tepat waktu Output: Keputusan Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang diselesaikan tepat waktu	Persentase	78	84,33	80	93,76	86	89,26	94	94,63	96	96,17	100,2	Sangat Baik
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	Nilai	3,51	3,9	4,01	4,08	4,20	4,61	4,40	4,55	4,65	4,94	106,2	Sangat Baik
		Persentase stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang dan pelayanan obat	Persentase	N/A	N/A	N/A	N/A	75	84,30	80	82,14	85	93	109,4	Sangat Baik

No. Kode (Kolom 1)	Program dan Kegiatan (kolom 2)	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori
SK.5	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP diselesaikan tepat	Nilai	90	76,37	91	83,66	93	92,20	94	92,33	93,33	93,19	99,8	Baik
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96,94	98,46	101,6	Sangat Baik
SK.6	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP yang berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	Nilai	75	59,61	77	84,73	80	83,11	82	87,8	87,21	87,02	99,8	Baik
SK.7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	Nilai	1,51	N/A	2	1	2,26	3	2,5	3	3	3	100,0	Sangat Baik
SK.8	Terkelolanya Keuangan di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	Nilai	88	100	88	104,9	88	100	88	100	100	100	100,0	Sangat Baik

5. Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA

Tabel 4. 15 Analisis Gap Evaluasi Tahun ke-5 Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA

No. Kode (kolom 1)	Program dan Kegiatan (kolom 2)	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja	
			(Kolom 4)											(Kolom 9)	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori
P.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia														
K.1	Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif														
SK.1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Obat dan NPP dalam rangka penjaminan mutu keamanan informasi Obat dan NPP serta promosi Obat	Indeks Kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan Obat dan NPP	Persentase	86	86	84,7	93,2	87	92,2	93	82,71	93,5	75,11	80,33	Cukup
SK.2	Kepatuhan industri produk tembakau yang tinggi atas aturan pengawasan label, promosi, dan iklan produk tembakau	Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam label dan iklan	Nilai	46	45,13	47	53,62	48	54,37	49	55,16	55,2	55,80	101,09	Sangat Baik
SK.3	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di	Persentase permohonan persetujuan iklan obat	Persentase	70	97,76	72	69,79	74	73,23	76	76,95	78	75,33	96,59	Cukup

No. Kode (kolom 1)	Program dan Kegiatan (kolom 2)	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja	
			(Kolom 4)											(Kolom 9)	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori
	bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor Obat dan NPP	yang diselesaikan tepat waktu													
		Jumlah permohonan ekspor impor Obat dan NPP yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	16300	18550	18000	20499	18100	19224	18100	22642	22500	25271	112,32	Sangat Baik
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Nilai	3,11	4,33	4,45	4,52	4,51	4,45	4,25	4,64	4,7	4,87	103,62	Sangat Baik
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	Nilai	87,3	90,41	90,77	93,75	92,59	93,8	94,44	93,8	93,91	98,36	104,74	Sangat Baik

No. Kode (kolom 1)	Program dan Kegiatan (kolom 2)	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja	
			(Kolom 4)											(Kolom 9)	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori
SK.4	Pelayanan publik di bidang pengawasan iklan Obat dan Ekspor Impor Obat dan NPP yang prima	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor.	Nilai	85	85,3	87	90,23	88	90,9	89	91,62	92	92,24	100,26	Sangat Baik
SK.5	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Nilai	75	77,74	78	87,71	79	87,98	80	91,66	91,26	88,24	96,69	Cukup
SK.6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Direktorat	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai	(belum ada IKU pengelolaan kearsipan)								89,68	91,11	101,59	Sangat Baik

No. Kode (kolom 1)	Program dan Kegiatan (kolom 2)	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja	
			(Kolom 4)											(Kolom 9)	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori
	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang efektif														
SK.7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	Nilai	1,51	0	2	1	2,25	3	2,5	3	3	3	100,00	Baik
SK.8	Terkelolanya Keuangan secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat		98	99,97	98	100	98	100	98	100	98	100	102,04	Sangat Baik

No. Kode (kolom 1)	Program dan Kegiatan (kolom 2)	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja	
			(Kolom 4)											(Kolom 9)	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori
		Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif													

Gap Analysis Capaian Kinerja Indikator Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP - Evaluasi Tahun ke -5

Evaluasi kinerja pada tahun ke-5, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP telah menunjukkan hasil yang memuaskan berdasarkan 13 indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari 13 indikator tersebut, 11 indikator berhasil mencapai kategori "**Sangat Baik**", sementara 2 indikator lainnya berada pada kategori "**Baik**". Meskipun capaian ini mencerminkan hasil yang signifikan dan konsisten dalam pencapaian tujuan, penting untuk melakukan analisis gap guna memahami adanya kesenjangan antara target yang diinginkan dengan hasil yang tercapai.

Gap pada Indikator dengan Kategori "Sangat Baik"

11 (sebelas) indikator kinerja yang mencapai kategori "Sangat Baik" menunjukkan bahwa Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP telah berhasil memenuhi sebagian besar target yang ditetapkan, bahkan melampaui ekspektasi dalam beberapa aspek. Namun, meskipun capaian ini sangat baik, gap analysis tetap perlu dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut, seperti apakah sumber daya yang ada dimanfaatkan secara optimal dan apakah ada potensi untuk meningkatkan efisiensi lebih lanjut.

Gap pada Indikator dengan Kategori "Baik"

Dua 2 indikator yang memperoleh kategori "Baik" menunjukkan bahwa meskipun capaian kinerja sudah berada dalam batas yang memadai, masih terdapat ruang untuk perbaikan. Gap yang teridentifikasi pada indikator-indikator ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala dalam implementasi program, keterbatasan sumber daya, atau variabel eksternal yang memengaruhi hasil. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dalam melakukan perbaikan agar pencapaian pada dua indikator tersebut dapat ditingkatkan ke kategori "Sangat Baik".

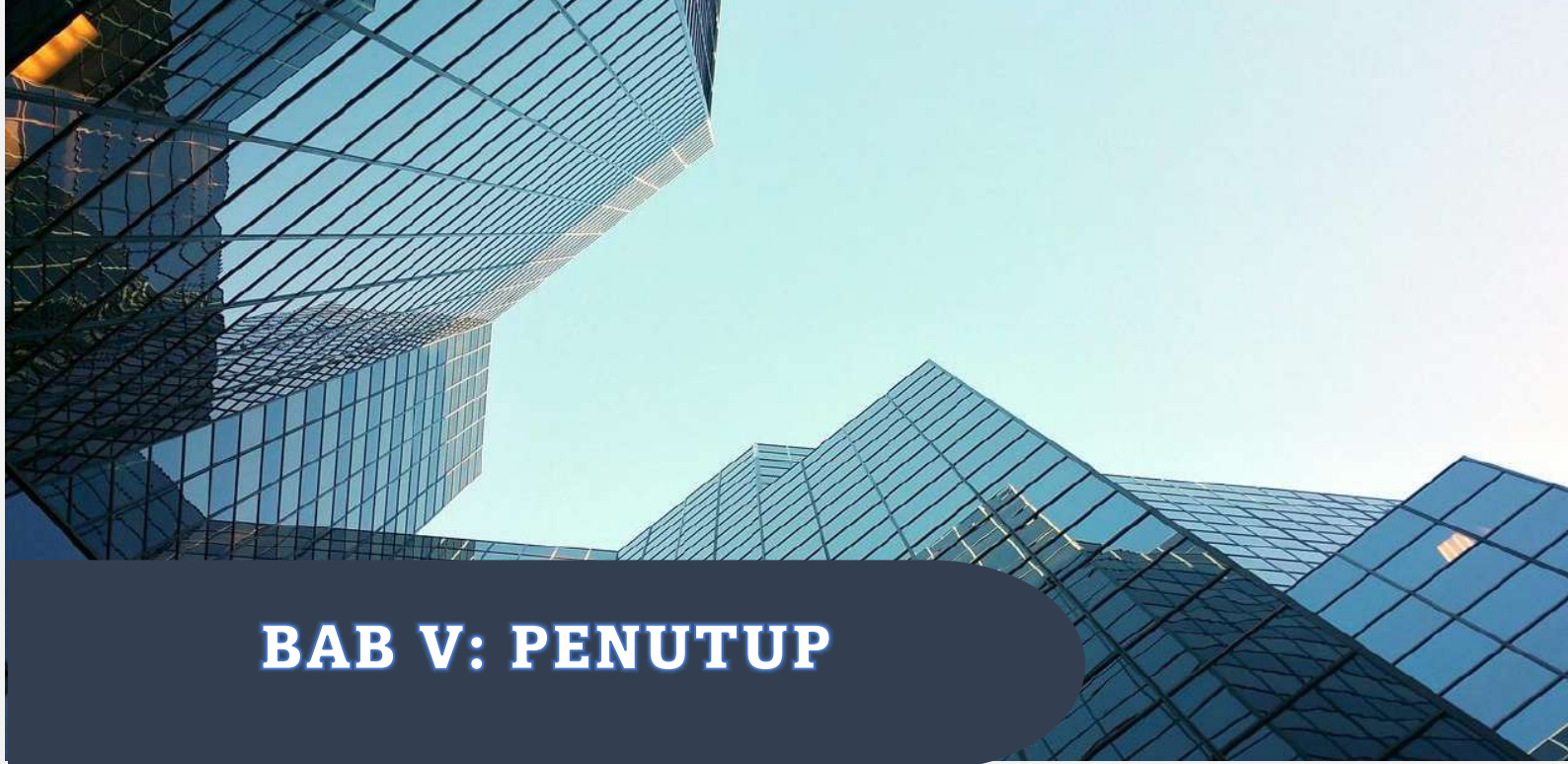
Tindak Lanjut dan Rekomendasi

Berdasarkan gap analysis, beberapa rekomendasi dapat diambil untuk memastikan perbaikan capaian kinerja pada indikator yang berada pada kategori "Baik". Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP perlu fokus pada peningkatan aspek-aspek yang menjadi kendala, baik itu melalui peningkatan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia, pembaruan prosedur operasional, ataupun penggunaan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien. Selain itu, evaluasi terhadap faktor eksternal yang memengaruhi pencapaian juga harus dilakukan untuk mengidentifikasi langkah-langkah preventif agar kendala serupa tidak terulang di masa mendatang.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP juga perlu menjaga kinerja yang sudah sangat baik pada indikator-indikator yang sudah mencapai kategori "Sangat Baik", dengan memastikan bahwa proses internal yang mendukung capaian tersebut tetap dipertahankan dan terus disempurnakan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP telah menunjukkan capaian yang sangat baik selama lima tahun evaluasi, dengan sebagian besar indikator kinerja yang berada dalam kategori "Sangat Baik". Meskipun demikian, gap analysis ini memberikan kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, khususnya pada dua indikator yang berada dalam kategori "Baik", guna menciptakan keselarasan dan penyempurnaan di seluruh aspek yang ada. Dengan langkah-langkah perbaikan yang terencana, diharapkan capaian kinerja dapat terus meningkat dan mendekati standar yang optimal dalam tahun-tahun mendatang.



BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Evaluasi kegagalan/keberhasilan dari capaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024, dari 10 (sepuluh) Sasaran Program dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA berhasil mencapai nilai sebagai berikut:

1. Satu (1) IKU dengan kategori Tidak dapat disimpulkan ($>120\%$)
2. Empat belas (14) IKU dengan kategori SANGAT BAIK ($100\% < x < 120\%$)
3. Dua (2) IKU dengan kategori BAIK ($=100\%$)
4. Delapan (8) IKU dengan kategori CUKUP ($70\% < x < 100\%$)

Dalam rangka mewujudkan target kinerja tahun 2024 sebagaimana di atas, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA didukung dengan alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan. Adapun alokasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah sebesar Rp 53.801.474.000 hingga akhir tahun 2024, Sampai dengan akhir tahun 2024 telah dilakukan 9 kali revisi DIPA terdapat perubahan Pagu menjadi sebesar Rp. 54.386.984.000, karena adanya pengesahan hibah dari WHO sebesar Rp. 78.797.000, dan terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 3.612.654.000 sehingga Pagu yang dapat digunakan sebesar Rp. 50.853.127.000, Realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 50.852.195.676 (99,998%). Berdasarkan analisis efisiensi yang membandingkan antara capaian output dan input dari masing-masing kegiatan, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang

dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah 0.0333 dengan kategori **efisien**.

5.2 Saran

Untuk peningkatan kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA, perlu melakukan perbaikan antara lain:

1. Penguatan regulasi dan kebijakan, dengan melakukan review dan penyempurnaan regulasi terkait pengawasan obat NPPZA.
2. Peningkatan kapasitas SDM, dengan memberikan pelatihan berkala kepada pegawai agar terjadi peningkatan kompetensi
3. Optimalisasi penggunaan teknologi, dengan mengembangkan sistem digital untuk monitoring dan pelaporan pengawasan obat NPPZA.
4. Edukasi kepada masyarakat
 - a. Mengadakan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat NPPZA kepada masyarakat dan tenaga kesehatan.
 - b. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam melaporkan peredaran obat ilegal.